



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

**PERATURAN WALIKOTA NOMOR
TENTANG**

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024**

BUKU IV

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
- DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH
- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
- KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional menjadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
5. Rencana...

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. dinas...

- d. dinas perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- f. dinas sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. dinas pangan dan pertanian;
- i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. dinas perhubungan;
- k. dinas komunikasi dan informatika;
- l. dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- m. dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- n. dinas perpustakaan dan kearsipan;
- o. sekretariat daerah;
- p. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
- q. Bappeda;
- r. badan pengelola keuangan daerah;
- s. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- t. inspektorat;
- u. kecamatan padang panjang timur;
- v. kecamatan padang panjang barat; dan
- w. badan penanggulangan bencana daerah, kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan.
- (2) Dalam hal RKPD berkenaan mengalami perubahan, Renja Perangkat Daerah harus mengikuti perubahan.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 20

NO	JABATAN	NAMA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten		
3.	Kepala Bappeda		





PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

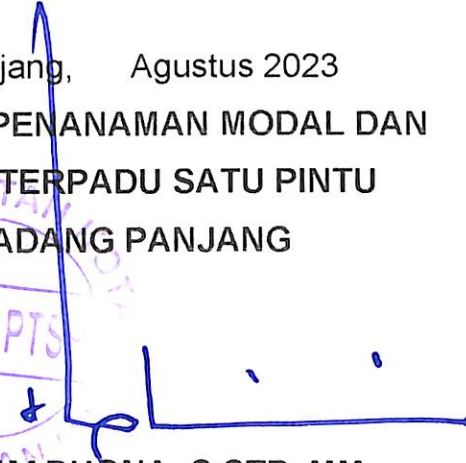
KATA PENGANTAR

Rasa puji dan syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan "Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024" dimana kami telah berupaya sedapat mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Padang Panjang melalui Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

Penyusunan Rencana Kerja suatu instansi pemerintah daerah mutlak dilakukan karena merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Oleh sebab itu, maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi bagian dari upaya mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu "Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Iklim Investasi yang Kondusif, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja yang Maju, Mandiri dan Islami". Diharapkan agar target yang telah direncanakan dapat terpenuhi di setiap tahun anggaran sehingga visi tersebut dapat tercapai.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024. Semoga Allah SWT memberkahi usaha yang telah kita laksanakan ini.

Padang Panjang, Agustus 2023
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG**


FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM

Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002

1

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah.....	19
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	26
3.3. Program dan Kegiatan.....	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	42
BAB V P E N U T U P.....	52



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada BAB I Pasal 1 angka 30 dinyatakan bahwa :

“ Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. “

Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Dalam Pasal 126 ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Kemudian dalam Pasal 127 dijelaskan bahwa berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi rancangan RKPD.

Dengan demikian terlihat bahwa tahapan perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan RKPD. Hal ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang akhirnya akan menjadi pedoman/bahan dalam proses penyusunan RAPBD.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk satu (1) Tahun Anggaran yang berisikan penjabaran dari Visi, Misi, Prioritas dan Sasaran pembangunan untuk Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Padang Panjang disusun dengan melibatkan semua pihak terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disertai sebagian kewenangan oleh Walikota untuk menangani Penyelenggaraan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan di Kota Padang Panjang.

1.2. Landasan Hukum.

Adapun landasan hukum disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

- i. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- l. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 7 Agustus 2023 sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- n. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
- p. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019;
- q. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dari Walikota Padang Panjang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;
- r. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Untuk menjamin keterkaitan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang tahun lalu (Tahun 2023) pada umumnya telah dapat terlaksana dengan baik dengan rata-rata capaian kinerja 100%. Untuk lebih jelasnya mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.1.1 berikut ini.

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	Urusan/Bidang non pelayanan dasar									
	Urusan/ Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
	Bidang urusan DPMPSTP		2,599,168,078	2,057,290,544	2,524,919,000	1,847,573,830	73.17%	2,089,736,640	5,902,611,040	
	Program pelayanan administrasi perkantoran									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		197,786,678	168,050,805	211,869,000	170,015,469	80.25%	202,993,473	541,059,747	267%
	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Outcome Tersedianya jasa surat menyurat Output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,980,000	1,980,000	3,000,000	250,000	8.33%	3,000,000	5,230,000	174%
	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang	43,846,250	34,348,627	48,575,000	34,434,406	70.89%	49,999,590	118,782,623	238%

						Disediakan									
					Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Outcome Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	151,960,428	131,722,178	160,294,000	135,331,063	84.43%	149,993,883	417,047,124	278%	
						Output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan									
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		131,950,600	88,667,600	209,837,300	147,975,900	70.52%	120,521,890	357,165,390	296%	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		66,080,000	54,488,000					54,488,000		
					Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Outcome Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	131,712,300	102,602,200	77.90%	70,799,290	173,401,490	245%	
						Output Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
					Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome Terlaksananya Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	45,110,000	14,745,000	48,125,000	15,515,000	32.24%	29,722,600	59,982,600	202%	
						Output Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									
					Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Outcome Terlaksananya Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	20,760,600	19,434,600	30,000,000	29,858,700	99.53%	20,000,000	69,293,300	346%	
						Output Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi									
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		159,925,600	136,083,238	236,351,750	213,044,748	90.14%	297,774,561	646,902,547	217%	
					Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Outcome Tersedianya bahan logistik kantor	18,085,000	16,965,000	35,396,500	33,791,500	95.47%	33,683,600	84,440,100	251%	

[illegible]

Handwritten signature and mark.

				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Outcome Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0	0				14,200,000	14,200,000	0%
				Output Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
				Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
				Kegiatan Penyusunan Buku Profil Pelayanan	Outcome Jumlah buku profil mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan	0	0					0	0%
					Output Terlaksananya penyusunan buku profil mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan								
				Kegiatan Sosialisasi Peraturan di Bidang Perizinan Bagi Masyarakat dan Pelaku usaha	Outcome Persentase Tersedianya Informasi Perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha							0	
					Output Terlaksananya penyusunan buku profil mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan								
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		652,244,000	630,439,630	355,236,000	320,636,550	90.26%	417,400,000	1,368,476,180	328%
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		326,122,000	315,219,815					315,219,815	0.00%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		142,718,500	133,393,815					133,393,815	0.00%

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Output Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	87,747,500	86,470,000	287,567,500	256,094,350	89.06%	335,306,100	677,870,450	0.00%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Outcome Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	95,656,000	95,356,000	67,668,500	64,542,200	95.38%	82,093,900	241,992,100	0.00 %
				Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Output Jumlah Inspeksi Lapangan Terhadap Kegiatan Usaha	750,474,000	402,810,800	507,900,200	459,552,023	90.48%	429,159,200	1,291,522,023	300.94%
				Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Berdasarkan Unit Kompetensi		375,237,000	201,405,400					201,405,400	0.00%
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		375,237,000	201,405,400	76,876,000	60,582,561	78.81%	162,409,200	424,397,161	0.00%
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		0	0	431,024,200	398,969,462	92.56%	266,750,000	665,719,462	0.00%
				Program Penempatan Tenaga Kerja									
				Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		223,831,000	199,619,500	31,653,000	19,783,350	62.50%	0	219,402,850	0.00%
				Pelayanan Antar Kerja		223,831,000	199,619,500					199,619,500	0.00%
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		0	0	31,653,000	19,783,350	62.50%		19,783,350	0.00%

✓

				Perluasan Kesempatan Kerja		0	0				0	0.00 %	
				Program Hubungan Industrial		107,007,000	102,053,200	827,808,950	376,917,800	45.53%	496,730,716	975,701,716	196.42%
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota		107,007,000	102,053,200					102,053,200	0.00%
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan		0	0	827,808,950	376917800	45.53%	462,418,316	839,336,116	0.00%
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kotata		0	0				34,312,400	34,312,400	0.00%

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG



FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002

KETERANGAN TABEL:

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 6 program kegiatan yang disusun pada tahun 2022 berdasarkan urusan penanaman modal dan tenaga kerja. Masing-masing dari program tersebut memiliki target dan realisasi pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target tahun 2022 Rp 687.758.050 dan capaian realisasi Rp 559.532.117 dengan persentase 81,36 %.
- 2. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target tahun 2022 Rp 114.562.800 dan capaian realisasi Rp 111.151.990 dengan persentase 97,82%.
- 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target tahun 2022 Rp 355.236.550 dan capaian realisasi Rp 320.636.550 dan persentase capaian 90,26%.
- 4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target tahun 2022 Rp 507.900.200 dan capaian realisasi Rp 459.552.023 dan persentase capaian 90,48%.
- 5. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan target tahun 2022 Rp 31.653.000 dan capaian realisasi Rp 19.783.350 dan persentase capaian 62,50%.
- 6. Program Hubungan Industrial dengan target tahun 2022 Rp 827.808.950 dan capaian realisasi Rp 376.917.800 dan persentase capaian 45,53%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat berorientasi kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati bersama dan berdasarkan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan yang menggambarkan bahwa pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang sudah dapat dikategorikan BAIK dan keadaan ini selalu akan ditingkatkan setiap tahunnya.

X

TABEL 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi			4.39	4.79	5.20	5.60	4.75%	5.13%	5.52	5.60	RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
2	Tingkat Pengangguran Terbuka			4.84	4.72	4.60	4.48	4.84	4.69	4.72	4.48	Berdasarkan RTKD dan informasi ketenagakerjaan tahun 2019
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			81	82	96.87		99.28	90.62	96.87	97	IKM diambil dari data laporan survey kepada masyarakat (SKM) tahun 2022

Keterangan Tabel :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang diukur dari 3 indikator yang disusun sesuai dokumen Rencana Strategis periode sebelumnya yakni 2018-2023 yaitu

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi. Untuk target Tahun 2022 dan 2023 diambil dari Rencana Strategis 2018-2023 dan proyeksi Tahun 2024-2025 diambil dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka disusun Berdasarkan RTKD dan informasi ketenagakerjaan tahun 2019 dan proyeksi Tahun 2024-2025 diambil dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat diambil dari data laporan survey kepada masyarakat (SKM) tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2024-2025 diambil dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut :

1. Hal-hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa hal kritis yang terkait dengan pelayanan yang harus ditindaklanjuti yaitu :

- a. Kurang optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah teknis terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- b. Kurang optimalnya fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan oleh Perangkat Daerah teknis/ Instansi terkait.
- c. Masyarakat/ pelaku usaha masih enggan untuk pengurusan perizinan.
- d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha tentang pengurusan perizinan dan non perizinan.
- e. Kurang optimalnya kerjasama antar Perangkat Daerah terkait di dalam menjalankan dan menegakkan Perda.
- f. Masih rendahnya keterampilan SDM Aparatur dalam mengadopsi dan menjalankan jaringan / mengakses aplikasi Teknologi Informasi di dalam pelayanan perizinan dan non perizinan pada pelayanan publik.

- g. Belum adanya kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang representatif untuk sebuah pelayanan yang profesional.

2. Permasalahan dan Hambatan yang akan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya adalah:

A. Urusan Penanaman Modal

Dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya informasi peluang penanaman modal kepada investor
- 2) Belum optimalnya promosi penanaman modal yang massif dan tepat sasaran
- 3) Keterbatasan ruang/lahan untuk penanaman modal.

B. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan dalam urusan tenaga kerja adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah pengangguran karena kurangnya kesempatan kerja
- 2) Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja keluar negeri dan antar daerah.
- 3) Kualitas SDM pencari kerja yang masih rendah.

3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam operasionalnya ditantang untuk dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat merubah image masyarakat terhadap pelayanan yang berbelit-belit serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menghadapi tantangan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kajian terhadap peluang investasi
- 2) Melaksanakan promosi secara massif dan tepat sasaran
- 3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
- 4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Investasi Penanaman Modal
- 5) Melaksanakan Fasilitasi kemudahan investasi

- 6) Melaksanakan pendataan tenaga kerja dan kesempatan kerja
- 7) Melaksanakan Sosialisasi penempatan tenaga kerja
- 8) Peningkatan hubungan industrial, koordinasi dengan pengusaha dan pekerja .
- 9) Peningkatan kualitas SDM aparatur pelayanan
- 10) Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- 11) Melaksanakan tindak lanjut pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan
- 12) Menyusun dan melaksanakan evaluasi terhadap Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 13) Melaksanakan sosialisasi perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis disusun berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Pelaksanaan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel 2.4.1 berikut ini.



Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100% bulan	3.319.562.592	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100% bulan	3.549.115.200	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan keuangan perangkat daerah	14 bulan	2.687.959.842	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan keuangan perangkat daerah	14 bulan	2.907.825.276	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.687.959.842	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.907.825.276	
		Jumlah gaji yang dibayarkan	14 bulan				Jumlah gaji yang dibayarkan	0 bulan		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	1 tahun	293.974.750	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	1 tahun	297.774.561	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.626.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.623.911	
		Jumlah komponen instalasi listrik	19 Jenis				Jumlah komponen instalasi listrik	0 Jenis		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.683.600	
		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun	1 Tahun				Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun	0 Tahun		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	37.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	34.710.500	
		Jumlah barang cetakan dan fotocopy dan dekorasi yang disediakan	11 Jenis				Jumlah barang cetakan dan fotocopy dan dekorasi yang disediakan	0 Jenis		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	215.992.250	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	219.742.250	
		Jumlah makan dan minum yang disediakan	550 oh				Jumlah makan dan minum yang disediakan	0 oh		
		Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	1 Tahun				Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	0 Tahun		
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	13.356.500	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	7.014.300	
		Jumlah arsip dinamis yang tertata	1 Tahun				Jumlah arsip dinamis yang tertata	0 Tahun		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1	203.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1	202.993.473	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	
		Jumlah surat menyurat yang disediakan	19 Jenis				Jumlah surat menyurat yang disediakan	0 Jenis		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	49.999.590	

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	149.993.883	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipelihara	1 tahun	134.628.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipelihara	1 tahun	140.521.890	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	84.803.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	70.799.290	
		Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan	0 Unit				Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan	0 Unit		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	29.820.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	29.722.600	
		Jumlah kendaraan yang dipelihara	9 unit				Jumlah kendaraan yang dipelihara	0 unit		
		Jumlah sopir	2 orang				Jumlah sopir	0 orang		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	
		Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit				Jumlah gedung yang dipelihara	0 Unit		
		Tersedianya ruang rapat	1				Tersedianya ruang rapat	0		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		persentase pencari kerja yang dilatih	2,29 persen	422.436.600	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		persentase pencari kerja yang dilatih	2,29 persen	308.122.000	
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan	77 Orang	422.436.600	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan	77 Orang	308.122.000	
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DPMPTSP	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	17 Orang	163.812.400	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DPMPTSP	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	17 Orang	127.519.700	
		Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	32 orang				Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	0 orang		
Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	DPMPTSP	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	60 Lembaga	258.624.200	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	DPMPTSP	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	60 Lembaga	180.602.300	
		Jumlah peserta pelatihan yang dilatih oleh Lembaga Pelatihan Kerja	30 Orang				Jumlah peserta pelatihan yang dilatih oleh Lembaga Pelatihan Kerja	0 Orang		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif	42,61 %	143.304.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif	42,61 %	731.290.484	
Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi yang diberikan stimulan BPJS Ketenagakerjaan	1260 Orang	108.304.000	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi yang diberikan stimulan BPJS Ketenagakerjaan	1260 Orang	731.290.484	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta	1 Laporan	108.304.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar	1 Laporan	731.290.484	

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Pengupahan					sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			
		Jumlah tenaga kerja sektor informasi yang diberikan stimulasi BPJS Ketenagakerjaan	1000 orang				Jumlah tenaga kerja sektor informasi yang diberikan stimulasi BPJS Ketenagakerjaan	0 orang		
Sub Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	35.000.000	Sub Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang		
Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100 Perkara	35.000.000	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100 Perkara		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah investor yang terdaftar	28 Investor	72.939.100	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah investor yang terdaftar	28 Investor	7.820.000	
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen peta potensi investasi yang dibuat	1 Dokumen	72.939.100	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen peta potensi investasi yang dibuat	1 Dokumen	7.820.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	72.939.100	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.820.000	
		Jumlah monitoring data investasi Kota Padang Panjang	1 Dokumen				Jumlah monitoring data investasi Kota Padang Panjang	1 Dokumen		
		Jumlah FS yang dibuat	2 Dokumen				Jumlah FS yang dibuat	0 Dokumen		
		Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan honor	2 orang				Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan honor	2 orang		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100 %	136.550.300	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100 %	125.156.800	
		Persentase pengurusan pelayanan penanaman modal yang dikeluarkan	100 %				Persentase pengurusan pelayanan penanaman modal yang dikeluarkan	100 %		
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	30 Layanan	136.550.300	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	30 Layanan	125.156.800	
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	15.743.500	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	14.200.000	
		Jumlah sosialisasi dialog interaktif peraturan yang dilaksanakan	4 kali				Jumlah sosialisasi dialog interaktif peraturan yang dilaksanakan	0 kali		
		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	12 orang				Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	0 orang		
		Jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan	15 layanan				Jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan	0 layanan		

		Jumlah siaran	24 kali siaran			Jumlah siaran	0 kali siaran		
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang	120.806.800	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang	110.956.800
		Jumlah sosialisasi dialog interaktif peraturan yang dilaksanakan	4 kali				Jumlah sosialisasi dialog interaktif peraturan yang dilaksanakan	0 kali	
		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	30 orang				Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	0 orang	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Tingkat Kepatuhan perusahaan	0,95	-	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Tingkat Kepatuhan perusahaan	0,95	417.400.000
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan melaporkan pelaporan LKPM	182 Perusahaan	-	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan melaporkan pelaporan LKPM	182 Perusahaan	417.400.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 Pelaku Usaha	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 Pelaku Usaha	294.207.912
		Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan bimtek dan sosialisasi	182 Perusahaan				Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan bimtek dan sosialisasi	182 Perusahaan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	15 Kegiatan Usaha	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	15 Kegiatan Usaha	123.192.088
		Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam pelaksanaan modal	182 Perusahaan				Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam pelaksanaan modal	182 Perusahaan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Publik mencakup dua hal pokok yaitu Pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa PTSP Daerah menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan .

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka sudah seharusnya kita melaksanakan seluruh jenis pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, artinya seluruh perizinan yang ada di Kota Padang Panjang harus melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

Sebagaimana kita sadari bahwa terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan ciri pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara dan konsekuensi logis bahwa pemerintah dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat luas adalah pelayanan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana dalam Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi :

- a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota.

Sistem pelayanan terpadu merupakan langkah strategis dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Padang Panjang secara keseluruhan dan juga dapat mendorong peningkatan kinerja birokrasi, dengan menitik beratkan bahwa pelayanan perizinan tidak dilihat dalam konteks kemudahan prosedural administrasi saja akan tetapi juga meliputi kualitas pelayanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, Visi pembangunan Kota Padang Panjang adalah “Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermartabat”.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota Padang Panjang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Walikota Padang Panjang serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan sesuai target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

Sekaitan dengan hal tersebut diatas, dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP 2024-2026

	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya nilai investasi
2	Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatnya kesempatan kerja
3	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

lk

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk dapat meningkat dan tercapainya mutu pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas tidak akan terlepas dari ketersediaan anggaran, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta kebulatan tekad (komitmen) Pemerintah Kota Padang Panjang dan Perangkat Daerah terkait selaku Tim Teknis didalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sangat diperlukan program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah.
 - a. Penyediaan Jasa surat menyurat.
 - b. Penyediaan komponen dan jasa listrik, air dan komunikasi.
 - c. Penyediaan jasa umum kantor.
2. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung.
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Penyediaan barang cetak dan penggandaan.
 - d. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - e. Penataan arsip dinamis pada SKPD.
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

B. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja.

1. Pelaksanaan pelatihan berbasis unit kompetensi.
 - a. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.
 - b. Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sector swasta untuk penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.

C. Program Penempatan Tenaga Kerja.

1. Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Perluasan kesempatan kerja.

D. Program Hubungan Industrial.

1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kereja serta pengupahan.
2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

E. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
 - a. Penyediaan Peta Potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota.

F. Program Pelayanan Penanaman Modal.

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

TABEL 3.3.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS/CARA HITUNG	DATA TUNGGAL
Tenaga Kerja					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	%	Perbandingan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan dalam RTKD yang sumber dana dari APBD	Jumlah kegiatan ketenagakerjaan/Jumlah rencana kegiatan dalam RTKD * 100%	- APBD - RTKD
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	Perbandingan antara jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih yang sumber dananya dari APBD, APBD Provinsi dan APBN	Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi/jumlah tenaga kerja yang dilatih * 100%	- Data peserta pelatihan - APBD - APBD Provinsi - APBN
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	Kemampuan tenaga kerja dalam neghasilkan barang produksi dengan membandingkan antara nilai tambah dengan upah yang diberikan atau jam kerja	Jumlah output yang dihasilkan/Total Jam kerja atau upah * 100%	- PDRB
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Sturuktur Skala Upah, dan terdaftar data BPJS ketenagakerjaan	%	Membandingkan Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak dengan total perusahaan seluruhnya dalam jangka waktu 1 tahun	Jumlah perusahaan dengan tata kelola yang layak / jumlah perusahaan dalam 1 tahun * 100%	- BPS - Aplikasi Wajib daftar perusahaan
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar negri) melalui	%	Membandingkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dengan jumlah	Jumlah penempatan tenaga kerja/jumlah tenaga kerja terdaftar * 100%	- BPS - AK 1

	mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota		tenaga kerja yang terdaftar dalam 1 tahun terakhir		
Penanaman Modal					
1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	Perbandingan antara nilai invetasi tahun N dengan investasi tahun sebelumnya	Nilai investasi tahun N/Investasi tahun sebelumnya * 100%	- Data investasi

A
1

TABEL 3.3.2
INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	INDIKATOR TPB	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS/CARA HITUNG	DATA TUNGGAL
Tenaga Kerja					
1	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	Mengukur keseimbangan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dengan jumlah tenaga kerja, semakin tinggi cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan maka semakin baik kesimbangannya.	Jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan/jumlah tenaga kerja * 100%	- Data BPJS Naker
2	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	%	Memberikan gambaran mengenai produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian dalam 1 tahun terakhir	Nilai tambah pertanian / jumlah tenaga kerja sektor pertanian * 100%	- BPS
3	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja pertahun	%	Rata-rata laju pertumbuhan PDRB per tenagakerja dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan perhitungan PDRB harga konstan	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB Riil per orang bekerja*100%	- BPS
4	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	%	Penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap /pekerja keluarga, pekerja bebas berdasarkan jenis kelamin	Penduduk yang bekerja di sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin/jumlah penduduk yang bekerja * 100%	- BPS

5	Persentase tenaga kerja formal	%	Menghitung persentase jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal	Jumlah pekerja sektor formal/jumlah pekerja seluruhnya * 100%	- BPS
6	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	%	Menghitung persentase jumlah tenaga kerja informal sektor pertanian	Jumlah tenaga kerja informal sektor pertanian/jumlah tenaga kerja seluruhnya*100%	- BPS
7	Upah rata-rata per pekerja	Rupiah	Rata rata upah yang diterima satu orang pekerja per bulan	Jumlah upah yang diterima/jumlah pekerja yang menerima upah dalam 1 bulan	- BPS
8	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	%	Membandingkan jumlah penambahan tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Jumlah pengangguran/jumlah angkatan kerja * 100%	- BPS
9	Tingkat setengah pengangguran	%	Mereka yang bekerja dibawah dibawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan	Jumlah pekerja yang tergolong setengah pengangguran / jumlah penduduk yang bekerja * 100%	- BPS
10	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	%	Membandingkan jumlah pekerja pada industry pariwisata dengan total pekerja dalam 1 tahun	Jumlah pekerja sektor pariwisata/jumlah pekerja keseluruhan*100%	- BPS
11	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	%	Membandingkan jumlah pekerja pada industry manufaktur dengan total pekerja dalam 1 tahun	Jumlah pekerja sektor manufaktur/jumlah pekerja keseluruhan*100%	- BPS

Penanaman Modal					
1	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah	Menghitung rata-rata jumlah kantor bank dan ATM untuk 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM/100.000 penduduk dewasa	- BPS
2	Rata-Rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	ukuran	Menghitung jarak atau akses lembaga keuangan yang akan digunakan oleh masyarakat	Jumlah lembaga keuangan (Bank Umum)/Panjang jalan keseluruhan	- BPS

TABEL 3.3.3
INDIKATOR PROGRAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS/CARA HITUNG	DATA TUNGGAL
Tenaga Kerja					
1	Persentase pencari kerja yang dilatih	%	Perbandingan jumlah pencari kerja yang dilatih dengan total angkatan kerja dalam 1 (satu) tahun dari sumber dana APBD, Provinsi maupun APBN yang dinyatakan dalam persentase	Jumlah pencari kerja yang dilatih/ Jumlah angkatan kerja yang terdaftar *100%	-Jumlah pencari kerja -Jumlah angkatan kerja
2	Persentase penempatan tenaga kerja	%	Perbandingan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dengan total jumlah pencari kerja	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan/jumlah pencari kerja *100%	-Jumlah tenaga kerja -Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
3	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif	%	Peningkatan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang aktif dengan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang di daftarkan yang dinyatakan dalam persentase	Jumlah peningkatan peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif/jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang didaftarkan *100%	-Jumlah peningkatan peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif -Jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang di daftarkan
Penanaman Modal					
1	Persentase peningkatan jumlah investor yang terdaftar dalam penanaman modal	%	Perbandingan jumlah investor yang menanamkan modalnya di kota Padang Panjang dengan target investor dinyatakan dalam persentase	Jumlah investor yang terdaftar dalam penanaman modal/Target investor *100%	-Jumlah investor yang terdaftar dalam penanaman modal -Target investor

2	Nilai Investasi	Milyar	Jumlah nilai investasi pada tahun berjalan	Nilai investasi pada tahun berjalan	Nilai investasi
3	Persentase pengurusan pelayanan penanaman modal yang dikeluarkan	%	Perbandingan jumlah pengurusan penanaman modal yang terlayani dengan jumlah target yang akan dilayani dinyatakan dalam persentase	(Jumlah pengurusan penanaman modal yang terlayani/Jumlah target yang akan dilayani) *100%	-Pengurusan penanaman modal yang terlayani -Jumlah target yang akan dilayani
4	Tingkat kepatuhan perusahaan	%	Menghitung tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU	Jumlah perusahaan yang patuh/Jumlah perusahaan keseluruhan dalam Wajib Lapoer Perusahaan *100%	-Jumlah perusahaan yang patuh -Jumlah perusahaan keseluruhan

Tabel 3.3.4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		DPMP TSP		3.989.539.740	APBD			4.262.709.740
					NON URUSAN			-	2.915.230.540	APBD	-	-	3.068.400.540
2	7	1			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	persentase pemenuhan pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	DPMP TSP	100%	2.915.230.540	APBD		100%	3.068.400.540
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrassi keuangan perangkat daerah	DPMP TSP	100%	2.404.293.540	APBD	-	100%	2.415.293.540
2	7	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMP TSP	336 orang/bulan	2.404.293.540	APBD		336 orang/bulan	2.415.293.540
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	DPMP TSP	100%	11.000.000	APBD	-	0%	-
2	7	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPMP TSP	100%	11.000.000	APBD	-	-	-
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrasi umum perangkat daerah	DPMP TSP	100%	166.000.000	APBD		100%	300.000.000
2	7	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	DPMP TSP	4 Paket	3 000 000	APBD		8 Jenis	3 000 000
2	7	18	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMP TSP	4 Paket	33 000 000	APBD		3 Jenis	33 000 000
2	7	18	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	DPMP TSP	12 Paket	20 000 000	APBD		8 jenis	34 000 000
2	7	18	2.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMP TSP	24 Laporan	100 000 000	APBD		1 Tahun	220 000 000
2	7	18	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMP TSP	4 Dokumen	10 000 000	APBD		3 Jenis	10 000 000
2	18	1	20.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	DPMP TSP	0%	-	APBD		100%	20.000.000
2	18	1	20.7	06	Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	DPMP TSP	-		APBD		2 Unit	20 000 000

2	18	1	20.8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipenuhi	DPMPPTSP	100%	160.848.000	APBD		100%	177.848.000
2	18	1	20.8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPPTSP	50 Lembar, 10 Buku	6.000.000	APBD		50 Lembar, 10 Buku	3.000.000
2	18	1	20.8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik yang Disediakan	DPMPPTSP	48 rekening dan 10 Jenis	50.000.000	APBD		48 rekening dan 10 jenis	50.000.000
2	18	1	20.8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang	DPMPPTSP	1 Tenaga kebersihan 2 orang tenaga keamanan 2 orang sopir, 1 tahun	104.848.000	APBD		1 tenaga kebersihan 2 orang tenaga keamanan 2 orang sopir, 1 Tahun	124.848.000
2	18	1	20.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	DPMPPTSP	100%	173.089.000	APBD		100%	155.259.000
2	18	1	20.9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPPTSP	2 kendaraan roda empat dan 9 kendaraan roda 2	113.089.000	APBD		2 kendaraan roda empat dan 9 kendaraan roda 2	103.089.000
2	18	1	20.9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPPTSP	1 tahun	30.000.000	APBD		1 tahun	32.170.000
2	18	1	20.9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPPTSP	1 unit	30.000.000	APBD		1 unit	20.000.000
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				138.200.000				258.200.000
2	18	2			Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal	DPMPPTSP	0%	-	APBD		12%	75.000.000
2	18	2	2.02		Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	Jumlah Pra Studi Kelayakan dan Video Promosi Investasi	DPMPPTSP	-	-	APBD		1 Dokumen	75.000.000
2	18	2	2.02	02	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPPTSP	-	-	APBD		1 Dokumen	75.000.000
2	18	4			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	DPMPPTSP		108.200.000	APBD			108.200.000
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	DPMPPTSP		108.200.000	APBD			108.200.000
					Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik		120 pelaku usaha	1.000.000	APBD		140 pelaku usaha	1.000.000

					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan		75 orang	1.000.000	APBD		85 orang	1.000.000
					Pemantauan Pemenuhan komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan dan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non Perizinan penanaman modal		12 kegiatan	1.000.000	APBD		12 kegiatan	1.000.000
2	18	4	2 01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	120 pelaku usaha	14.000.000	APBD		140 pelaku usaha	14.000.000
2	18	4	2 01	07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	75 orang	67.400.000	APBD		85 orang	67.400.000
2	18	4	2 01	08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	DPMPTSP	12 kegiatan	23.800.000	APBD		12 kegiatan	23.800.000
2	18	3			Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi per tahun		35.000.000.000 Rupiah	30.000.000	APBD		37.000.000.000 Rupiah	75.000.000
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota	Jumlah temu usaha dengan investor dan pengusahaan minang di rantau		2 Dokumen	30.000.000	APBD		2 Dokumen	75.000.000
2	18	3	2 01	02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota		2 dokumen	30.000.000	APBD		2 dokumen	75.000.000
2	18	5			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kepatuhan Perusahaan	DPMPTSP		-	DAK			-
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		DPMPTSP		-	DAK			-
2	18	5	2 01	01	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	DPMPTSP			DAK			

						Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko								
2	18	5	2 01	02	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP			DAK				
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya								
						Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal								
2	18	5	2 01	03	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Inspeksi Lapangan Terhadap Kegiatan Usaha	DPMPTSP			DAK				
						Jumlah Evaluasi Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Pelaksanaan perizinan Berusaha								
						Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan								
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				936.109.200	APBD				936.109.200
2	7	5			Program Hubungan Industrial	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif	DPMPTSP		280.000.000	APBD				280.000.000
2	7	5	2.01		Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	DPMPTSP	100%	280.000.000	APBD				280.000.000
2	7	5	2 01		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	DPMPTSP	15 Perkara	15 000.000	APBD		10 perkara		15 000 000
2	7	5	2 01	05	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga kerja dan Fasilitas Ketenagakerjaan Pekerja	DPMPTSP	8000 Orang	250 000 000	APBD		8000 Orang		250 000 000
2	7	5	2.01	3	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	DPMPTSP	15 Perkara	15 000 000	APBD		15 Perusahaan		15 000 000
2	7	3			Program Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih	DPMPTSP	100%	331.109.200	APBD		100%		331.109.200

2	7	3	2.01		Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase Pemenuhan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	DPMP TSP	100%	331.109.200	APBD		100%	331.109.200
2	7	3	2.01	01	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	DPMP TSP	80 Orang	156 109.200	APBD		100 orang	156 109.200
2	7	3	2.01		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktifitas pada Tahun n	DPMP TSP	2 Lembaga	175 000.000	APBD		48 orang/3 LPK	175 000.000
2	7	4			Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	DPMP TSP	0,04%	325.000.000	APBD		0,08%	325.000.000
2	7	4	2.01		Pelayanan antar Kerja di daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	DPMP TSP	100%	225.000.000	APBD		100	225.000.000
2	7	4	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	DPMP TSP	100 orang	25 000.000	APBD		150 orang	25 000.000
2	7	4	2.01	02	Perluasan Kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	DPMP TSP	10 orang	200 000.000	APBD		20 orang	200 000.000
2	7	4	203		Pengelolaan informasi pasar kerja	Persentase pemenuhan pengelolaan informasi pasar kerja	DPMP TSP	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
2	7	4	203	03	Jobfair/bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja	DPMP TSP	1 orang	100 000.000	APBD		30 orang	100 000.000

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002

Keterangan Tabel:

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Padang Panjang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan tiga urusan yaitu non urusan, urusan pemerintah bidang penanaman modal dan urusan pemerintah bidang tenaga kerja dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Non Urusan memiliki 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu indikatif Rp 2.915.230.540. Prakiraan maju tahun 2025 sekitar Rp 3.068.400.540 dengan faktor pertimbangan antara lain kenaikan pangkat/golongan ASN, kenaikan harga dan perubahan standar biaya.
2. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal memiliki 4 program dengan 3 program yang dijalankan pada tahun 2024 yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pagu indikatif Rp 138.200.000. Prakiraan maju tahun 2025 sekitar Rp 258.200.000 dengan faktor pertimbangan penambahan 1 program kegiatan, kenaikan harga dan perubahan standar biaya.
3. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja memiliki 3 program yaitu Program Hubungan Industrial, Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja dengan pagu indikatif Rp 936.109.200. Prakiraan tahun 2025 Rp 936.109.200, hal ini dengan faktor pertimbangan bahwa penyusunan rencana kegiatan sudah menyesuaikan perubahan standar biaya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rencana program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif pada DPMPSTSP sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang Panjang 2024-2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024					Kelompok Sasaran	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Prioritas Daerah	Target		Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					3.974.539.740						4.247.709.740	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.836.339.740						3.989.509.740	
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah			100%	2.915.230.540					100%	3.068.400.540	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah			100%	2.404.293.540					100%	2.415.293.540	
					Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100%											
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336 orang/bulan	2.404.293.540	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemer- intahan daerah yang BerAKHLAK Ber- orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	336 orang/bulan	2.415.293.540	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	11.000.000							
					Persentase layanan administrasi perangkat daerah	24 paket											
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 paket	11.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	ASN di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	01	2.06		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan			100%	166.000.000					100%		

					Perangkat Daerah	layanan administrasi umum perangkat daerah			100%						100%	300.000.000	
						Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran											
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4 paket	3.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4 paket	33.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 paket	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 paket	34.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24 laporan	220.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4 dokumen	10.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100%	160.848.000					100%	177.848.000	
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi			100%						100%		
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 laporan	3.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48 laporan	50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	104.848.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 Laporan	124.848.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100%	173.089.000					100%	155.259.000	
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipelihara			100%						100%		
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	113.089.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11 Unit	103.089.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 unit	32.170.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 unit	20.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan			-	-					100%	20.000.000	
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 unit	20.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang Dilatih			0,32%	331.109.200					0,40%	331.109.200	
2	07	03	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pemenuhan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi			100%	331.109.200					100%	331.109.200	
						Jumlah pelatihan berbasis komputer yang dilaksanakan			112 orang						114 orang		
2	07	03	2.01	0001	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 orang	156.109.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	Masyarakat Penerima Layanan	100 orang	156.109.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan kerja	• Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 lembaga	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan produktif itas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat Penerima Layanan	6 lembaga	175.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan			0,04%	325.000.000					0,08%	325.000.000	
2	07	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan antar kerja di daerah kabupaten/kota			100%	225.000.000					100%	225.000.000	
						Jumlah penambahan kesempatan kerja			145 orang						235 orang		
2	07	04	2.01	0003	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		Kota Padang Panjang, Semua	100 orang	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan,	Masyarakat Penerima Layanan	150 orang	25.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

								Kecamatan, Semua Kel/Desa			Alokasi Umum	Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing				Pintu
2	07	04	2.01	0005	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 orang	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	Masyarakat Penerima Layanan	20 orang	200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	04	2.03		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah job fair yang dilaksanakan			1 job fair	100.000.000					1 job fair	100.000.000	
2	07	04	2.03	0003	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 orang	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat Penerima Layanan	30 orang	100.000.000	
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif			32%	265.000.000					32%	265.000.000	
2	07	05	2.02		Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Jumlah tenaga kerja sektor informal yang diberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan			100% 8289 orang	265.000.000					100% 8500 orang	265.000.000	
2	07	05	2.02	0001	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 perkara	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat Penerima Layanan	10 Perkara	15.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	05	2.02	0005	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8000 orang	250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Penerima Layanan	8000 orang	250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

					Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 perkara	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Penerima Layanan	10 Perkara	15.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					138.200.000						258.200.000	
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal			-	-					12%	75.000.000	
2	18	02	2.02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pra Studi Kelayakan dan video promosi investasi			-	-					1 dokumen	75.000.000	
2	18	02	2.02	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Investor	1 dokumen	75.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi pertahun			35.000.000.000 Rupiah	30.000.000					37.000.000.000 Rupiah	75.000.000	
2	18	03	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan			2 dokumen	30.000.000					2 dokumen	75.000.000	
2	18	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Investor	2 dokumen	75.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			96,87%	108.200.000					96,88%	108.200.000	
2	18	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan Izin yang dikeluarkan sesuai SOP			100%	108.200.000					100%	108.200.000	

					Sub Kegiatan 'Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 pelaku usaha	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat Penerima Layanan	140 pelaku usaha	1.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 pelaku usaha	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat Penerima Layanan	140 pelaku usaha	14.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 orang	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat Penerima Layanan	85 orang	1.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	0007	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 orang	67.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat Penerima Layanan	85 orang	67.400.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 kegiatan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	dan Kolaboratif Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat Penerima Layanan	12 kegiatan	1.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	0008	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 kegiatan	23.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat Penerima Layanan	12 kegiatan	23.800.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG



FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002

Keterangan Tabel:

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang 2024-2026 disusun berdasarkan tujuan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator pengukurannya. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang 2024-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 100%.
2. Tujuan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 96,87, 96,88, 96,89.
3. Tujuan Menurunkan tingkat pengangguran dengan sasaran Meningkatnya partisipasi angkatan kerja memiliki 2 program yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 0,32%, 0,40%, dan 0,48% serta Program Penempatan Tenaga Kerja dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 0,04%, 0,08%, dan 0,12%.
4. Tujuan Menurunkan Angka Kemiskinan dengan sasaran Mengoptimalkan Perlindungan Terhadap Tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin dengan Program Hubungan Industrial dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 32%.
5. Tujuan Meningkatkan nilai investasi dengan sasaran meningkatnya peluang investasi memiliki 2 program yakni Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target secara berturut dari tahun 2025-2026 yakni 12% dan 14% serta Program Promosi Penanaman Modal dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni Rp 35.000.000.000, Rp 37.000.000.000 dan Rp 87.000.000.000.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan harapan dapat mengakomodir semua kebutuhan berbagai pihak demi terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan serta tercapainya Visi dan Misi Walikota Padang Panjang sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang sangat tergantung kepada komitmen dan keseriusan segenap unsur dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola Sumber Daya Manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal Tahun 2024 seluruh kebutuhan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat dipenuhi.

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun, dengan harapan kiranya akan mampu meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Padang Panjang, Agustus 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG



FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002

4



Pemerintah

Kota Padang Panjang

2024



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG**

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)

Jln. Bustanil Arifin, SH Silaing Bawah

(0752) 84164

disporapar.padangpanjang@gmail.Com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat disusun. Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan.

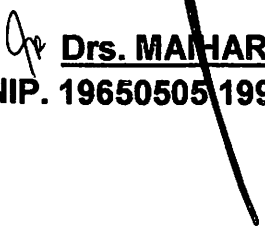
Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan suatu bentuk tanggungjawab Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan yang merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan serta rumusan indikator kinerja yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan dan terukur secara kuantitatif. Dengan demikian pelaksanaan Program kegiatan yang selama ini berorientasi pada indikator kinerja output dan realisasi keuangan sudah lebih diarahkan kepada pencapaian-pencapaian target kinerja hasil yang terukur dan mempunyai dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya besar harapan Kami penyusunan Rencana kerja ini bisa bermanfaat sebagai acuan bagi seluruh aparatur dinas dalam melaksanakan tugas-tugas pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA
DINAS PEMUDA, OLARAGA DAN PARIWISATA


Drs. MAHARMAN
NIP. 19650505199203 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah	19
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	33
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	42
BAB IV PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2023	7
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	15
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Padang Panjang ...	20
2.4. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Padang Panjang	25
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Stategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024-2026	34
3.2. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Padang Panjang	36
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagaimana yang tertuang pada Pasal 21 ayat (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD, maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai salah satu pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Rencana kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan Rencana kerja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang dari Tingkat Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kota Padang Panjang.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mengacu pada kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024, akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024, sebagai bagian dari dokumen RAPBD Kota Padang Panjang Tahun 2024. Selanjutnya setelah melalui tahapan proses, akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.962);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4966);
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
 - k. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
 - l. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 - m. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
 - n. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat (4/56/2066)
 - o. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7);
 - p. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6).
 - q. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rancangan akhir rencana kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah :

- 1) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu Tahun Anggaran yaitu Tahun 2024;
- 2) Sebagai pedoman perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dijadikan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024;
- 3) Sebagai acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta pedoman dalam pengendalian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam satu tahun berjalan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan. Dalam penyusunan Rencana kerja, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana kerja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Tujuan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana kerja tahun sebelumnya dan pencapaian Rencana strategis yaitu untuk mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan serta permasalahan atau hambatan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Rencana kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024, diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2022, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program, 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan anggaran yang tertuang dalam Perubahan tahun 2022 sejumlah Rp. 43.042.857.724,- (Empat puluh tiga milyar empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah). Dalam pelaksanaan program tersebut, tidak dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 20.120.589.329,- (Dua puluh milyar seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 46,75%

Pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yang tergambar dalam Tabel 2.1.

TABEL 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA S/D TAHUN 2023
KOTA PADANG PANJANG**

**NAMA
PERANGKAT
DAERAH :** **: DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
						DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA								
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
2	19	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		5.778.731.050	5.655.191.617	98%	5.443.303.675	5.443.303.675	
2	19	01	2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan dan disampaikan tepat waktu	595.000	595.000	595.000	100%	-	-	-
2	19	01	2.01	06		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang dibuat	1.785.000	595.000,00	595.000	100%	-	-	-

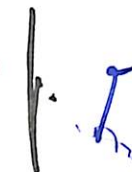
2	19	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	11.297.509.392	7.233.493.679	3.977.738.900	3.888.757.572	98%	3.644.189.475	3.644.189.475	
2	19	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	11.292.154.392	7.231.708.679,00	3.975.953.900	3.886.972.572,00	98%	3.644.189.475	3.644.189.475	0,32
2	19	01	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1.785.000	595.000,00	595.000	595.000,00	100%	-	-	-
2	19	01	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran yang disusun	1.785.000	595.000,00	595.000	595.000,00	100%	-	-	-
2	19	01	2.02	08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis yang disusun	1.785.000	595.000,00	595.000	595.000,00	100%	-	-	-
2	19	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	578.126.150	342.020.352	185.906.000	177.476.295	95%	311.458.500	311.458.500	
2	19	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	58.996.600	47.806.817,00	12.525.000	12.442.000,00	99%	14.999.500	14.999.500	0,25
2	19	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan yang disediakan	89.987.300	74.463.100,00	32.082.400	32.030.750,00	100%	34.824.200	34.824.200	0,39
2	19	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35.015.000	31.621.025,00	13.808.250	9.983.650,00	72%	11.634.800	11.634.800	0,33
2	19	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makan dan minum rapat dinas yang disediakan	394.127.250	188.129.410,00	127.490.350	123.019.895,00	96%	250.000.000	250.000.000	0,63
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti								
2	19	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	117.891.550	51.100.000	40.730.000	37.430.000	92%	-	-	
2	19	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	117.891.550	51.100.000,00	40.730.000	37.430.000,00	92%	-	-	-
2	19	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	4.049.575.600	2.224.623.414	1.399.972.200	1.384.197.675	99%	1.365.371.200	1.365.371.200	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	6.000.000	3.745.000,00	3.000.000	3.000.000,00	100%	2.000.000	2.000.000	0,33
2	19	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	273.170.000	112.010.597,00	93.540.000	85.964.502,00	92%	93.540.000	93.540.000	0,34

[Handwritten signature]

2	19	01	2.08	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	3.770.405.600	2.108.867.817,00	1.303.432.200	1.295.233.173,00	99%	1.269.831.200	1.269.831.200	0,34
2	19	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	352.623.350	287.359.200	173.788.950	166.735.075	96%	122.284.500	122.284.500	
2	19	01	2.09	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	232.248.100	115.450.500,00	88.288.450	84.525.250,00	96%	67.370.000	67.370.000	0,29
2	19	01	2.09	0 6	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	120.375.250	171.908.700,00	44.914.500	42.008.250,00	94%	44.914.500	44.914.500	0,37
2	19	01	2.09	0 9	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		93.700.000	-	40.586.000,00	40.201.575,00	99%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,11
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase peningkatan organisasi kepemudaan (OKP) yang dibina	705.659.800	944.492.000	914.903.750	757.441.476	83%	689.825.550	689.825.550	
2	19	02	2.01		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor yang dibina		551.615.050	763.847.750	646.041.726	85%	578.425.800	578.425.800	
2	19	02	2.01	0 1	Sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Jumlah bidang pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan	100.419.800	-	51.879.800	37.312.376,00	72%	-	-	
2	19	02	2.01	0 8	Sub Kegiatan : Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah bidang pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan	842.059.300	551.615.050,00	10.584.050	5.314.250,00	50%	-	-	
2	19	02	2.01	0 9	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1. Jumlah siswa hasil seleksi untuk pelatihan Paskibraka 2. Jumlah pemuda pelopor yang dibina 3. Jumlah pemuda yang diseleksi untuk mengikuti JPI	1.196.400.200		701.383.900	603.415.100,00	86%	578.425.800	578.425.800	
2	19	02	2.02		Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	705.659.800	392.876.950	151.056.000	111.399.750	74%	111.399.750	111.399.750	
2	19	02	2.02	0 2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah OKP yang dibina	705.659.800	392.876.950,00	151.056.000	111.399.750,00	74%	187.849.900	187.849.900	0,27

2	19	03			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Peringkat Kota Padang Panjang pada Porprov Sumbar	2.393.942.950,00	2.090.608.228,00	34.185.391.574,00	11.875.076.891,00	35%	61.869.861.400,00	61.869.861.400,00	
						2. Jumlah atlit Padang Panjang yang lolos pada tingkat Provinsi/ Nasional								
						1. Persentase Pembangunan Sport center								
						2. Persentase pemeliharaan Sarpras Olahraga								
2	19	03	2.01		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dan Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sport center			32.454.139.174	10.326.363.202	32%	55.401.600.000	55.401.600.000	
2	19	03	2.01	03	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan sport centre		2.972.258.142,00	32.454.139.174	10.326.363.202,00	32%	55.401.600.000	55.401.600.000	#DIV/0!
2	19	03	2.02		Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetensi olahraga yang diselenggarakan	535.798.850	247.958.225	245.770.000	165.472.742	67%	463.206.400	463.206.400	
2	19	03	2.02	02	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1. Jumlah cabang olahraga yang diselenggarakan dalam pekan olahraga Kota 2. Jumlah jenis Kejuaraan	535.798.850,00	247.958.225,00	245.770.000	165.472.742,00	67%	463.206.400	463.206.400	0,86
2	19	03	2.03		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang yang dibina	2.020.000	950.000.000	520.000.000	492.852.779	95%	5.000.000.000	5.000.000.000	
						Jumlah lahan yang disediakan								
2	19	03	2.03	03	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina	2.020.000,00	950.000.000,00	520.000.000	492.852.779,00	95%	5.000.000.000	5.000.000.000	2.475,25
2	19	03	2.05		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina	1.856.124.100	892.650.003	965.482.400	890.388.168	92%	1.005.055.000	1.005.055.000	
2	19	03	2.05	01	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah jenis event olahraga rekreasi yang dilaksanakan	566.132.100	54.939.100,00	220.482.400	146.729.200,00	67%	424.316.500	424.316.500	0,75
2	19	03	2.05	03	Sub: Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan/dikembangkan	1.289.992.000	837.710.903,00	745.000.000	743.658.968,00	100%	580.738.500	580.738.500	0,45

2	19	04			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase lembaga pramuka yang aktif		150.000.000	200.000.000	198.888.127	99%	200.000.000	200.000.000	
2	19	04	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kelembagaan pramuka yang dibina		150.000.000,00	200.000.000	198.888.127	99%	200.000.000	200.000.000	
2	19	04	2.01	0 5	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kelembagaan pramuka yang dibina	500.000.000	150.000.000,00	200.000.000	198.888.127,00	99%	200.000.000	200.000.000	0,40
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rasio Lama kunjungan wisata	4.123.822.558,00	2.762.157.647,00	1.093.082.100,00	996.967.175,00	91%	124.070.150,00	124.070.150,00	
3	26	02	2.02		Kegiatan: Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata	109.999.850,00	219.780.500,00	130.100.100,00	119.605.425,00	92%	19.446.450,00	19.446.450,00	
3	26	02	2.02	0 6	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku wisata yang dibina	109.999.850	219.780.500,00	130.100.100,00	119.605.425,00	92%	19.446.450	19.446.450	0,18
3	26	02	2.03		Kegiatan: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Jumlah jenis destinasi wisata yang dikelola (fisik) 2. Jumlah jenis destinasi wisata yang dikelola (non fisik)	4.013.822.708,00	2.542.377.147,00	962.982.000,00	877.361.750,00	91%	104.623.700,00	104.623.700,00	
3	26	02	2.03	0 4	Sub Kegiatan: Pengadaan/Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang diadakan/ dipelihara dan direhab	2.379.359.858	1.931.748.225,00	244.547.700,00	209.811.150,00	86%	104.623.700	104.623.700	0,04
3	26	02	2.03	0 6	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola destinasi pariwisata yang dibina	1.634.462.850	610.628.922,00	718.434.300,00	667.550.600,00	93%			-
3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase penambahan PAD sektor pariwisata	-	-	194.138.500	43.547.500	22%	88.990.000	88.990.000	
3	26	03	2.01		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata		-	194.138.500	43.547.500	22%	88.990.000	88.990.000	
3	26	03	2.01	0 2	Sub Kegiatan Fasilitasi kegiatan pemasaran Pariwisata Baik dalam dan luar negeri Pariwisata kabupaten/kota	Jumlah even promosi pariwisata yang dilaksanakan	195.908.500		90.908.500	3.547.500,00	4%			-
3	26	03	2.01	0 3	sub kegiatan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen profil kepariwisataan	48.230.000		18.230.000	-	0%			
3	26	03	2.01	0 4	Sub kegiatan peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah kerjasama	255.210.000	330.066.980	85.000.000	40.000.000,00	47%	88.990.000	88.990.000	
3	26	04			Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah pembinaan Hak Kekayaan Intelektual	-	-	57.258.250	48.101.608	84%	-	-	
3	26	04	2.02		Kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah produk ekraf yang memiliki HAKI		-	57.258.250	48.101.608	84%	-	-	



3	26	04	2.02	08	Sub Kegiatan perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah produk ekraf yang memiliki HAKI	115.258.450		57.258.250	48.101.608,00	84%			-
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina (17 sub sektor)	99.993.550,00	-	619.352.300,00	545.374.935,00	88%	208.998.000,00	208.998.000,00	
3	26	05	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pembinaan terhadap pelaku ekraft	99.993.550,00	-	569.352.600,00	516.288.160,00	91%	208.998.000,00	208.998.000,00	2,09
3	26	05	2.01	02	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kemitraan	273.223.700	153.075.100,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100%			-
3	26	05	2.01	04	Sub Kegiatan : Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata		99.993.550			-				-
3	26	05	2.01	05	Sub Kegiatan : Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kompetensi SDM			519.352.600,00	466.288.160,00	90%	208.998.000	208.998.000	#DIV/0!
3	26	05	2.02		Kegiatan Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif				49.999.700,00	29.086.775,00	58%			#DIV/0!
3	26	05	2.02	01	Sub kegiatan : pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	Jumlah pelatihan dan pengembangan terhadap SDM para pelaku ekonomi kreatif	99.999.700,00		49.999.700,00	29.086.775,00	58%	-	-	
							7.323.418.858,00	5.947.257.875,00	43.042.857.524,00	20.120.589.329,00	46,75%	20.120.589.329,00	20.120.589.329,00	-

Secara garis besar pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan disebabkan oleh:

1. Tender yang berulang-ulang pada pembangunan sarana dan prasarana olahraga Sport centre, sehingga pelaksanaan pekerjaan terlambat dari rencana yang ditetapkan.
2. Untuk pencairan uang muka dilaksanakan pada triwulan IV sehingga serapan dana tidak sesuai dengan perencanaan awal.
3. Kondisi alam yang tidak mendukung, karena curah hujan yang cukup tinggi menghambat pelaksanaan pekerjaan.
4. Kontraktor tidak serius dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga target pekerjaan yang telah ditetapkan tidak tercapai

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan Renstra Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang melaksanakan Urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Untuk mengukur keberhasilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Adapun Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rensta tahun 2018-2023 sebagaimana kita lihat pada tabel 2.2 berikut ini :

TABEL 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Padang Panjang

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(2)	(3)	(4)	(5)	(10)				(15)				
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				0,271				0,247				
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				9				1,894				
Peningkatan Prestasi Olahraga				9				1				
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				-100				4562,5				
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota				72				50,444				
Tingkat Hunian Akomodasi				2.518				9392,14				
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku				-8,2								
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				375.000.000				204.500.000				

[Handwritten signature]

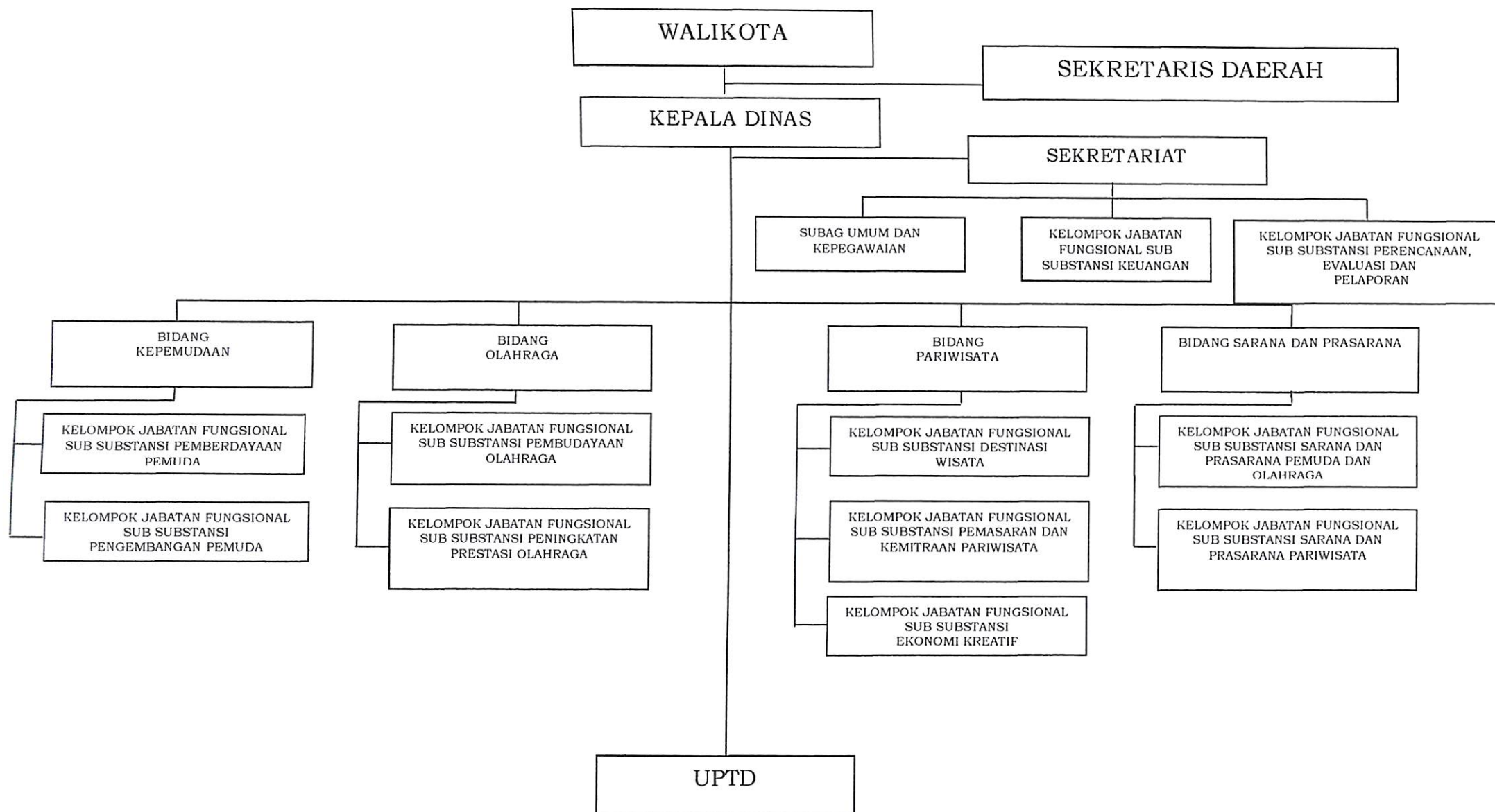
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan.

Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda.
- d. Bidang Olahraga, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembudayaan Olahraga; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga.
- e. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Destinasi Wisata;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ekonomi Kreatif.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- g. UPTD.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG



Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional,
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata,
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik,
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah,
5. Memberikan kemudahan,
6. Merupakan prioritas.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tahun 2024 – 2026 adalah:

1. Daya saing kepemudaan dan prestasi olah raga sangat berperan dalam pembangunan merupakan salah satu isu dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia. Melalui olahraga diharapkan mampu melahirkan karakter yang baik seperti jujur, disiplin, sportif, tanggungjawab dan kerjasama. Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari masih terdapat hambatan dan keterbatasan, seperti pembinaan terhadap bibit atlet berprestasi yang masih belum optimal, sistem rekrutmen calon atlet, pembinaan cabang olah raga serta peningkatan prestasi. Disamping itu kompetitiveness dan jiwa kewirausahaan dikalangan pemuda perlu dipupuk sehingga bisa melahirkan semangat kewirausahaan dikalangan milenial diberbagai jenis usaha termasuk ekonomi kreatif. Hal ini sinergi dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

2. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah sector yang menjadi ukuran dari perkembangan kepariwisataan. Dari berbagai pendekatan analisis menunjukkan bahwa sector ini pantas diunggulkan. Berdasarkan analisis Klassen, Sektor ini termasuk sector maju. Menurut analisis LQ, sector ini termasuk sector unggul, Menurut analisis KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah) atau analisis shift share, sector ini dinilai memiliki daya saing. Pertumbuhan sector ini juga cukup menjanjikan yaitu di kisaran 7,23% sampai dengan 7,48% kecuali tahun 2020 yang sempat anjlok di angka -12,04% akibat pandemi. Pariwisata sendiri juga menjadi misi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yaitu misi 5 Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan. Dengan demikian peningkatan pertumbuhan sector ini perlu ditingkatkan di Kota Padang Panjang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja pembangunan (RKPD) merupakan perencanaan pemerintah untuk periode 1 tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai

Proses awal yang dilakukan melalui musrenbang tingkat desa dan kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan dan Musrenbang tingkat kota sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan bidang fisik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dirincikan dalam tabel review anggaran terhadap rancangan awal rencana kerja perangkat daerah tahun 2023 berikut ini (Tabel T-C. 31)

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Target	Pagu		Target	Pagu
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN						
2-19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
2-19-02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	4 inidikator	150.000.000			
2-19-02-2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	3 Kegiatan	150.000.000			
2-19-02-2.01-01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 Orang	75.000.000			
2-19-02-2.01-02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	35 Orang	75.000.000			
2-19-03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAINGKEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina	44 cabang	4.420.000.000			
2-19-03-2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000			
2-19-03-2.01-03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan PrasaranaOlahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	500.000.000			
2-19-03-2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kompetisi olah raga yang diselenggarakan	3 Kegiatan	650.000.000			
2-19-03-2.02-02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan PekanOlahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000			
2-19-03-2.02-03	Partisipasi dan keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	30 orang	150.000.000			

2-19-03-2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			2.550.000.000			
2-19-03-2.03-03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang 1cabang	550.000.000			
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	orang	2.000.000.000			
2-19-03-2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina	3 Cabang	720.000.000			
2-19-03-2.05-01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	400.000.000			
2-19-03-2.05-03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1 Unit	320.000.000			
2-19-04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 organisasi	200.000.000			
2-19-04-2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kelembagaan pramuka yang dibina	1 Lembaga	200.000.000			
2-19-04-2.01-02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	200.000.000			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3-26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			3.200.000.000			
3-26-02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata		2.250.000.000			
3-26-02-2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata		460.000.000			
3-26-02-2.01-03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, pemantapan, Revitalisasi) Jumlah pengembangan daya tarik wisata	2 Lokasi	460.000.000	Taman Ramah Anak PDIKM, Baju Adat, Permainan Tradisional,		
3-26-02-2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	4 destinasi	1.690.000.000			
3-26-02-2.03-03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah desa wisata yang dibina	2 lokasi 10 pokdarwis	90.000.000	Pelatihan SDM Pariwisata		
3-26-02-2.03-04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Jumlah pembenahan sarana dan prasarana	4 Destinasi 1 paket	1.350.000.000	Membran Amphitheater PDIKM, Jaringan Proteksi Kebakaran Rumah Gadang PDIKM, Sistem		

					Air Keluar LMK, konstruksi pendukung LMK		
3-26-02-2.03-06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah pelatihan dan koordinasi Pokdarwis	1 laporan	50.000.000	Sarasehan/Koordinasi/Pelatihan Pokdarwis		
3-26-02-2.03-07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah penerapan standar pariwisata berkelanjutan	1 lokasi	200.000.000	Mushola/WC Standar Pariwisata		
3-26-02-2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000			
3-26-02-2.04-05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi		100.000.000	Fasilitasi Standarisasi Usaha Pariwisata (Halal, CHSE, dsj)		
3-26-03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase penambahan PAD pariwisata	2 %	350.000.000			
3-26-03-2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi pariwisata	90 %	350.000.000			
3-26-03-2.01-01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Media Promosi		
3-26-03-2.01-02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah event promosi yang dilaksanakan	5 Laporan 1 event	200.000.000	Penyelenggaraan Event seperti Art Fest, Serambi Mekah, Kalender Even, Pameran dan Lainnya		
3-26-03-2.01-03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah dokumen profil kepariwisataan yang dibuat	1 Dokumen	50.000.000	Optimalisasi fungsi TIC		
3-26-03-2.01-04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah kerjasama dan kemitraan Pariwisata	3 Dokumen	50.000.000	Penampilan Seni Budaya		
3-26-04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		150.000.000			
3-26-04-2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang		1 Kreatif Hub	50.000.000			

1.9

	Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota						
3-26-04-2.01-01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif	10 unit	50.000.000	Penyediaan Kreatif Hub		
3-26-04-2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk yang memiliki HAKI	40 produk	100.000.000			
3-26-04-2.02-07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah fasilitasi produk ekraf yang mendapatkan HAKI	1 dokumen 50 produk	100.000.000	Fasilitasi HAKI bagi usaha ekonomi kreatif		
3-26-05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Sudah Dibina	14 Sub Sektor	50.000.000			
3-26-05-2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sub sector ekraf yang dibina	6 sub sector	50.000.000			
3-26-05-2.01-0	Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan Jumlah pengembangan Kompetensi dilaksanakan	240 Orang	50.000.000			
3-26-05-2.01-04	Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi SDM					
X	NON URUSAN						
X-XX	NON URUSAN			5.494.134.176			
X-XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	5.494.134.176		100 %	
X-XX-01-2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %	3.682.519.276		100 %	
X-XX-01-2.02-01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.682.519.276		31 Orang/bulan	
X-XX-01-2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	313.959.200		100 %	
X-XX-01-2.06-01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000		12 Paket	
X-XX-01-2.06-04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	34.824.200		10 Paket	
X-XX-01-2.06-05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	14.135.000		10 Paket	
X-XX-01-2.06-09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000		12 Laporan	
X-XX-01-2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	1.365.371.200		100 %	

X-XX-01-2.08-01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000		1 Laporan	
X-XX-01-2.08-02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93.540.000		93.540.000	
X-XX-01-2.08-04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yangDisediakan	12 Laporan	1.269.831.200		1.269.831.200	
X-XX-01-2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90 %	132.284.500		132.284.500	
X-XX-01-2.09-01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	77.370.000		77.370.000	
X-XX-01-2.09-06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	44.914.500		44.914.500	
X-XX-01-2.09-09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	10.000.000		10.000.000	
TOTAL :				14.282.610.000			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan baik dari atas kebawah (Top-down) atau dari bawah ke atas (Bottom-up). Menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah, ada satu tahapan yaitu pelaksanaan Musrenbang. Baik Musrenbang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Musrenbang Desa/Kelurahan.

Usulan program/kegiatan hasil musrenbang dapat dijelaskan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.

Usulan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Padang Panjang

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No	Program/Kegiatan/Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kota Padang Panjang	Jumlah cabang olahraga yang dibina	40.400.000	Tornament sepak bola se Pabasko Danyon B Cup III Tahun 2024 Kota Padang Panjang (riza Aditya Nugraha, SH)
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan		
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kota Padang Panjang	Jumlah cabang olahraga yang dibina	23.172.300	Turnamen Badminton PB Sinar Gunung dan Ambassador se Pabasko (Kiki Anugerah Dia, SE)
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan		



	Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kota Padang Panjang	Jumlah cabang olahraga yang dibina	150.000.000	Hibah FORKI Kota Padang Panjang (Mahdelmi, S.Sos)
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan		
	Sub kegiatan : Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kota Padang Panjang	Jumlah cabang olahraga yang dibina	10.000.000	Pelatihan keolahragaan bagi cabang-cabang olahraga se Kota Padang Panjang (Dr. H. Novi Hendri, SE, M.Si)
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan		
	Sub kegiatan : Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kota Padang Panjang	Jumlah cabang olahraga yang dibina	40.000.000	Pembinaan Sepak Bola PGS Nagari Gunung (Zulfikri, SE)
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi		
	Sub kegiatan : Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		
6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Padang Panjang	Rasio lama kunjungan wisata	10.000.000	Sound System dan kamera sebagai penunjang kegiatan wisata edukasi
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi wisata yang dikelola		



	Sub kegiatan : Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		
7	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Padang Panjang	Rasio lama kunjungan wisata	150.000.000	Pembangunan kolam pemandian untuk anak-anak di Taman Wisata Lembah Batu Limo
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi wisata yang dikelola		
	Sub kegiatan : Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		
8	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Padang Panjang	Rasio lama kunjungan wisata	50.000.000	Pembuatan tangan-tangan tangga di objek wisata Lembah Batu Limo
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi wisata yang dikelola		
	Sub kegiatan : Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Padang Panjang	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	25.000.000	Festival Ekonomi Kreatif (Dr. H. Novi Hendri, SE, M.Si
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina		
	Sub kegiatan Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif				

Berdasarkan tabel diatas bahwa untuk Tahun 2024 ada 9 (Sembilan) usulan pokir anggota DPRD dan 1 (satu) usulan aspirasi masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Dinas Pemuda olahraga dan pariwisata Kota Padang panjang, memiliki 2 urusan yang berkaitan dengan 2 kementerian yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Disporapar Kota Padang Panjang dengan Renstra Kementerian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

A. Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Adapun visi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah :
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

sedangkan misi kementerian pemuda dan olahraga adalah :

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia,
- 2) Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing,
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan,
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
- 6) Penegakan system hokum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,
- 8) Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya,
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Adapun tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah :

- 1) Terwujudnya pemuda yang berideologi Pancasila
- 2) Terwujudnya budaya olahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

- 3) Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih

Kementrian Pemuda dan Olahraga memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis, antara lain:

4. Sasaran Strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “ Terwujudnya Pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda” dengan indikator kinerja :
- a. Indeks Pembangunan Pemuda
 - b. Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan
 - c. Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda
 - d. Tingkat pencegahan perilaku berisiko pemuda
 - e. Persentase pemuda berwirausaha
5. Sasaran Strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “ Meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional” dengan indikator kinerja :
- a. Persentase penduduk 10 tahun keatas yang berolahraga
 - b. Peringkat pada Asian Games
 - c. Peringkat pada Asian Para Games
 - d. Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games
 - e. Jumlah perolehan medali emas Paralympic Games
 - f. Peringkat pada SEA Games
 - g. Peringkat pada ASEAN Paragames
6. Sasaran Strategis (SS-3) yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Kemenpora yang berkinerja tinggi dan akuntabel” dengan indikator kinerja :
- a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementrian Pemuda dan Olahraga
 - b. Indeks system Merit
 - c. Opini BPK
 - d. Indeks Pelayanan Publik

B. Telaahan Renstra Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kemenparekraf/Baparekraf. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-

2024 adalah: "PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Visi ini selaras dan mendukung pencapaian visi presiden republik indonesia, yaitu terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi kemenparekraf/ baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu

- (i) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang maju;
- (ii) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang berdaya saing;
- (iii) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang berkelanjutan; serta
- (iv) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju bermakna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dalam rangka meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan.

Pemanfaatan teknologi tersebut tentunya harus mempertimbangkan aspek permintaan wisatawan maupun aspek kemampuan industri dalam mengadopsinya. Selain itu, pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu menyesuaikan terhadap perkembangan tren pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia, agar sektor ini tidak tertinggal dibanding dengan negara lain.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing bermakna bahwa produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia harus dapat menjadi pilihan dibanding dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain. Dalam konteks pariwisata, Indonesia harus mampu menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan dunia dibandingkan dengan destinasi di beberapa negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan Singapura. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif Indonesia harus mampu menembus pasar dunia.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan bermakna pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. Oleh karena itu, tata kelola pariwisata maupun ekonomi kreatif Indonesia harus mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG's) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal bermakna bahwa dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif, harus fokus dan memprioritaskan kepada kearifan lokal. Mengangkat indikasi geografis Indonesia sebagai suatu originalitas dan identitas diri bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik dalam bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2 yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Oleh karena itu, maka misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **memperkokoh struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.**

Kemenparekraf/Baparekraf akan turut serta berkontribusi dalam memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila, melalui penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien dengan mengedepankan potensi yang dimiliki Indonesia.

Dalam menyambut era industri 4.0, Kemenparekraf/ Baparekraf akan selalu mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri, baik secara kuantitas maupun kualitas industri dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Misi nomor 2 ini akan menjadi fokus utama pekerjaan

Kemenparekraf/Baparekraf dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama tahun 2020-2024.

Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.

Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/ Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals) Kemenparekraf/Baparekraf.

Tujuan ini menjadi tujuan akhir pembangunan nasional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah "Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional". Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai devisa pariwisata
2. Kontribusi PDB Pariwisata
3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;

Dalam rangka mencapai visi Kementrian Pariwisata dan ekonomi kreatif 2020-2024 posisi strategis pemerintah daerah dengan mempertimbangkan pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat dinamis serta nilai strategisnya sebagai sektor andalan bagi pembangunan nasional ke depan, maka pemerintah daerah sebagai tugas pembantuan bidang kepariwisataan bersinergis dalam berkontribusi memberikan perhatian yang lebih besar kepada sektor pariwisata baik dalam kebijakan anggaran maupun dukungan kerjasama sektoral daerah dengan provinsi dan kementrian untuk mendukung program-program pembangunan kepariwisataan yang ada di daerah. Agar penyusunan rencana sasaran bidang pariwisata serta arah kebijakan dan strategi sesuai dengan yang telah diamanatkan di dalam UU No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015—2019 dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing daerah dengan propinsi dan kementerian/ lembaga dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Sejalan dengan hal tsb kita harus juga mencapai SPM pariwisata (permendagri 100 tahun 2018), urusan pemerintahan bidang pariwisata yang meliputi:

1. Jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berintegrasi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.
3. Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan kabupaten/kota atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang 2024-2026. Penyusunan dokumen Rencana kerja berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) sebagai upaya untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, sehingga perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu secara menyeluruh pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang 2024-2026 yang telah ditetapkan, yang selanjutnya menjadi tujuan dari dokumen Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang 2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan

2. Meningkatkan pertumbuhan sector unggulan daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan Sasaran Rencana kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan
- 2. Meningkatnya PAD Pariwisata
- 3. Pengembangan ekonomi kreatif

Sebagaimana sasaran rencana kerja tersebut, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024, yang diuraikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Stategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan		Status Kota Layak Pemuda	menuju pratama	menuju pratama	pratama
			Rasio daya saing keolahragaan	0,2	0,25	0,3
		Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi	1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 5 prestasi provinsi
			Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/provinsi	2 prestasi nasional 15 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 50 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 20 prestasi provinsi
2	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah		LPE Sektor akomodasi makanan dan minuman	8,09	8,33	8,57
		Meningkatnya PAD Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	300.000.000	350.000.000	400.000.000
		Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	10%	12%	14%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2023



Peran serta pemuda dalam pembangunan juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan daya saing SDM. Ada 2 sektor yang akan ditingkatkan melalui pemuda yaitu peningkatan daya saing pemuda dari sektor peran pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda dalam bidang keolahragaan

Sektor pariwisata merupakan sektor ekonomi yang dapat dikembangkan dan menjadi unggulan Kota Padang Panjang. Untuk peningkatan daya saing dari sektor unggulan ini perlu dilakukan upaya lebih untuk meningkatkan PAD Pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu melaksanakan sebagian urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu dibidang Kepemudaan, Olahraga dan urusan pilihan Pariwisata.

Untuk tahun 2024 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang merencanakan **7 (tujuh) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan** dengan total Belanja sebesar Rp. 8.291.959.300

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kota Padang Panjang

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				8.291.959.300				8.231.008.700
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				6.332.242.850				7.246.008.700
2	19	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata		100 Persen	4.649.332.300			100 Persen	4.976.008.700
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	3.641.347.000			100 Persen	3.421.336.700
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406 Orang/Bulan	3.641.347.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		406 Orang/Bulan	3.421.336.700
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	13.000.000			100 Persen	15.000.000
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Paket	13.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Paket	15.000.000
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	266.600.500			100 Persen	189.000.000
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	14.998.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	15.000.000
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	31.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	28.000.000
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	11.000.000
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua	100 Laporan	210.602.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Laporan	135.000.000

							Kel/Desa						
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	60.000.000			100 Persen	20.000.000
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	12.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	-
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	48.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	20.000.000
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 Persen	476.307.800			100 Persen	1.131.672.000
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	3.000.000
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	121.999.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Laporan	122.000.000
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	351.308.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1.006.672.000
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik		100 Persen	192.077.000			100 Persen	199.000.000
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	85.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	85.000.000
2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	1.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	4.000.000
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit	25.277.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Unit	40.000.000
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	70.000.000
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemenuhan indikator kota layak pemuda		3 Indikator	180.316.600			4 Indikator	100.000.000
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda		2 kegiatan	180.316.600			2 kegiatan	100.000.000
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	94.595.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan kepemimpinan	30 Orang	50.000.000



2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	85.721.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan wirausaha	30 Orang	50.000.000
2	19	03			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina		44 Cabang	1.402.593.950			45 Cabang	2.020.000.000
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan		1 kali	128.940.000			1 Kali	500.000.000
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	128.940.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	500.000.000
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan		3 kompetisi/ even	687.437.500			5 kompetisi/ even	800.000.000
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	127.437.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	300.000.000
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	560.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	500.000.000
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi		1 cabang olahraga	124.330.950			1 cabang olahraga	120.000.000
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	109.995.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	100.000.000
2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14.335.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	20.000.000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan		2 kegiatan	461.885.500			2 kegiatan	600.000.000
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	76.275.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	400.000.000
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	385.610.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	200.000.000
2	19	04			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina		1 Organisasi	100.000.000			1 Organisasi	150.000.000
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan		1 organisasi	100.000.000			1 organisasi	150.000.000
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Organisasi	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Organisasi	150.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.959.716.450				985.000.000

3	26	02			Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rasio lama kunjungan wisata	1,15 -	1.618.165.700			1,20 -	500.000.000
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	1.618.165.700			4 destinasi	500.000.000
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Lokasi	528.593.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Lokasi	100.000.000
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Unit	1.039.571.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	300.000.000
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan	49.999.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	100.000.000
3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	600000 orang	244.990.000			660000 orang	285.000.000
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90 Persen	244.990.000			90 Persen	285.000.000
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10 Dokumen	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	30.000.000
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	55.000.000
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Kegiatan	164.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Kegiatan	200.000.000
3	26	04			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	56.648.750			90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	80.000.000
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasana kreatif yang disediakan	1 Kreatif Hub	32.730.000			1 Kreatif Hub	50.000.000
3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10 Unit	32.730.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	50.000.000
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	50 produk	23.918.750			50 produk	30.000.000
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40 Produk	23.918.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Produk	30.000.000
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 Sub sektor	39.912.000			14 Sub sektor	120.000.000

3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina		14 sub sektor	39.912.000			14 sub sektor	120.000.000
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	12.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Laporan	80.000.000
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	27.472.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	40.000.000

Rumusan Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 telah mempedomani dokumen perencanaan dan beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan di antaranya adalah:

1. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang telah mengacu pada program yang terdapat pada Peraturan Walikota No 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
2. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang telah mengacu pada program yang terdapat pada Peraturan Walikota No 12 Tahun 2023 Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Tahun 2024 ini memuat program kerja, kegiatan, sasaran, beserta indikatornya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata kota Padang Panjang. Penyusunan rencana kerja ini telah diupayakan sebaik baiknya, terukur dan akuntabel. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan. Rencana Kerja dan pendanaan OPD ini dapat dilihat pada tabel 4.1 lampiran Renja ini.



TABEL 4.1

**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Padang Panjang Tahun 2024**

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Prioritas Daerah	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA					8.291.959.300						8.231.008.700	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					6.332.242.850						7.246.008.700	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	1005		100 Persen	4.649.332.300					100 Persen	4.976.008.700	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%		100 Persen	3.641.347.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		100 Persen	3.421.336.700	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1218 Orang / Bulan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	406 Orang/Bulan	3.641.347.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		406 Orang/Bulan	3.421.336.700	

2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	406 Orang / Bulan		100 Persen	13.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		100 Persen	15.000.000	
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Paket	13.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		30 Paket	15.000.000	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%		100 Persen	266.600.500		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		100 Persen	189.000.000	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	14.998.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		4 Paket	15.000.000	
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	31.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		4 Paket	28.000.000	

2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	10.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	12 Paket	11.000.000	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Laporan	210.602.500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	100 Laporan	135.000.000	
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%		100 Persen	60.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	100 Persen	20.000.000	
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	12.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	0 Unit	-	
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	48.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	2 Unit	20.000.000	

2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%		100 Persen	476.307.800		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	100 Persen	1.131.672.000	
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	12 Laporan	3.000.000	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	121.999.800	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	36 Laporan	122.000.000	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	351.308.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	12 Laporan	1.006.672.000	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik	100%		100 Persen	192.077.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	100 Persen	199.000.000	

2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	7 Unit	85.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		7 Unit	85.000.000	
2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	5 Unit	1.800.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		20 Unit	4.000.000	
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	50 Unit	25.277.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		60 Unit	40.000.000	
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	4 Unit	80.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		4 Unit	70.000.000	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	5 Indikator		3 Indikator	180.316.600					4 Indikator	100.000.000	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda	6 Kegiatan		2 kegiatan	180.316.600		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		2 kegiatan	100.000.000	
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90 Orang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	30 Orang	94.595.250	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan	Pelatihan kepemimpinan	30 Orang	50.000.000	Pelatihan kepemimpinan

													kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing				
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90 Orang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	85.721.350	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	Pelatihan wirausaha	30 Orang	50.000.000	Pelatihan wirausaha
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina	46 Cabang		44 Cabang	1.402.593.950					45 Cabang	2.020.000.000	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	3 Kali		1 kali	128.940.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		1 Kali	500.000.000	
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	128.940.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		4 Unit	500.000.000	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	5 Kompetisi / Event		3 kompetisi/ even	687.437.500		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		5 kompetisi/ even	800.000.000	

9

2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	127.437.500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	1 Dokumen	300.000.000	
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	90 Orang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	560.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	30 Orang	500.000.000	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	3 Cabang Olahraga		1 cabang olahraga	124.330.950		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	1 cabang olahraga	120.000.000	
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	90 Orang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	109.995.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	30 Orang	100.000.000	
2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Dokumen	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14.335.950	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	1 Dokumen	20.000.000	

9

2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	6 Kegiatan		2 kegiatan	461.885.500		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	2 kegiatan	600.000.000	
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	6 Dokumen	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	76.275.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	2 Dokumen	400.000.000	
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	6 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	385.610.500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	2 Unit	200.000.000	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	3 organisasi		1 Organisasi	100.000.000				1 Organisasi	150.000.000	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	3 Organisasi		1 organisasi	100.000.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	1 organisasi	150.000.000	
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Organisasi	100.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	1 Organisasi	150.000.000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.959.716.450					985.000.000	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata	1,25		1,15 -	1.618.165.700				1,20 -	500.000.000	

3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	12 Destinasi		4 destinasi	1.618.165.700		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnmi sektor unggulan daerah		4 destinasi	500.000.000	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	6 Lokasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lokasi	528.593.950	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnmi sektor unggulan daerah		2 Lokasi	100.000.000	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.039.571.800	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnmi sektor unggulan daerah		2 Unit	300.000.000	
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	49.999.950	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnmi sektor unggulan daerah		1 Laporan	100.000.000	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	700000 Orang		600000 orang	244.990.000					660000 orang	285.000.000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90%		90 Persen	244.990.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnmi sektor unggulan daerah		90 Persen	285.000.000	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	45 Dokumen	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	30.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnmi sektor unggulan daerah		15 Dokumen	30.000.000	

3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	50.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnmi sektor unggulan daerah	3 Dokumen	55.000.000	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	22 Kegiatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kegiatan	164.990.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnmi sektor unggulan daerah	7 Kegiatan	200.000.000	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	270 Pelaku usaha ekopnmi kreatif		70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	56.648.750				90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	80.000.000	
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasana kreatif yang disediakan	3 Kreatif Hub		1 Kreatif Hub	32.730.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnmi sektor unggulan daerah	1 Kreatif Hub	50.000.000	
3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	30 unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	32.730.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnmi sektor unggulan daerah	10 Unit	50.000.000	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	150 produk		50 produk	23.918.750		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan Usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	50 produk	30.000.000	
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta	120 Produk	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Produk	23.918.750	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan Usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	40 Produk	30.000.000	

						Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif						meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah						
3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 Sub Sektor		14 Sub sektor	39.912.000				14 Sub sektor	120.000.000		
3	26	05	2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	15 Sub Sektor		14 sub sektor	39.912.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifas ekopnmi sektor unggulan daerah		14 sub sektor	120.000.000	
3	26	05	2.01	0005		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	19 Laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	5 Laporan	12.440.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifas ekopnmi sektor unggulan daerah		7 Laporan	80.000.000	
3	26	05	2.01	0006		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	90 Orang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	30 Orang	27.472.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifas ekopnmi sektor unggulan daerah		30 Orang	40.000.000	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Sebagai bentuk pemenuhan pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2024 merencanakan 7 (tujuh) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program - program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2022. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kota Padang Panjang. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA
DINAS PEMUDA, OLARAGA DAN PARIWISATA


Drs. MAIHARMAN
NIP. 19650505 199203 1 014





**PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG**

RENCANAKERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat – Nya Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat kami susun. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM serta Rencana Strategis Provinsi.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang telah menyusun Renstra Tahun 2024-2026.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang Tahun 2024. Besar Harapan kami dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalam system perencanaan dan pedoman pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM selama satu tahun kedepan

Padang Panjang, Agustus 2023

Kepala Dinas

Jevie Carter Eka Putra, ST, MT
NIP. 197608302003121002



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN	6
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	35
2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan Masyarakat.....	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....	54
3.3 Program dan Kegiatan	58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH.....	81
BAB V PENUTUP.....	102

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan yang disusun melalui tahapan-tahapan. Salah satu tahapan tersebut diawali dengan penyusunan rencana kerja oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang nantinya akan menjadi dokumen acuan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tingkat kesejahteraan dalam suatu lingkungan atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Rencana kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 Tahun. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib dan sebagian urusan pilihan yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Padang Panjang di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan. Untuk itu pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Padang Panjang No. 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, harus menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang untuk Periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah juga disinkronkan dengan usulan masyarakat hasil

Musrenbang Kecamatan. Rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan dokumen perencanaan yang akan menjadi Dasar Penyusunan Usulan Rencana Kerja Anggaran tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM.

Landasan Hukum Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2024, adalah sebagai

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- f. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- g. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
- h. Peraturan Walikota Padang Panjang No. 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- i. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6):
- j. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12):

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Dinas dalam jangka 1 (satu) tahun yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.

Adapun maksud tujuan dari Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah

perencanaan pembangunan dan pada kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD;

2. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perdagangan, KoperasiUsaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Sebagai Acuan dalam Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, KoperasiUsaha Kecil dan Menengah Padang Panjang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, KoperasiUsaha Kecil dan MenengahTahun 2024, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun lalu Capaian Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 2.4. Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Dinas
Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Rencana Kerja Tahun 2023 serta dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada table 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Padang Panjang

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase kenaikan nilai volume perdagangan	85 %	75%	80 %	80 %	100 %	85 %	80 %	85 %

	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan jumlah unit pasar yang di kelola						2 sarana dan 2 unit pasar	2 sarana dan 2 unit pasar	
	Penyediaan Sarana Distribusi perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang diadakan		4 jenis	4 jenis	4 jenis	100 %	2 sarana	2 sarana	2 sarana
	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah unit pasar yang di kelola		2 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	2 unit
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	100 %	90 %	95 %	95 %	100%	100 %	95 %	100 %
	Kegiatan Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera,terra ulang dan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah		2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	2 kali

	Pengawasan									
	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera,tera ulang	Jumlah Alat UTTP yang di tera,tera ulang dan sarana dan prasarana yang diadakan		800 UTTP	900 UTTP	900 UTTP	100 %	1000 UTTP	1000 UTTP	1000 UTTP
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan	10 %					10 %	10 %	10 %,/
	Penerbitan izin pengelolaan pasar Rakyat,pusat perbelanjaan dan izin toko usaha swalayan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan								
	Fassilitasi pemenuhan komitmen perolehan			100	100 rekomendasi	100 rekomendasi	100 %	100 rekomen dasi	100 rekomendasi	100 rekomendasi

perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik										
Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pemasangan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang diawasi perizinan usahanya									

	Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	Jumlah rekomendasi izin usaha yang dikeluarkan dan jumlah pengawasan perizinan yang dilaksanakan		2	2 kali	2 kali	100 %	2 kali	2 kali	2 kali
	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	7 %	10 %	9 %	7 %	128 %	7 %	7 %	7 %
	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok		10 %	9 %	7 %	128 %	7 %	7 %	7 %

	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaksanakan		250 kali	250 kali	250 kali	100 %	250 kali	250 kali	250 kali
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persenatse IKM yang dapat meningkatkan akses pemasaran produknya	5 %	2 %	3 %	3 %	100 %	5 %	3 %	5 %
	Kegiatan Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah Produk IKM yang di promosikan		30 ikm	30 ikm	30 ikm	100 %	30 ikm	30 ikm	30 ikm

	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dekranasda yang difasilitasi		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
	Pemasaran dan Peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Jumlah IKM yang difasilitasi desain kemasan		120	120 IKM	120 IKM	100 %	120 IKM	120 IKM	120 IKM
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi berpola syariah	75 %	70 %	72 %	72 %	100 %	75 %	72 %	75 %
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil RAT koperasi yang setuju untuk berpola syariah	30 koperasi		28 Koperasi	28 koperasi			28 koperasi	30 koperasi

	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan koperasi syariah	15 Koperasi	10 koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	100 %	15 koperasi	15 koperasi	15 koperasi
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang di lakukan pengawasan	35 %		30 %	30 %	100 %	35 %	30 %	35 %
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah								

	Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota									
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang diberi reward dan jumlah koperasi yang dibina						6 koperasi	6 koperasi	6 koperasi
	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	Persentase pengurus dan Pengawas yang mengikuti pelatihan pembiayaan syariah								

	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah pengurus dan pengawas koperasi yang melaksanakan pembiayaan syariah								
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Bimtek/Sosialisasi yang dilaksanakan		4	4 kali	4 kali	100 %	4 kali	4 kali	4 kali
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM usaha mikro dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota									
	Peningkatan Pemahaman dan							2 kali	2 kali	2 kali

	Pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha Mikro									
IV	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)									
	Kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan bantuan								

	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang di bantu permodalan								
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang diberikan coaching klinik wirausaha, jumlah pendampingan wirausaha dan jumlah umkm yang difasilitasi sertifikat dan standarisasi usaha		40	40 UKm	40 UKm	100 %	40 ukm	40 ukm	40 ukm
V	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omset usaha menjadi usaha kecil	40 %	8,3 %	35 %	35 %	100 %	40 %	35 %	40 %
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	Jumlah UMKM miskin yang dibantu	240 umkm	50 umkm	210 umkm	210 umkm	210 umkm	240 umkm	210 umkm	240 umkm

	Peningkatan Skala Usaha menjadi usaha kecil									
	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang di bantu sarana dan prasarana berupa gerobak dan isi untuk pengembanga n usaha mikro, jumlah usaha mikro yang dibantu sarana dan prasarana berupa perbaikan warung dan isi untuk pengembanga n usaha mikro, jumlah usaha mikro yang dibantu sarana dan prasarana berupa peralatan	240 umkm	50 umkm	210 UKM	210 UKM	210 umkm	240 ukm	210 ukm	240 ukm

VI	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri	33 %		30 %	25 %	100 %	33 %	25 %	33 %
	Kegiatan penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya a pembinaan IKM baik melalui workshop, pen- dampingan maupun pembinaan lainnya	242 ikm		242 ikm	242 ikm	100 %	242 ikm		242 ikm
	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri	jumlah unit pengelolaan penyamakan kualitas yang dikelola		1	1 unit	1 unit	100 %			
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan	Terlaksananya pembinaan IKM baik melalui workshop, pen-	242 ikm		242 ikm	242 ikm	100 %	242 ikm		242 ikm

	peran serta masyarakat	dampingan maupun pembinaan lainnya								
VII	Program Pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian	4.75 %	1 %	3.5 %	3.5 %	100 %	4.75 %	1 %	4.75 %
	Penerbitan izin usaha induatri (IUI),izin Perluasan Usaha (IPUI), Izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian	4.75 %	1 %	3.5 %	3.5 %	100 %	4.75 %	1 %	4.75 %
	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

	IUI,IPUI,IUKI	Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan industry								
VIII	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur internal opd yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Kegiatan Perencanaan,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54 org/bulan	54 org/bulan	54 org/bulan	54 org/bulan	54 org/bulan	54 org/bulan	54 org/bulan	54 org/bulan	54 org/bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

		Akhir Tahun SKPD								
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang di penuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan gedung kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor yang dipenuhi	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis

	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara an koordinasi dan konsultasi skpd	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah enunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya									
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang di penuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Su mber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dn listrik yang disediakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
	Penyediaan Jassa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Daerah										
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan/dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah 100 %. Dan untuk tahun 2023 dengan kondisi sampai dengan triwulan dua (TW II) masih disajikan sama dengan realisasi capaian pada tahun 2022 karena data yang dihasilkan untuk menghitung capaian kinerja tahun 2023 adalah bersifat tahunan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dengan kinerja yang dibutuhkan, dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017, dengan sasaran target sesuai dengan RENSTRA pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan / atau berdasarkan atas hasil analisis standar Kebutuhan Pelayanan.

Pencapaian kinerja pelayanan dari Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat di lihat dari tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kota Padang Panjang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Kenaikan Volume Perdagangan		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	19 %	25 %			23 %	25 %			
			Persentase alat alat ukur, takar, timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)									

			bertanda serah yang berlaku									
	Persentase peningkatan produktivitas IKM		Pertambahan jumlah industry kecil dan menengah di kabupaten/kota	6 %	7 %			20%	20 %			
			Persentase capaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP									
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry (IUI) kecil dan Industri									

			menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait									
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan izin perluasan usaha kawasan industri (IKUI) kecil dan izin perluasan Kawasan industri (IPKI) yang lokasinya yang di daerah kabupaten/kota.									
			Tersedianya Informasi industry secara lengkap									
	Meningkatnya Koperasi aktif berpola Syariah		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	72 %	75%			75 %	75 %			
	Meningkatnya Produktivitas			55 %	60 %			51,42%	55 %			

	IKM											
	Penurunan angka kemiskinan sector UMKM		Meningkatnya usaha mikri yang menjadi wirausaha	35 %	40 %			36%	40 %			
	Peningkatan indeks kualitas pelayanan infrastruktur			80 %	85 %			80 %	85 %			

Dari tabel di atas pencapaian kinerja sasaran Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah rata rata di atas target. Untuk tahun 2023 di proyeksikan capaian kinerja tersebut juga akan sama dengan target karena selisih target tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 tidak lah terlalu besar. Untuk tahun 2024 dan tahun 2025 tidak dapat disajikan target ataupun proyeksi realisasinya karena terdapat perbedaan sasaran.Sasaran tahun 2022 dan tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra tahun 2018 – 2023.Sementara untuk sasaran tahun 2024 – 2025 mengacu pada dokumen Renstra tahun 2024-2026.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, maka Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan urusan pilihan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Selanjutnya dalam dalam Peraturan Walikota Padang Panjang 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Pengolahan Kulit, UPTD Metrologi Legal dan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang Perdagangan, koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perdagangan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perindustrian;
3. Pelaksanaan administrasi dibidang Perdagangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perindustrian serta Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perdagangan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perindustrian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota dibidang Perdagangan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perindustrian;

Sejauh ini Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tetap berkomitmen menjalankan tugas dan fungsinya, meskipun banyak ditemui permasalahan diantaranya :

1. Belum optimalnya tata kelola kinerja sektor perdagangan
2. Pangsa pasar online lebih besar dari pada pangsa pasar offline
3. Kehadiran koperasi masih belum dirasakan oleh pelaku usaha
4. Belum optimalnya tata kelola koperasi
5. Belum optimalnya produktivitas UMKM

Berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang tahun 2024-2026, disebutkan beberapa isu strategis yang akan menentukan dan mempengaruhi arah kebijakan dan strategi serta sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang

Tantangan dalam peningkatan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Belum optimalnya penataan pasar modern yang nyaman , kreatif dan profesional.
2. Belum berkembangnyapemasaran secara online
3. Permodalan masih menjadi isu utama bagi UMKM
4. Koperasi belum melakukan ekspansi usaha
5. Belum optimalnya produktivitas UMKM

Peluang dalam peningkatan pelayananDinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :

1. Jumlah UMKM yang terus berkembang;
2. Kecendrungan masyarakat untuk mengunjungi pasar kuliner dan mengkonsumsi produk yang legal dan higienis;
3. Tersedianya sarana informasi untuk mempromosikan peroduksi UKM;
4. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pengelolaan pasar;
5. Padang Panjang terletak di jalur strategis yang memudahkan bagi pelaku usaha melakukan pemasaran dan melakukan ekspansi usaha;

6. Iklim Padang Panjang yang berhawa sejuk memungkinkan Pasar Padang Panjang sebagai sentra sayur mayur.
7. Lembaga koperasi yang cukup banyak dan bisa untuk memfasilitasi UMKM mengakses permodalan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan awal RKPD terdapat 12 Program pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM yang diusulkan untuk dapat menunjang pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra OPD. Pada 12 Program tersebut terdapat Belanja modal, Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya dan pemeliharaan sedang dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a. Untuk menunjang pelaksanaan operasional pada sekretariat dinas mengusulkan beberapa belanja modal untuk menunjang sarana di sekretariat seperti :
 - Pembelian Mesin Penghancur Kertas
 - Pembelian Mesin Scanner
 - Pembelian Laptop dan Printer
- b. Pemeliharaan berupa penggantian atap kantor dan pemeliharaan rutin pada gedung kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.
- c. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya bagi seluruh pegawai negeri sipil pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.

Setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk tahun anggaran 2024, maka ada beberapa efisiensi anggaran pada beberapa sub kegiatan. Efisiensi dilakukan guna menyesuaikan dengan program prioritas dalam pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. Adapun review tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegi atan/subkegi atan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Pengelola an Pasar	Persentase pasar ber SNI	90 %	4.311.596.300	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Pengelolaa n Pasar	Persentase pasar ber SNI	90 %	4.822.077.300	
	Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Bidang Pengelola an Pasar	Persentase pasar ber SNI	90 %	4.311.596.300	Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Bidang Pengelolaa n Pasar	Persentase pasar ber SNI	90 %	4.822.077.300	
	Penyediaan Sarana distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangana n	2unit	1.615.719.000	Penyediaan Sarana distribusi Perdaganganan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangana n	2unit	1.894.000.000	
	Fasilitasi pengelolaan sarana		Jumlah Fasilitasi	1 unit	2.695.877.300	Fasilitasi pengelolaan		Jumlah Fasilitasi	1 unit	2.928.077.300	

	distribusi perdagangan		Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			sarana distribusi perdagangan		Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
2.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	UPTD Metrologi	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	60%	193.214.113	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	UPTD Metrologi	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	60%	201.554.100	
	Pelaksanaan metrologi legal berupa,tera,tera ulang dan Pengawasan		Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	60%	193.214.113	Pelaksanaan metrologi legal berupa,tera,tera ulang dan Pengawasan		Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	60%	201.554.100	
	Pelaksanaan metrologi legal,berupa tera,Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya Ditera Ulang	1200 Unit	193.214.113	Pelaksanaan metrologi legal,berupa tera,Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya Ditera Ulang	1200 Unit	201.554.100	
3.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Bidang Perdagangan dan Industri	Persentase peningkatan pelaku usaha yang	10 %	50,000,000	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Bidang Perdagangan dan Industri	Persentase peningkatan pelaku usaha yang	10 %	69.171.000	

			memiliki izin usaha di bidang perdagangan					memiliki izin usaha di bidang perdagangan			
	Penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan		Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha	10 %	20,000,000	Penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan		Jumlah pelaku usaha yang diawasi perizinan usahannya	10 %	20.515.800	
	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui	100 dokumen	20,000,000	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha		jumlah rekomendasi izin usaha yang dikeluarkan dan jumlah pengawasan perizinan yang dilaksanakan	100 dokumen	20.515.800	

			Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			terintegrasi secara elektronik					
	Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kab/kota	2 Laporan	30,000,000	Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya yang dilakukan	2 laporan	48.655.200	
	Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	2 Laporan	30,000,000	Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan		Jumlah pengawasan distribusi, pengemasan	2 laporan	48.655.200	

	terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)		n Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)			bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)		dan pelabelan bahan berbahaya yang dilakukan			
4.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Bidang Perdagangan dan Industri	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	9 %	15,000,000	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Bidang Perdagangan dan Industri	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	9 %	0	
	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Bidang Perdagangan dan Industri	jumlah pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan penting	9 %	15,000,000	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di	Bidang Perdagangan dan Industri	jumlah pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan penting	9 %	0	

			lainnya			tingkat pasar kabupaten/ko ta		lainnya			
	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu kabupaten/kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	250 Laporan	15.000.000	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu kabupaten/kot a		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	250 Laporan	0	
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Bidang Perdagangan dan Industri	Persentase IKM yang Dapat Meningkatk an Akses Pemasaran Produknya melalui	15 %	250.000.000	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Bidang Perdagangan dan Industri	Persentase IKM yang Dapat Meningkatk an Akses Pemasaran Produknya melalui	15 %	352.565.580	

			digital					digital			
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Ddalam Negeri	Bidang Perdagangan dan Industri	Jumlah Pelaku usaha yang bertransaksi digital	75 pelaku usaha	250.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Bidang Perdagangan dan Industri	Jumlah Pelaku usaha yang bertransaksi digital	75 pelaku usaha	352.565.585	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanak an Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	15 UMKM	100,000,000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanak an Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	15 UMKM	232.565.585	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri	60 UMKM	125.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri	60 UMKM	120.321.200	

			Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			Kota		Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			
6.	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Bidang Koperasi dan UKM	Persentase peningkatan omset usaha	5%	332.500.000	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Bidang Koperasi dan UKM	Persentase UKM yang dibangun	5%	366.275.000	
	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Bidang Koperasi dan UKM	Persentase peningkatan omset usaha	210 ukm	332.500.000	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi	Bidang Koperasi dan UKM	Jumlah usaha mikro yang diberikan bantuan	210 ukm	366.275.000	

						dengan para pemangku kepentingan					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas disajikan Pagu Indikatif yang berdasarkan kepada kebutuhan awal Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pagu Indikatif berdasarkan hasil analisis kebutuhan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Rancangan awal untuk Pagu Indikatif Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah hanya memperhitungkan kebutuhan operasional, dan setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, maka terdapat penambahan anggaran pada beberapa program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel di atas, penambahan tersebut juga menampung aspirasi masyarakat yang di suarakan melalui Musrenbang dan Pokok Pokok Pikiran DPRD.

2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Hasil usulan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat kecamatan dan tingkat Kota adalah:

- 1. Pelatihan yang akan diikuti oleh pelaku umkm dan pelaku usaha pemula dalam bentuk pelatihan menyulam, pelatihan kerajinan tangan, pelatihan UMKM pelatihan membuat, pelatihan membuat souvenir.
- 2. Pemberian bantuan kepada UMKM miskin berupa bantaun social uang yang akan digunakan untuk perbakan warung, pembelian peralatan dan pembelian barang dagangan

Usulan ini telah di akomodir dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah yang dapat dilihat pada tabel2.5 berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024 Kota Padang Panjang

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEGAH

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi*	Indikator Kerja	Besaran/ Volume	Catatan*
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu	1661 Unit Usaha	
	Kegiatan Pengembangan		Persentase Kenaikan	1661 Unit	

	Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Pendapatan UMKM yang dibantu	Usaha	
	Subkegiatan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1661 Unit Usaha	

Usulan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan Pokok Pokok Pikiran DPRD telah ditampung oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah melalui Program Pengembangan UMKM. Bentuk kegiatannya adalah berupa pelatihan bagi pelaku usaha pemula dan pemberian bantuan sosial berupa uang untuk perbaikan warung, pembelian gerobak, pembelian peralatan usaha dan pembelian bahan dagangan bagi pelaku usaha yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pemberian bantuan ini akan diawali dengan monitoring dan verifikasi data ke masing-masing tempat usaha dan juga monitoring setelah pemberian bantuan sosial, sehingga Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat mengevaluasi dan monitoring penerima manfaat dari usrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM Propinsi Tk I Sumatera Barat yang terkait dengan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada table 3.1 berikut::

Tabel 3.1

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

No	Program/ Kegiatan	Indikator program (IP) / Kegiatan (IK)	Target	Ket
	Bidang Perdagangan			
1	Program Peningkatan perlindungan konsumen	- Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib) - Persentase ketaatan usaha dalam tertib niaga	76.24% 60.00%	
-	Kegiatan : Pengawasan barang beredar di pasaran	Jumlah barang beredar dipasaran yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan	10 produk, 54 merk	
-	Pengawasan tertib niaga	Terlaksananya pengawasan distribusi dan perizinan perdagangan bagi pelaku usaha	325 pelaku usaha	

-	Sosialisasi peningkatan keberdayaan konsumen	Jumlah masyarakat dan BPSK yang diberikan pemberdayaan	650 org	
2	Program peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri	Peningkatan nilai ekspor	3%	
-	Kegiatan Monitoring produk impor	Tersedianya data hasil monitoring produk impor di kab/kota	18 kab/kota	
-	Pembuatan kanopi kuliner	Tersedianya kanopi di jln Khatib Suleman	300 mtr	
3	Program Pengembangan perdagangan dalam negeri	- Peningkatan omzet pasar rakyat - Peningkatan omzaet perdagangan - Laju inflasi	6.50% 5%	
-	Kegiatan: Monitoring distribusi pupuk bersubsidi	- Tersedianya data hasil monitoring distribusi pupuk bersubsidi di kab/kota	6%	
-	Lomba pasar rakyat	Terpilihnnya pasar rakyat yang berkondisi baik di Sumatera Barat	24 pasar	
-	Penyusunan data pasar tradisional di Sumatera	Tersedianya data pasar rakyat di kab/kota	50 buku, 10 kab/kota	
-	Bintek penataan dan pengelolaan pasar rakyat	Jumlah pelaku usaha di pasar rakyat kab/kota yang mendapatkan	200 org	

f

		bimbingan teknis pengelolaan pasar		
-	Monitoring distribusi barang di kab/kota	Tersedianya dat dan informasi harga serta distribusi barang di kab/kota	17 komoditas	
-	Bimtek dan pengawasan teknis kepada aparat tentang SIUP dan TDP kab/kota Sumbar	Tersedianya data dan informasi SIUP dan TDP	40 buku	
-	Pembinaan dan pelatihan PKL tentang manajemen usaha dan regulasi	Terwujudnya pemahaman para PKL tentang manajemen berusaha dan ketaatan terhadap regulasi	200pkl	
	Bidang Industri			
4	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Jlh IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk industry	95 unit usaha	
		Jlh IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan	675 unit usaha	
		Jumlah sentra yang dikembangkan	8 sentra	
		Peningkatan volume produksi melalui penggunaan teknonologi tepat guna dan hilirisasi produk industri	4 %	

-	Kegiatan : Bimtek peningkatan mutu industri olahan semen dan pembinaan lanjutan	Jlh IKM serta bimbingan teknis yang bertambah keterampilan teknisnya dalam mengembangkan produk olahan semen	50 IKM	
-	Bimtek pengembangan produk kulit menjadi foshion aksesoris	Jlh sentra kulit yang mendapatkan diversifikasi produk	3 sentra, 20 IKM	
-	Penyusunan database industri kecil dan menengah Sumbar	Tersedianya data industri men kecil dan menengah di Sumbar	40 buku	
-	Bimbingan dan pengawasan teknis izin usaha industri	Jumlah aparatur yang mendapatkan bimbingan dan penerapan izin usaha industri	60 org	
-	Pelatihan disverifikasi produk kerajinan aneka dan tekstil serta pembinaan lanjutan	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan disverifikasi produk kerajinan aneka dan tekstil serta pembinaan lanjutan	200 IKM	
	Program Peningkatan kualitas produk industri	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas sertifikat standarisasi dan peningkatan kualitas kemasan produk industri	110 unit usaha	
-	Kegiatan : Pelayanan klinik konsultasi Industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan pelayanan klinik konsultasi Industri kecil dan menengah(menyiapkan 43 IKM, untuk	50 IKM	

		mendapatkan fasilitasi halal, menyiapkan 2 IKM untuk mendapatkan fasilitasi SNI dan menyiapkan 5 IKM untuk mendapatkan fasilitasi izin edar MD)		
-	Pelatihan diversifikasi produk olahan susu	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan diversifikasi produk olahan susu	20 IKM	
	Bidang Koperasi dan UMKM			
5	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	- Peningkatan koperasi berkualitas - Peningkatan koperasi aktif - Peningkatan jumlah anggota koperasi	8% 73% 7 %	
-	Kegiatan : Pengembangan dan peningkatan data dan informasi	Jumlah data dan informasi		
-	Pembinaan kelembagaan koperasi	Meningkatkan pengawasan kelembagaan koperasi	12 kab/kota	
-	Pembinaan koperasi berprestasi /koperasi award	Meningkatnya pembinaan koperasi berprestasi		
-	Peningkatan pelayanan izin usaha simpan pinjam koperasi	Meningkatkan pelayanan izin usaha simpan pinjam koperasi		

4

-	Pembenahan koperasi tidak aktif	Terlaksanya pembinaan terhadap koperasi tidak aktif		
-	Sosialisasi dan peningkatan peran koperasi dalam pengembangan kelompok usaha strategis	Terlaksananya Sosialisasi dan peningkatan peran koperasi dalam pengembangan kelompok usaha strategis	200 org	
-	Bimtek pengawasan koperasi bagi pejabat pengawas koperasi	Meningkatkan SDM pembina koperasi	20 kab/kota	
6	Program peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi	- Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi - Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi	5% 5%	
-	Peningkatan kapasitas usaha koperasi peternakan dan perikanan	Jumlah koperasi sektor peternakan dan perikanan		
-	Peningkatan permodalan koperasi	Jumlah Peningkatan modal koperasi		
-	Peningkatan peran usaha simpan pinjam koperasi pola syaria'ah	Jumlah peningkatan koperasi usaha simpan pinjam pola syaria'ah		

7	Program Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM	- Peningkatan usaha kecil menjadi usaha menengah - Peningkatan kemitraan usaha UKM - Peningkatan keunggulan kompetitif UKM terstandarisasi - Peningkatan keunggulan kompetitif UKM	2% 10 sentra 12 kemitraan/ MoU 340 standarisasi produk	
-	Kegiatan : Peningkatan kapasitas kewirausahaan	Terlaksananya Bintel peningkatan kapasitas kewirausahaan	10 kawasan	
		Terlaksananya pembinaan dan pemantauan	19 kab/kota	
-	Partisipasi promosi produk UMKM	Terlaksananya promosi produk UMKM melalui pameran dan online		
-	Sosialisasi dan koordinasi pendaftaran merk dan sertifikat halal dan PIRT	Terlaksananya sosialisasi merk dan sertifikat halal dan PIRT	1 kali , 120 org	
-	Pembekalan keterampilan bagi	Terdata dan terbinanya wirausaha pemula penerima bantuan	200 wirausaha pemula	

	wirausaha baru	wirausaha		
--	----------------	-----------	--	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Adapun tujuan dari rencana kerja tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah Menurunkan angka kemiskinan
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Menurunkan angka kemiskinan sektor UMKM

Adapun sasaran dari rencana kerja tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola kinerja sektor perdagangan
2. Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam sektorperdagangan
3. Meningkatnya tata kelola koperasi
4. Meningkatkan produktivitas UMKM
5. Meningkatnya tata kelola kinerja sektor industry
6. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha Miskin

Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tersebut disandingkan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masing masing urusan yang berada di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dapat di lihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Target 2023	Sumber Data
	Urusan Koperasi dan UKM			

t

1.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume dan asset <u>x 100%</u> Jumlah seluruh koperasi		Renstra
2.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang <u>menjadi wirausaha x 100 %</u> Jumlah usaha mikro keseluruhan		Renstra
Urusan Perdagangan				
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha yang <u>sesuai izin ketentuan x 100 %</u> Jumlah pelkau usaha di wilayah kabupaten/kota		Renstra
2.	Persentase Kinerja realisasi pupuk	<u>Realisasi x 100 %</u> <u>RDKK</u>	-	-
3.	Persentase alat alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda	<u>Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan x 100 %</u>		Renstra

	tera serah yang berlaku	Jumlah potensi UTTP yang wajib di tera dan tera ulang di wilayah kabupaten/Kota		
Urusan Perindustrian				
1.	Pertambahan industry kecil dan menengah kota	Jumlah industry kecil dan menengah tahun n – jumlah industry kecil dan menengah <u>tahun n – 1</u> x 100 % Jumlah industry kecil dan menengah tahun n-1	-	-
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	-	-	-
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry (IUI) kecil dan Industri menengah yang dikeluarkan oleh	Jumlah izin yang di pantau dan di analisis dalam laporan hasil <u>pemantauan</u> x 100 % Jumlah izin yang		Renstra

	instansi terkait	dikeluarkan		
4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan usaha industry (IUI) kecil dan Industri menengah yang dikeluarkan oleh Insatnsi terkait	Jumlah izin yang di pantau dan di analisis dalam laporan hasil <u>pemantauan</u> $\times$ <u>100 %</u> Jumlah izin yang di keluarkan		Renstra
5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Kawasan Industri (IKUI) kecil dan izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya yang di daerah kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil <u>pemantauan</u> $\times$ <u>100 %</u> Jumlah izin yang dikeluarkan		Renstra
6.	Tersedianya Informasi industry secara lengkap dan terkini	- Tersedianya informasi industry dengan batas waktu 0-6 bulan - Tersedianya informasi industry dengan batas waktu 7-12 - Informassi produksi dan kapasitas produksi		Renstra



		- Informasi bahan baku dan bahan penolong - Informasi bahan bakar/energi - Informasi tenaga kerja - Informasi investasi		
--	--	---	--	--

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM mengusulkan 10 Program ,15 kegiatan dan 27 subkegiatan untuk menunjang pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan juga untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Program,kegiatan dan subkegiatan tersebut juga mendukung program penurunan angka kemiskinan, pemberdayaan dan pembinaan umkm dan koperasi melalui kegiatan coaching klinik atau rumah wirausaha, dan pemberian bantuan bagi pelaku usahayang terdaftar dalam DTKS.

Jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program tersebut adalah sebesar Rp. 18,719,198,038,- .Rumusan Rencana Program, Kegiatandan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kota Padang Panjang

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				18,719,198,0 38				13,170,424,296
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN								

	PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				12,408,485,750				7,579,314,083
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		100 Persen	7,637,238,250			100 Persen	7,164,114,083
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	5,961,730,000			100 Persen	5,804,522,108
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima	- Kota Padang	770 Orang/bul	5,961,730,00	PENDA PATAN		770 Orang/bu	5,804,522,108

	ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	an	0	ASLI DAERAH (PAD)		lan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	24,500,000			0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Paket	24,500,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	
	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan		100 Persen	372,332,700			100 Persen	417,244,900

	Perangkat Daerah	layanan administrasi umum perangkat daerah							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	22,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	22,928,250
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	129,402,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	129,596,700
	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Paket Barang Cetak	- Kota Padang	12 Paket	20,000,000	PENDAPATAN		12 Paket	36,804,950

	dan Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan	Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa			ASLI DAERA H (PAD)			
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	24 Laporan	200,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		24 Laporan	227,915,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan		100 Persen	50,000,000			100 Persen	20,000,000
	Pengadaan	Jumlah Unit	- Kota	4 Unit	50,000,000	PENDA		1 Unit	20,000,000

	Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 Persen	656,318,300			100 Persen	599,989,825
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	6,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	6,000,000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	96,537,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Laporan	86,730,625
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	553,780,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	507,259,200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		100 Persen	572,357,250			100 Persen	322,357,250

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	42,141,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	42,141,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Unit	119,244,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27 Unit	119,244,750
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua	20 Unit	60,971,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		20 Unit	60,971,500

			Kecamat an, Semua Kel/Desa			H (PAD)			
	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	3 Unit	350,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		3 Unit	100,000,000
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah		22 %	5,789,500			27 Persen	40,000,000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi	Jumlah pengawasan koperasi		20 koperasi	5,789,500			20 koperasi	40,000,000

	Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanny a dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	20 Unit Usaha	5,789,500	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		20 Unit Usaha	40,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNGA N KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina		18 Persen	6,850,000			26,31 Persen	50,000,000

	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina		15 koperasi	6,850,000			15 koperasi	50,000,000
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit Usaha	6,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit Usaha	50,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	Persentase peningkatan omset usaha		10 Persen	366,275,000			15 Persen	250,000,000

	MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan omset usaha		10 Persen	366,275,000			15 Persen	250,000,000
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an,	20 Unit Usaha	310,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H		20 Unit Usaha	200,000,000

			Semua Kel/Desa			(PAD)			
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	40 Unit Usaha	56,275,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		40 Unit Usaha	50,000,000
	PROGRAM PENGEMBANG AN UMKM	Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu		40 Persen	4,392,333,00 0			45 Persen	75,200,000
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha	Persentase Kenaikan Pendapatan UMKM yang dibantu		40 Persen	4,392,333,00 0			45 perse ntase	75,200,000

	Kecil								
	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1661 Unit Usaha	4,392,333,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Unit Usaha	75,200,000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan		34 Persen	69,171,000			37 Persen	55,000,000
	Penerbitan Izin Pengelolaan	Jumlah pelaku usaha yang		150 pelaku	20,515,800			100 pelaku	25,000,000

	Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	memiliki izin usaha		usaha				usaha	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	150 Dokumen	20,515,800	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		100 Dokume n	25,000,000
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan	Junlah pengendalian fasilitas		2 kali	48,655,200			2 kali	30,000,000

	Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi ,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kab/kota							
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	48,655,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	30,000,000

	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGA N	Persentase pasar ber-SNI		90 Persen	4,822,077,30 0			95 Persen	4,311,596,300
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dipelihara dan di kelola		2 unit	4,822,077,30 0			2 unit	4,311,596,300
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	2 Unit	1,894,000,00 0	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		2 Unit	1,615,919,000
	Fasilitasi Pengelolaan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan	- Kota Padang	1 Unit	2,928,077,30	PENDA PATAN		1 Unit	2,695,677,300

	Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan	Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0	ASLI DAERAH (PAD)			
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah		60 Persen	201,554,100			65 Persen	193,214,113
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan tera ulang alat UTTP		6 kali	201,554,100			6 kali	193,214,113
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	1200 Unit	201,554,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1400 Unit	193,214,113

			Semua Kel/Desa						
	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital		15 Persen	352,886,785			20 Persen	325,000,000
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha yang bertransaksi digital		75 pelaku usaha	352,886,785			75 pelaku usaha	325,000,000
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua	15 UMKM	232,565,585	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		15 UMKM	200,000,000

			Kel/Desa						
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 UMKM	120,321,200	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 UMKM	125,000,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				865,023,103				706,299,800
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri		5 Persen	865,023,103			8 Persen	706,299,800

		(sertifikat halal,MD,GMP.SNI dan Merk)							
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan IKM nbaik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya		12 kali	865,023,103			12 kali	706,299,800
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	724,880,103	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	600,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	- Kota Padang Panjang,	1 Dokumen	140,143,000	PENDA PATAN ASLI		1 Dokumen	106,299,800

	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			DAERAH (PAD)			
--	--	--	---------------------------------	--	--	--------------	--	--	--

Tabel diatas menyajikan Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025. Rumusan tersebut mengakomodir semua kegiatan yang dapat menunjang tercapainya kinerja sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Perdagangan Koerasi Usaha Kecil dan Menengah yang telah di targetkan untuk tahun 2024 dan rencana perkiraan pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Berdasarkan Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025.yang disajikan pada BAB III, maka tabel 4.1 berikut ini menyajikan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang untjuk tahun 2024 dan perkiraan maju untuk tahun 2025.

Tabel 4.1

**Rencana Kerja dan PendanaanDinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kota Padang Panjang Tahun 2024**

Kode	Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target /Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024						Kelompok Sasaran	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)

					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			18,719,198,038						13,170,424,296	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			12,408,485,750						7,579,314,083	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan		100 persen	7,637,238,250					100 persen	7,164,114,083
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	5,961,730,000					100 persen	5,804,522,108

2	17	1	2.0	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	770 Orang/bulan	5,961,730,000	PENDAPATAN ASLIK DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan BerdayaSaing	Meningkatkan produk tifikas sekt or unggul an daerah	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	770 Orang/bulan	5,804,522,108	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
2	17	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	24,500,000					0%	-	
2	17	1	2.0	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Paket	24,500,000	PENDAPATAN ASLIK DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan BerdayaSaing	Meningkatkan produk tifikas sekt or unggul an daerah	ASN di Lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	0 Paket	-	

2	17	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100 Persen	372,332,700					100 Persen	417,244,900	
2	17	01	2.0	0001	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	22,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan produksi sektor unggulan daerah	Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM	4 Paket	22,928,250	Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM
2	17	1	2.0	0004	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	129,402,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM	4 Paket	129,596,700	Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM
2	17	1	2.0	0005	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	- Kota Padang Panjang, Semua	12 Paket	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Perdagangan dan Koperasi	12 Paket	36,804,950	Dinas Perdagangan dan Koperasi

					aan	yang Disediakan		Kecamata n, Semua Kel/Desa			(PAD)			dan UKM		dan UKM	
2	17	01	2.0	0009	Penyelengga aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	24 Laporan	200,000,00 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagang an Koperasi dan UKM	24 Laporan	227,915,000	Dinas Perdagan gan Koperasi dan UKM
2	17	01	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100 Persen	50,000,000					100 Persen	20,000,000	
2	17	01	2.0	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua	4 Unit	50,000,000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagang an Koperasi dan UKM	1 Unit	20,000,000	Dinas Perdagan gan Koperasi dan UKM

								Kel/Desa										
2	17	01	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100 Persen	656,318,300				Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM	100 Persen	599,989,825		
2	17	01	2.0	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM	12 Laporan	6,000,000	Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM	
2	17	01	2.0	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	96,537,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM	36 Laporan	86,730,625	Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM	

2	17	01	2.00004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	553,780,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Perdagangan dan UKM	12 Laporan	507,259,200	Dinas Perdagangan dan UKM
2	17	01	2.00009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		100 Persen	572,357,250				100 Persen	322,357,250	
2	17	01	2.00001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	42,141,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Perdagangan dan UKM	1 Unit	42,141,000	Dinas Perdagangan dan UKM

2	17	01	2.0	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Unit	119,244,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM	27 Unit	119,244,750	Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM
2	17	01	2.0	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	60,971,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM	20 Unit	60,971,500	Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM
2	17	01	2.0	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM	3 Unit	100,000,000	Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM

2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah			22%	5,789,500					27 Persen	40,000,000	
2	17	03	2.0 1		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan koperasi			20 koperasi	5,789,500					20 koperasi	40,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
2	17	03	2.0 1	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit Usaha	5,789,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Unit Usaha	40,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

					ya Daerah Kabupaten/Ko ta														
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PERLINDUNG AN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina			18 Persen	6,850,000						26,31 Persen	50,000,000		
2	17	06	2.0 1		Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaann ya dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah koperasi yang dibina			15 koperasi	6,850,000						15 Koperas i	50,000,000	Dinas Perdagan gan Koperasi dan UKM	
2	17	06	2.0 1	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pen guatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	15 Unit Usaha	6,850,000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Unit Usaha	50,000,000	Dinas Perdagan gan Koperasi dan UKM	

					dan Restrukturisasi Usaha	Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha											
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAY AAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha			10 Persen	366,275,00 0					15 Persen	250,000,000	
2	17	07	2.0 1		Pemberdayaa n Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Persentase peningkatan omset usaha			10 Persen	366,275,00 0					15 Persen	250,000,000	Dinas Perdagan gan Koperasi dan UKM

[illegible]

2	17	08	2.0	1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Kenaikan Pendapatan UMKM yang dibantu		40 Persen	4,392,333,000				45 persen	75,200,000	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
2	17	08	2.0	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1661 Unit Usaha	4,392,333,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200 Unit Usaha	75,200,000	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				5,445,689,185					4,884,810,413	

3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan			34 Persen	69,171,000					37 Persen	55,000,000	
3	30	02	2.0	1	Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha			150 pelaku usaha	20,515,800					100 pelaku usaha	25,000,000	
3	30	02	2.0	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Dokumen	20,515,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Dokumen	25,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

					Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2)	Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2)													
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar ber-SNI			90 Persen	4,822,077,300						95 Persen	4,311,596,300		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dipelihara dan di kelola			2 unit	4,822,077,300						2 unit	4,311,596,300		
3	30	03	2.00001		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1,894,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	1,615,919,000	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	

3	30	03	2.0	0002	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1 Unit	2,928,077,300	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	2,695,677,300	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah		60 Persen	201,554,100				65 Persen	193,214,113	
3	30	06	2.0	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Tera ulang alat UTTP		6 kali	201,554,100				6 kali	193,214,113	
3	30	06	2.0	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, Alat Perlengkapan Ditera Ulang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1200 Unit	201,554,100	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)			1400 Unit	193,214,113	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

3	30	07				PROGRAM PENGUNAA N DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital			15 Persen	352,886,78 5					20 Persen	325,000,000	
3	30	07	2.0 1			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk DalamNegeri	Jumlah Pelaku usaha yang bertransaksi digital			75 pelaku usaha	352,886,78 5					75 pelaku usaha	325,000,000	
3	30	07	2.0 1	0005		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Ko ta	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	15 UMKM	232,565,58 5	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)				15 UMKM	200,000,000	Dinas Perdagan gan Koperasi dan UKM

3	30	07	2.0	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran di produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 UMKM	120,321,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 UMKM	125,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				865,023,103						706,299,800	
3	31	02			PROGRAMPE RENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal, MD, GMP.S		5 Persen	865,023,103					8 Persen	706,299,800	

							NI dan Merk)											
3	31	02	2.0	1		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan IKM nbaik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya			12 kali	865,023,103					12 kali	706,299,800	
3	31	02	2.0	0003	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	724,880,103	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	600,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
3	31	02	2.0	0005	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Masyarakat Serta Peran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua	1 Dokumen	140,143,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	106,299,800	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

						Masyarakat		Kel/Desa									
--	--	--	--	--	--	------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2024 merupakan acuan bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk kurun waktu satu tahun. Rencana kerja ini merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026.

Implementasi rencana kerja ini dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Pada dasarnya setiap program dan kegiatan yang ada dalam rencana kerja ini dilengkapi dengan indikator kinerja berupa capaian program, keluaran kegiatan dan hasil kegiatan. Dengan adanya rencana kerja ini yang disusun setiap tahunnya diharapkan dapat dilihat dan dipantau tahapan pencapaian target kinerja dari Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

KOTAPADANGPANJANG

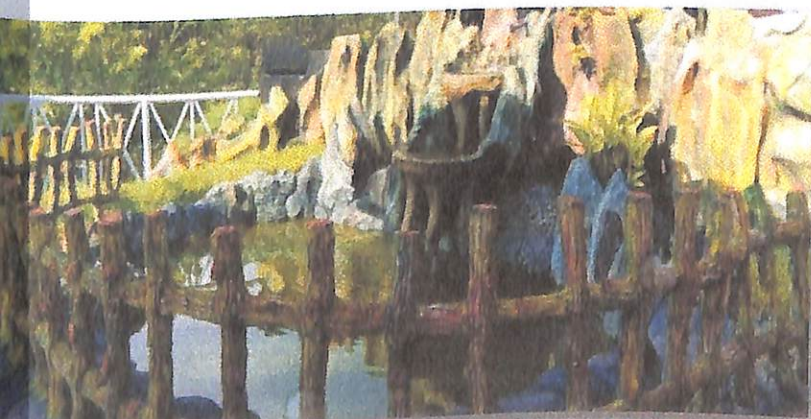

JEVIE CARTER EKA PUTRA, ST.MT

NIP. 19760830 200312 1 002





RENCANA KERJA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR (RENJA 2024)



**KECAMATAN
PADANG PANJANG TIMUR**
L. H. SUMANIK NO. 1 PADANG PANJANG TELP. 0752-62894

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan karunia-NYA sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata melalui dokumen Renja ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentu masih ada banyak kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan saran serta masukan demi pelaksanaan yang lebih baik dimasa mendatang.

Padang Panjang, 7 Agustus 2023

CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

KECAMATAN
PD. PANJANGTIMUR
Drs. ASRUL
NIP. 19651112 199702 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padang Panjang Timur	38
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	39
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	48
BAB V. PENUTUP	56

k

DAFTAR TABEL

NO	TABEL	URAIAN	HAL
1.	Tabel 2.1 (TC.29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	9 - 15
2.	Tabel 2.2 (TC.30)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang	21
3	Tabel 2.4 (TC-31)	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Padang Panjang	26 - 31
4	Tabel 2.5 (TC-32)	Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Padang Panjang	34
5.	Tabel 3.3 (TC-33)	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024 (SIPD)	42 - 47
6	Tabel 4.1	Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024	56

4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur adalah dokumen perencanaan Kecamatan Padang Panjang Timur untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur, hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun lalu, dan hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang ini adalah untuk memberikan gambaran tentang arah dan sasaran program kegiatan guna menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur dengan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur serta RKPD, dan juga untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur. Diharapkan Rencana Kerja ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan



kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kecamatan Padang Panjang Timur dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dari dokumen perencanaan 3 (tiga) tahunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang 2024-2026 ini kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tahun 2024.

Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja, yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu Indikatif berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Melalui proses penyusunan secara terintegrasi ini diharapkan akan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, dan semakin terarahnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Kerja OPD dan RKPD merupakan bagian proses awal tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan Negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat, disusunlah rancangan KUA dan rancangan PPAS. Rancangan KUA dan rancangan PPAS ini dijadikan dasar untuk penyusunan RKA Kecamatan Padang Panjang Timur.



Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sebagai salah satu OPD Urusan Penunjang Pemerintahan, pada saat ini juga menyiapkan Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Padang Panjang khususnya Kecamatan Padang Panjang Timur, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

zk

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- f. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- g. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
- h. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
- i. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 32);
- j. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 06);
- k. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12);

2f

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur adalah sebagai pedoman perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang serta sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama satu tahun dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Padang Panjang.

TUJUAN :

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan susunan sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN
PADANG PANJANG TIMUR TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN
PADANG PANJANG TIMUR**

BAB V PENUTUP

21

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2022 dan realisasi Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Padang Panjang Timur dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Padang Panjang Timur yang meliputi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pelaksanaannya. Berdasarkan program dan kegiatan serta sub kegiatan Tahun 2022 yang ada di Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan dana APBD Tahun 2022 (Perubahan Anggaran) yaitu sebesar Rp. 19.003.336.695,- sudah termasuk Gaji dan Tunjangan dengan realisasi sebesar Rp.18.304.456.255,- atau 96,32% dan pada tahun 2023 ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.18.286.577.063,- sudah termasuk Gaji dan

Tunjangan.



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur dan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur s/d Tahun 2023, disajikan dalam Tabel 2.1 (T-C.29) berikut ini.

71

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KOTA PADANG PANJANG**

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
7		UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01	KECAMATAN												
7	01	01	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	300%	300,00%		
7	01	01	2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300,00%		
7	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	77 orang PNS	76	77	100%	77 orang PNS	231	300,00%	
7	01	01	2.06	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	100%	-	-	-	100%	100,00	100,00	
7	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	- stel	-	-	-	- stel			
7	01	01	2.06	04	Kegiatan : Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	300%	300%

[Signature]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	10 jenis komponen peralatan listrik	10	10	10	100%	10 jenis komponen peralatan listrik	30	300,00%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 jenis komponen bahan logistik yang diadakan	40	40	40	100%	40 jenis komponen bahan logistik yang diadakan	120	300%
		Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kecamatan dan kelurahan	12 bulan (kec dan kel)	12	12	12	100%	12 bulan (kec dan kel)	36	300%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis (Fotocopy, jilid, cetak spanduk, cetak map, cetak amplop, cetak blanko bon pesanan)	6	6	6	100%	6 jenis (Fotocopy, jilid, cetak spanduk, cetak map, cetak amplop, cetak blanko bon pesanan)	18	300%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	20 kali	40	22	22	100%	20 kali	84	420%
		Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1.629 ok	1.973	1.770	1.695	96%	1.629 ok	5297	325%
	Kegiatan : KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	0 unit	-				0 unit	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	- unit	-				- unit	0	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	1 keg	-	8	8	100%	1 keg	8	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diadakan (mushola kantor camat)	- unit	-				- unit	0	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	1 jenis	1 jenis	1	1	100%	1 jenis	1	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	27 rekening	31	27	27	100%	27 rekening	85	315%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honorer yang dibayarkan	2 orang Pegawai Honorer dan 33 orang THL	36	35	35	100%	2 orang Pegawai Honorer dan 33 orang THL	106	303%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	0 unit	35,00	0	0		0 unit	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	46 unit kendaraan (kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 43 unit)	12	55	55	100%	46 unit kendaraan (kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 43 unit)	113	246%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	10 jenis peralatan (komputer,printer,soundsystem,AC,Camera,CCTV,Genset,kursi,meja,lemari)	114 unit (termasuk gedung kantor 7 unit)	10	10	100%	10 jenis peralatan (komputer,printer,soundsystem,AC,Camera,CCTV,Genset,kursi,meja,lemari)	30	300%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	9 unit	2 unit	7	7	100%	9 unit	18	200%
	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan		12 kali	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan (thn 2021 kel. Ganting)	0 kelurahan	1 kelurahan	-	-	-	0 kelurahan	-	-
		Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	0 org	6 orang	-	-	-	0 org	-	-
		Jumlah sarana persampahan yg dipelihara	0 unit	1 unit bentor	-	-	-	0 unit	-	-
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan	0 org	-	-	-	-	0 org	-	-
	Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	48 kali	48 kali	48	48	100%	48 kali	144	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (THL lapangan)	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan	8 kelurahan	7 kelurahan	8	8	100%	8 kelurahan	8	100,00%
		Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	48 org	42 orang	48	48	100%	48 org	144	300,00%
		Jumlah sarana persampahan yg dipelihara	8 unit	7 unit	8	8	100%	8 unit	23	287,50%
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan	9 urusan (FKKS dan Pokja Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna, LSS, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi)	5 Urusan (FKKS dan Pokja Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna)	5 Urusan (FKKS dan Pokja Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna)	5 Urusan (FKKS dan Pokja Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna)	100%	9 urusan (FKKS dan Pokja Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna, LSS, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi)	19	211,11%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Sehat	9 lembaga	9 lembaga	9	9	100%	9 lembaga	9	100%
		Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan	9 lembaga	9 lembaga	9	9	100%	9 lembaga	9	100%
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	4	4	100%	4 kegiatan	9	225%
		Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya	190 orang	190 orang	190	190	100%	190 orang	570	300%
		Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya	290 orang	281 orang	285	285	100%	290 orang	856	295%
		Jumlah Tingkatan Sekolah yang dibina dan pemenang LSS tingkat kecamatan	4, 12 tingkatan, pemenang	0	0	0	0%	4, 12 tingkatan, pemenang	4, 12	#VALUE!
		Jumlah kegiatan yang diperlombakan KKG PKK KB Kes	3 kegiatan	0	0	0	0%	3 kegiatan	3	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Pemenang KUBE FM	3 pemenang	-	0	0	0%	3 pemenang	3	100%
		Jumlah kegiatan Forum Anak yang terfasilitasi	9 lembaga	0	0	0	0%	9 lembaga	9	100%
		Jumlah kegiatan Forum Literasi yang terfasilitasi	1 lembaga	0	0	0	0%	1 lembaga	1	100%
		Jumlah Himpaudi yang difasilitasi	1 lembaga	0	0	0	0%	1 lembaga	1	100%
	PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan	24,00%	21,78%	22,17%	39,97%	180%	24,00%	85,75%	357%
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan	0 jenis	1 jenis	0	0	0	0 jenis	1	#DIV/0!
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (musren kel)	jumlah kegiatan musrenbang kelurahan yang dilaksanakan (tahun 2021 musren 8 kelurahan)	0 keg	8 kegiatan	0	0	0	0 keg	8	#DIV/0!
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis (musrenbang, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana prasarana kelurahan)	3 jenis (musrenbang, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana prasarana kelurahan)	2 jenis (musrenbang, pemberdayaan masyarakat)	2 jenis (musrenbang, pemberdayaan masyarakat)	100%	3 jenis (musrenbang, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana prasarana kelurahan)	8	267%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah musrenbang yang dilaksanakan	9 kegiatan (8 keg Musrenbang Kelurahan dan 1 keg Musrenbang Kecamatan)	1 kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	9	9	100%	9 kegiatan (8 keg Musrenbang Kelurahan dan 1 keg Musrenbang Kecamatan)	19	211%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan	1 keg	1 keg	0	0			1	100%
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	5	3	5	5	100%	5	13	260%
		Jumlah peserta yang dilatih	200 orang	160 orang	229	300 org (9 keg pelatihan)		200 orang	660	330%
		Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan	9 lembaga	9 lembaga	9	9	100%	9 lembaga	9	100%
		Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian BBGRM yang	0 pemenang	0	0	0		0 pemenang	0	#DIV/0!
		Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	3 pemenang	0	3	3	100%	3 pemenang	6	200%
		Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan	9 lembaga	2 lembaga (kecamatan, kel ganting)	9	9	100%	9 lembaga	9	100%
		Jumlah Lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yg dilaksanakan	9 lembaga	0	9	9	100%	9 lembaga	9	100%
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT yang di Fasilitasi	106 RT	103 RT	106	105	99%	107 RT	106	100%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT yang dibayarkan honor nya	106 RT	103 RT	106	105	99%	106 RT	106	100%
	PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 laporan	10 laporan	15	10	67%	10 laporan	30	300%
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	2 jenis (rapat dan monev)	2 jenis	2	2	100%	2 jenis (rapat dan monev)	2	100%
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat-rapat dan Monev FKPM yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan	130 kali	18 kali	157	145	92%	130 kali	293	225%
		Jumlah Posko Satgas Covid-19 yang di fasilitasi tahun 2021	0 posko	9 posko	0	0		0 posko	9	#DIV/0!
	PROGRAM : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	3 urusan	2 urusan	4	4	100%	3 urusan	9	300%
	Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional									
		Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan	8 mushola yg dikunjungi tim safari Ramadhan kecamatan	8 mushalla	8	8	100%	8 mushola yg dikunjungi tim safari Ramadhan kecamatan	24	300%
		Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan	0 cabang/kelompok	0	8	8	100%	0 cabang/kelompok	8	#DIV/0!
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
		Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan	4 kali	4 kali	4	4	100%	4 kali	12	300%
		Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)	2 hari besar	0	2	2	100%	2 hari besar	4	200%

47

Dari Tabel 2.1. di atas diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018-2023. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur di tahun sebelumnya maka didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur berupa :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target 15 laporan kasus pelanggaran dengan realisasi 10 laporan kasus pelanggaran trantribum atau capaian kinerja 67%. Rendahnya realisasi target kinerja pada program ini disebabkan penetapan target melebihi realisasi tahun sebelumnya, karena laporan tahun sebelumnya tahun 2021 sebanyak 10 laporan kasus pelanggaran.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi, target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%;
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Layanan, target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%;
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan, target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, indikator kinerja Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan, target kinerja 22,17%, realisasi 39,97% dengan capaian kinerja 180%. Ini disebabkan tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat tinggi.

7 k

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur

Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan, maka perlu mengukur tingkat pencapaian kinerja. Pengukuran ini diperlukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, selain itu digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan di masa yang akan datang.

Pengukuran Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang berdasarkan atas 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana yang dituangkan pada Rencana Strategis 2018-2023 dan Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama "Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan"
2. Sasaran Kedua "Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan dan Kelurahan"

Dengan Indikator Kinerja Sasaran :

1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Padang Panjang Timur

Penjelasan pengukuran indikator kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai berikut :

- Untuk mencapai Indikator Kinerja dari Sasaran I yaitu "Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur" dengan Definisi Operasional sebagai yaitu : "Perbandingan Jumlah Anggaran Partisipasi dengan Total Belanja Langsung Kecamatan dan Kelurahan".

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah anggaran partisipasi}}{\text{Total belanja langsung kecamatan dan kelurahan}} \times 100\%$$

24

Yang dimaksud dengan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan yaitu keseluruhan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan pada tahun berjalan, sedangkan untuk anggaran partisipasi dihitung dengan perkiraan dana/anggaran partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan seperti:

- Kegiatan Gotong Royong lingkungan (rutin) masyarakat
- Kegiatan Poskamling
- Kegiatan Musrenbang
- Kegiatan Perlombaan-perlombaan
- Kegiatan Keolahragaan
- Kegiatan Rapat-rapat
- Kegiatan di Desa Wisata Kubu Gadang
- Dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat

- Untuk Indikator Kinerja Sasaran 2 yaitu "Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Padang Panjang Timur" dengan Definisi Operasional berupa Hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang diisi langsung oleh masyarakat.

Dengan Rumus :

Total Nilai Interval Konversi (NIK) x 25

Tahun 2022 Target yang ditetapkan sebesar 97,80 dengan realisasi sebesar 98,09 dan persen capaian sebesar 100,30% artinya nilai survey kepuasan masyarakat yang berhasil dicapai Kecamatan Padang Panjang Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bernilai "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu (2021) yaitu sebesar 97,80 maka terjadi peningkatan nilai SKM sebesar 0,29 pada tahun 2022 ini.

Tabel Perhitungan Nilai SKM
Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang
Tahun 2022

No	Unsur Pelayanan	Per Unsur Pelayanan	Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Interval konversi IKM	IKM Per Unsur	Kinerja Per Unsur Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelayanan (Unsur ke-1)	197	3.940	0.232	98.50	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan (Unsur ke-2)	196	3.920	0.231	98.00	Sangat Baik
3	Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian pelayanan (Unsur ke-3)	197	3.940	0.232	98.50	Sangat Baik
4	Ketepatan waktu jadwal pelayanan (Unsur ke-4)	192	3.840	0.227	96.00	Sangat Baik
5	Kemahalan biaya pelayanan yang dikeluarkan dalam pelayanan (Unsur ke-5)	200	4.000	0.236	100.00	Sangat Baik
6	Kesesuaian produk/hasil layanan dengan yang ditetapkan (Unsur ke-6)	198	3.960	0.234	99.00	Sangat Baik
7	Kemampuan petugas dalam melayani (Unsur ke-7)	194	3.880	0.229	97.00	Sangat Baik
8	Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan berlangsung (Unsur ke-8)	198	3.960	0.234	99.00	Sangat Baik
9	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan (Unsur ke-9)	198	3.960	0.234	99.00	Sangat Baik
10	Komunikasi petugas layanan (Unsur ke-10)	196	3.920	0.231	98.00	Sangat Baik
11	Kemudahan mendapatkan informasi setiap jenis layanan yang ada (Unsur ke-11)	195	3.900	0.230	97.50	Sangat Baik
12	Keberadaan unit pengaduan pelayanan (Unsur ke-12)	196	3.920	0.231	98.00	Sangat Baik
13	Kelengkapan sarana pelayanan (misal: komputer, printer, lemari dokumen, dll) (Unsur ke-13)	192	3.840	0.227	96.00	Sangat Baik
14	Kelengkapan sarana pendukung pelayanan (misal: kursi ruang tunggu, kipas angin, tempat sampah, dll) (Unsur ke-14)	197	3.940	0.232	98.50	Sangat Baik
15	Kelengkapan prasarana pelayanan (Bangunan kantor: ruang tunggu, ruang layanan, dll) (Unsur ke-15)	195	3.900	0.230	97.50	Sangat Baik
16	Kelengkapan prasarana pendukung pelayanan (misal: tempat parkir, toilet, mushala, dll) (Unsur ke-16)	192	3.840	0.227	96.00	Sangat Baik
17	Kebersihan lingkungan pelayanan yang ada (Unsur ke-17)	3325	66.500	3.924	1662.50	
TOTAL			Total Nilai Konversi IKM	3.924		
			Total Nilai Konversi IKM x 25	98.09		
			Mutu Pelayanan	A		
			Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik		

(Sumber : Survey Kepuasan Masyarakat oleh Organisasi Setdako, 2022).

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Padang Panjang Timur, adalah :

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari;
2. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maupun pihak lainnya;
3. Pembinaan kelengkapan administrasi kelurahan dan kecamatan;
4. Pembinaan secara rutin ke Kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

21

5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di kelurahan;
6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan kelurahan;
7. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
9. Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan;
10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

"PATEN" merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Untuk Tahun 2022 Produk Layanan yang ada pada Kecamatan Padang Panjang Timur yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 8 (delapan) Layanan, yaitu :

1. Dispensasi Nikah
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
3. Surat Keterangan Ahli Waris
4. Surat Daftar susunan Keluarga (Pensiun PNS)
5. Surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP)
6. Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)
8. Surat Keterangan Domisili

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sebagaimana pada Tabel 2.2 (T-C.30) berikut ini :

71

TABEL 2.2 (T-C.30)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	TUJUAN											
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			100%	100%			100%	100%			Indikator Tujuan Tahun 2022-2023 mengacu pada indikator sasaran RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang Th.2018-2023
2	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik					90	93			90	93	Indikator Tujuan thn 2024-2025 mengacu pada indikator sasaran RPD Kota Padang Panjang Th. 2024-2026
	SASARAN											
1	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan			37,00%	39,00%	39,20%	39,50%	38,28%	38,28%	39,20%	39,50%	Realisasi 2023 memakai realisasi thn 2022, sedangkan proyeksi 2024-2025 memakai angka target
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			97,80	97,80	97,81	97,82	98,09	98,09	97,81	97,82	Realisasi 2023 memakai realisasi thn 2022, sedangkan proyeksi 2024-2025 memakai angka target

Ag

Berdasarkan tabel 2.2 (T-C.30) diatas Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2022 **Sangat Baik**, ini dibuktikan dengan capaian pada masing-masing indikator sasaran yaitu :

1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan ini dengan rumusan/formula yaitu "Jumlah Anggaran Partisipasi Dibagi Total Belanja Langsung Kecamatan dan Kelurahan". Indikator ini mempunyai target tahun 2022 sebesar 37% dengan realisasi sebesar 38,28% atau capaian 103,46%.
2. Indikator Capaian Kinerja Sasaran yang diukur dengan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur sehingga Kecamatan Padang Panjang Timur dapat meningkatkan kualitas layanan baik dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana layanan, prosedur pelayanan serta mengembangkan inovasi-inovasi terkait pelayanan Publik. Indikator ini mempunyai target tahun 2022 sebesar 97.80 dengan realisasi sebesar 98.09 atau persentase capaian sebesar 100.30%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur

Isu Strategis dapat diukur berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Padang Panjang Timur ada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dapat diidentifikasi permasalahannya, sebagai berikut :

- Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi, serta dukungan lembaga masyarakat dalam pembangunan, manajemen SDM pemberdayaan masyarakat masih belum tepat;

- Belum optimalnya koordinasi implementasi kebijakan pemerintah dikarenakan belum sinkron dan validnya data & informasi, serta belum lengkapnya SOP dan regulasi.

2. Layanan Publik

Dalam hal pelayanan publik dapat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- Belum optimalnya kelembagaan dan regulasi kebijakan layanan publik dikarenakan panduan rinci/SOP belum tersedia serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang masih belum optimal.
- Belum optimalnya inovasi pelayanan publik dengan akar permasalahan yang merujuk pada perencanaan dan tata kelola inovasi, monitoring dan evaluasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur menemui permasalahan:

1. Sumber Daya Manusia Belum Optimal

Secara kuantitas 74 orang pegawai PNS Kecamatan Padang Panjang Timur termasuk didalamnya 8 Kelurahan, sudah memadai bahkan cenderung lebih tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta melaksanakan kegiatan sesuai target yang diharapkan. Harapan kedepan masingmasing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan anggaran yang memadai.

2. Sarana dan Prasarana Terbatas

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Padang Panjang Timur serta Kelurahan masih terbatas sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan rutin. Hal ini disebabkan pagu anggaran yang terbatas sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan, sementara peralatan kantor yang ada rata-rata sudah berumur sehingga biaya perawatannya cukup tinggi sedangkan produktifitasnya tidak dapat dimaksimalkan.

71

Administrasi Belum Tertata dengan Baik

Arsip merupakan hal sangat penting sebagai bukti dokumen pelaksanaan setiap kegiatan atau dokumen penting lainnya. Pengelolaan arsip di Kecamatan Padang Panjang Timur belum tertib sehingga masih perlu penataan yang lebih baik khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan diperlukan. Kurangnya sarana prasarana untuk pengarsipan seperti filing cabinet/lemari/rak arsip dan ruang arsip kurang memadai, serta dibutuhkan tenaga administrasi yang cakap dalam menata dokumen-dokumen pada Kecamatan.

Adapun faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai pelayanan kepada masyarakat adalah:

1. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Timur;
2. Adanya gedung kantor yang belum memadai atau perlu direhabilitasi guna pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik;
3. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya pengurangan anggaran.

Rencana tindaklanjutnya adalah :

1. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat
2. Melakukan penganggaran sarana prasarana untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2024.
3. Menganggarkan perbaikan/rehabilitasi gedung kantor pada Kecamatan dan kelurahan terutama pada Kantor Camat Padang Panjang Timur, Kantor Lurah Tanah Pak Lambik, Kantor Lurah Koto Katik di tahun 2024.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD berisikan proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda seperti pada Tabel 2.4 (tabel T-C.31) dibawah ini.

2 f

TABEL 2.4 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Padang Panjang

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1	2	3	5	6	2	4	3	5	6	
7	URUSAN KEWILAYAHAN										
7 01	KECAMATAN				17.377.032.000					20.033.755.660	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur		95%	10.970.942.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur		95%	12.529.030.060	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95%	8.702.042.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95%	9.735.922.260	
7 01 01 2.02 000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN kecamatan		1078 orang	8.702.042.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN kecamatan		1078 orang	9.735.922.260	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	38.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	61.600.000	
7 01 01 2.05 000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan kecamatan		77 paket	38.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan kecamatan		77 paket	61.600.000	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		90%	427.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		90%	623.092.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6			
7 01 01 2.06 000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	36 Paket	29.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	36 Paket	25.700.000			
7 01 01 2.06 000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	36 Paket	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	36 Paket	150.000.000			
7 01 01 2.06 000	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	108 paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	108 paket	60.000.000			
7 01 01 2.06 000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kecamatan & kelurahan	120 laporan	178.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kecamatan & kelurahan	120 laporan	387.392.000			
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	190.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	203.045.600			
7 01 01 2.07 000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	kecamatan	16 unit (komputer pc 8, printer 8)	190.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	kecamatan	24 unit (komputer pc 12, printer 12)	203.045.600			
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		90%	1.153.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		90%	1.160.935.200			
7 01 01 2.08 000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kecamatan	12 laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kecamatan	12 laporan	2.500.000			
7 01 01 2.08 000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (sudah termasuk Retribusi Sampah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	348 laporan	130.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (sudah termasuk Retribusi Sampah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	348 laporan	135.400.000			

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6		
7 01 01 2.08 000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	108 laporan	1.017.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	108 laporan	1.023.035.200	PH 2 org & THL 33 org kec dan kel	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		80%	460.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		80%	744.435.000		
7 01 01 2.09 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kecamatan & kelurahan	46 unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kecamatan & kelurahan	46 unit	239.435.000		
7 01 01 2.09 000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	kecamatan & kelurahan	100 unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	kecamatan & kelurahan	100 unit	155.000.000		
7 01 01 2.09 000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kecamatan & kelurahan	9 unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kecamatan & kelurahan	9 unit	350.000.000		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	3.266.050.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	3.945.685.600		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan		4 kali	-	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan		4 kali	30.000.000		
7 01 02 2.01 000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 dokumen	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kecamatan	1 dokumen	30.000.000	kegiatan peningkatan SDM pelayanan	

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan		12 kali	1.623.600.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan		12 kali	1.671.185.600				
7 01 02 2.03 000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kelurahan	576 dokumen	1.623.600.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kelurahan	576 dokumen	1.671.185.600				Pelayanan Persampahan/Kebersihan Lingkungan (Tenaga kebersihan 48 org, 8 unit bentor)
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan		10 urusan	1.642.450.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan		10 urusan	2.244.500.000				
7 01 02 2.04 000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kecamatan & kelurahan	10 laporan	1.642.450.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kecamatan & kelurahan	10 laporan	2.244.500.000				FKKS/Pokja Kel.Sehat, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Dasawisma, LSS, lomba gerakan PKK, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi/Bunda Paud
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		39,98%	3.110.040.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		39,98%	3.430.040.000				
7 01 03 2.02	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		3 jenis	810.200.000	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		3 jenis	1.130.200.000				

7

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6			
7 01 03 2.02 000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	kecamatan & kelurahan	9 lembaga	200.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	kecamatan & kelurahan	9 lembaga	200.000.000	Lembaga yang ikut berpartisipasi dalam forum musrenbang :RT, PKK, POSYANDU, LPM, Karang Taruna, FKKS / POKJA KEL SEHAT, POSYANTEK, HIMPAUDI, FORUM ANAK		
7 01 03 2.02 000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yangTerbangun (Unit)		12 unit	80.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yangTerbangun (Unit)	kecamatan & kelurahan	8 kegiatan	400.000.000	8 kelurahan		
7 01 03 2.02 000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kecamatan & kelurahan	6 pokmas/ormas	530.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kecamatan & kelurahan	6 pokmas/ormas	530.200.000	LPM, PKK, Karang Taruna, FKKS/Pokja Kel Sehat, Posyantek, Forikan		
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT		107 RT	2.299.840.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT		107 RT	2.299.840.000			
7 01 03 2.03 000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		1 lembaga	2.299.840.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	kelurahan	1 lembaga	2.299.840.000	8 kelurahan		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Timur	kecamatan & kelurahan	10 LAPORAN	10.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Timur	kecamatan & kelurahan	10 LAPORAN	29.000.000			
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib		2 Jenis	10.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib		2 Jenis	29.000.000	MONEV, RAPAT		

Dari Tabel 2.4 di atas Rancangan awal RKPD tahun 2024 Kecamatan Padang Panjang Timur direncanakan terdiri atas 5 program, 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.377.032.000 dan hasil analisa kebutuhan pada Kecamatan Padang Panjang Timur terdapat perbedaan jumlah rencana anggaran dengan rancangan awal RKPD menjadi Rp. 20.033.755.660,- dengan 5 program, 13 kegiatan dan 23 sub kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat untuk kegiatan pembangunan dibidang sarana dan prasarana, bidang usaha ekonomi produktif, bidang sosial budaya dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional terhadap proses penyelenggaraan perencanaan di daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Padang Panjang tahun 2024. Maka langkah awal dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan dan Kecamatan.

Adapun maksud dan tujuan musrenbang adalah untuk menampung aspirasi masyarakat dibidang pembangunan, ekonomi dan sosial budaya untuk tahun berikutnya. Sedangkan tujuan musrenbang kecamatan adalah :

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil musyawarah dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas pembangunan
2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan
3. Melakukan klarifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan kelompok bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan musrenbang pada tahun 2023 yang pelaksanaan kegiatannya di tahun 2024 telah dapat mengeluarkan :

1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Panjang Timur yang akan dibiayai melalui anggaran Kecamatan Padang Panjang Timur yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang Tahun 2024.
2. Hasil kegiatan usulan masyarakat melalui Musyawaran Perencanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024, yaitu :

- a. Usulan bidang fisik kegiatan sarana dan prasarana sebanyak 3 (tiga) kegiatan yang pelaksanaannya berada pada Kecamatan dan kelurahan Tanah Pak Lambik.
- b. Usulan bidang ekonomi produktif sebanyak 2 kegiatan terdapat pada kelurahan Guguk Malintang dan Kelurahan Ganting
- c. Serta usulan bidang sosial budaya sebanyak 3 kegiatan yang pelaksanaan kegiatan berada di Kecamatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 (T-C.32) berikut ini.

g f

TABEL 2.5 (T-C.32)
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KOTA PADANG PANJANG

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		
	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN		Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		
	Sub Keg : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
	Belanja Hibah pengadaan tenda	Kecamatan (LPM se Kecamatan Padang Panjang Timur)		8 UNIT	Usulan Musrenbang
	Belanja Hibah pengadaan pakaian adat minang, jawa, batak kel tanah pak lambik	Kelurahan Tanah Pak Lambik (Kampung KB)		3 PAKET	Usulan Musrenbang
	BM pembuatan vertikal garden sepanjang 61 Meter di RT III dan RT IV	Kelurahan Tanah Pak Lambik		1 UNIT	Usulan Musrenbang
	Sub Keg : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	Pelatihan Vlog dan Public Speaking	Kecamatan		1 keg	Usulan Musrenbang
	Pelatihan Kader Dasawisma	Kecamatan		1 keg	Usulan Musrenbang
	Pelatihan Membatik	Kelurahan Ganting		1 keg	Usulan Musrenbang
	Pelatihan Merajut	Kelurahan Guguk Malintang		1 keg	Usulan Musrenbang

71

Berdasarkan tabel 2.5 (T-C.32) di atas usulan program, kegiatan dan sub kegiatan para pemangku kepentingan tahun 2024 terdiri dari 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, dengan rincian kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan/bimtek vlog/public speaking, pelatihan kader dasawisma berlokasi di Kecamatan Padang Panjang Timur serta pelatihan keterampilan membuat pada kelurahan Ganting dan merajut di kelurahan Guguk Malintang.

74

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah, RPJPD, RPJMD dan RENCANA STRATEGIS, sedangkan Rencana Kerja Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Padang Panjang Timur (*Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1*) dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Kedudukan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, merupakan wilayah kerja Camat sebagai Kecamatan Padang Panjang Timur yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang selaku Kecamatan Padang Panjang Timur dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas I yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

7f

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (Kabupaten/Kota di 34 Provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;
3. Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal's (MDG's);
4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sehingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
5. Penetapan dan penerapan system indikator kinerja utama pelayanan publik yang prima, selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan beorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi. Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima.

Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan. Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis. Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kedepan, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur

3.2.1. Tujuan

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dari Kecamatan Padang Panjang Timur sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu ***“Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.”***

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan OPD Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan.
- 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan Indikator Sasaran :

- 1) Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan Pada Kecamatan Padang Panjang Timur
- 2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Padang Panjang Timur

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang diarahkan untuk mendukung tercapainya Tujuan dari Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk tahun 2024 terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Program		Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Keuangan Kecamatan Padang Panjang Timur	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2. Administrasi Umum Kecamatan Padang Panjang Timur	2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
		3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		6. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			1 Koordinasi/Sinergi dengan Kecamatan Padang Panjang Timur dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam

Handwritten signature

			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		7. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		9. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
			2 Pelaksanaan Tugas, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 , seperti tertera dalam Tabel 3.3 (T-C.33) berikut ini :

7/4

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN KEWILAYAHAN				17.377.032.000				17.352.510.000
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur		95%	10.832.494.900			95%	10.807.972.900
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Daerah		95%	8.702.042.000			95%	8.702.042.000
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1078 orang	8.702.042.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1078 orang	8.702.042.000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	38.500.000			100%	-
7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	77 paket	38.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		77 paket	-
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		90%	384.282.000			90%	384.350.400

2

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (sudah termasuk Retribusi Sampah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	348 laporan	106.685.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		348 laporan	106.685.500
01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 laporan	1.023.470.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Gaji dan BPJS PH, THL pada kec & kel = 35 org	108 laporan	1.023.470.800
01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		80%	438.424.200			80%	438.424.200
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	46 unit	166.845.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53 unit	166.845.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	100 unit	61.579.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 unit	61.579.200
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	9 unit	210.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 unit	210.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	3.678.188.300			100%	3.678.188.300
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan		4 kali	-			4 kali	-

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
1							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2					3	4	5	6	7	8	9	10	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	-	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan		12 kali	1.647.968.600		12 kali	1.647.968.600	
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	576 dokumen	1.647.968.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	576 dokumen	1.647.968.600	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan		10 urusan	2.030.219.700		10 urusan	2.030.219.700	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	10 laporan	2.030.219.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	FKKS, Pokja Kel.Sehat, PKK, Karang Taruna, posyandu, dasawisma, LSS/UKS, lomba gerakan PKK, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi/Bunda Paud	10 laporan	2.030.219.700
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		39,98%	2.806.348.800		39,99%	2.806.348.800	
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		3 jenis	569.071.800		3 jenis	569.071.800	

7

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	9 lembaga	107.062.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lembaga yang ikut berpartisipasi dalam forum musrenbang :RT, PKK, POSYANDU, LPM, Karang Taruna, FKKS / POKJA KEL SEHAT, POSYANTEK, HIMPAUDI, FORUM ANAK	9 lembaga	107.062.200
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	12 unit	102.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 unit	102.180.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	6 pokmas/ormas	359.829.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	LPM, PKK, Karang Taruna, FKKS/Pokja Kel Sehat, Posyantek, lembaga Forikan	6 pokmas/ormas	359.829.600
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)		107 RT	2.237.277.000			107 RT	2.237.277.000
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 lembaga	2.237.277.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 lembaga	2.237.277.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur		10 LAPORAN	10.000.000			9 LAPORAN	10.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib		2 Jenis	10.000.000		MONEV, RAPAT	2 Jenis	10.000.000

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat)	108 Laporan	10.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	50.000.000			100	50.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah		5 kegiatan	50.000.000			5 kegiatan	50.000.000
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan Nasional Keamanan Lokal, Regional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	80 orang (Tim Ramadan Kecamatan)	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 orang	40.000.000
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	6 dokumen	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 dokumen	10.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur dalam Rencana Kerja (Rencana Kerja) Tahun 2024 berdasarkan pagu indikatif sesuai RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 17.377.032.000,- sudah termasuk Gaji dan Tunjangan PNS. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024 seperti tertera dalam Tabel 4.1 berikut ini.

2/

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN KEWILAYAHAN					17.377.032.000						17.353.510.000
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95%		95%	10.832.494.900					95%	10.807.972.900
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%		95%	8.702.042.000					95%	8.702.042.000
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3234 orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua KelDesa	1078 orang	8.702.042.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaiik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	1078 orang	8.702.042.000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%		100%	38.500.000					0%	-
7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	154 paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua KelDesa	77 paket	38.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaiik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	-	-
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90%		90%	384.282.000					90%	384.350.400

7

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2025		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	108 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	36 Paket	16.276.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	36 Paket	16.276.500
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	108 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	36 Paket	99.567.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	36 Paket	99.635.900
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	324 paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 paket	26.210.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	108 paket	26.210.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	120 laporan	242.228.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	BMD di Lingkungan Kecamatan	120 laporan	242.228.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%		100%	136.090.400					100%	150.000.000

Handwritten signature/initials.

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Akhir Periode Renstra OPD		Rencana Tahun 2024		Prorata		Prorata		Prorata		Prorata		Prorata		Prorata			
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua KelDesa	16 unit (komputer pc 8, printer 8)	136.090.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Jasa Penunjang	10 unit	150.000.000									
01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	90%		90%	1.133.156.300					90%	1.133.156.300									
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua KelDesa	12 laporan	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Jasa Penunjang	12 laporan	3.000.000									
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (sudah termasuk Retribusi Sampah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1044 laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua KelDesa	348 laporan	106.685.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Jasa Penunjang	348 laporan	106.685.500									
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	324 laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua KelDesa	108 laporan	1.023.470.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Tenaga Honorer dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	108 laporan	1.023.470.800									

2

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Prioritas		Kelompok Sasaran		Prahtoran Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Akhir Periode Renstra OPD	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80%		80%	438.424.200											
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156 unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	46 unit	166.845.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	BMD di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	55 unit	166.845.000					
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	400 unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	100 unit	61.579.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	BMD di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	150 unit	61.579.200					
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	9 unit	210.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	BMD di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	10 unit	210.000.000					
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100%		100%	3.678.188.300											
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	12 kali		4 kali	-					4 kali	1.000.000					

7

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis				1 dokumen	1.000.000	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	36 kali		12 kali	1.647.968.600							12 kali	1.647.968.600	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	1728 dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	576 dokumen	1.647.968.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Koordinasi di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan			576 dokumen	1.647.968.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	30 urusan		10 urusan	2.030.219.700							10 urusan	2.030.219.700	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30 laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	10 laporan	2.030.219.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Pelayanan di Kecamatan (FKKS, Pokja Kel Sehat, PKK, Karang Taruna, posyandu, dasawisma, LSS/UKS, lomba gerakan PKK, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi/Bunda Paud)			10 laporan	2.030.219.700	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	40%		39,98%	2.806.348.800							39,99%	2.806.348.800	
7.01.03.2.02	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	9 jenis		3 jenis	569.071.800							3 jenis	569.071.800	

77

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Akhir Periode Renstra OPD		Lokasi Output Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Prioritas Nasional		Prioritas Daerah		Kelompok Sasaran		Praktik dan Mekanisme Tahun 2025			
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27 lembaga	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua KelDesa	9 lembaga	107.062.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Pemberdayaan Kelurahan (RT, PKK, POSYANDU, LPM, Karang Taruna, FKKS / POKJA KEL SEHAT, POSYANTEK, HIMPAUDI, FORUM ANAK)	9 lembaga	107.062.200											
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua KelDesa	12 unit	102.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Pemberdayaan Kelurahan	8 unit	102.180.000											
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 pokmas/ormas	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua KelDesa	6 pokmas/ormas	359.829.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Pemberdayaan Kelurahan (LPM, PKK, Karang Taruna, FKKS/Pokja Kel Sehat, Posyantek, Forikan)	6 pokmas/ormas	359.829.600											
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	321 RT		107 RT	2.237.277.000					107 RT	2.237.277.000											
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 lembaga	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua KelDesa	1 lembaga	2.237.277.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara", Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Rukun Tetangga (RT)	1 lembaga	2.237.277.000											
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur	27 LAPORAN		10 LAPORAN	10.000.000					9 LAPORAN	10.000.000											

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	6 Jenis		2 Jenis (monev, rapat)	10.000.000							2 Jenis (monev, rapat)	10.000.000
7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	324 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua KelDesa	108 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Kegiatan Trantibum (Forum FKPM)			108 Laporan	10.000.000
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100%		100%	50.000.000							100%	50.000.000
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	15 kegiatan		5 kegiatan	50.000.000							5 kegiatan	50.000.000
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan Nasional Keamanan Lokal, Regional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	480 orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua KelDesa	80 orang (Tim Ramadan Kecamatan)	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Urusan Pemerintahan Umum (MTQ, Ramadhan)			200 orang	40.000.000
7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18 dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua KelDesa	6 dokumen	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Urusan Pemerintahan Umum (Forkopimca, HUTRI, HUT Kota)			6 dokumen	10.000.000

7

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026 serta memperhatikan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026 dan sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berdasarkan pada skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu.

Dengan disusunnya Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan.

Padang Panjang, 7 Agustus 2023

CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG



Drs. ASRUL
NIP. 19651112 199702 1 004

4





RENCANA KERJA

TAHUN 2024

**KAMATAN PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum.....	2
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Sistematika	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renca dan Capaian Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat.....	5
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat	11
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat.....	15
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
III.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padang Panjang Barat	42
III.2 Program, Kegiatan, Subekgiatan dan Pendanaan	42

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
	PERANGKAT DAERAH	46
BAB V	PENUTUP.....	61

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

1. Tabel 2.1 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra SOPD s/d Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Barat
2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat
3. Tabel 2.4 Review Terhadap RKPD Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Barat
4. Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 Kecamatan Padang Panjang Barat
5. Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program danKegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Padang Panjang Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (Renja) Tahun 2024 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan. Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Padang Panjang, Agustus 2023

CAMAT PADANG PANJANG BARAT

FIORI AGUSTIAN, SIP

NIP.19880515 201101 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan daerah Kota Padang Panjang, maka Kecamatan Padang Panjang Barat yang merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Padang Panjang turut serta mengisi rangkaian pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat tahun 2024 – 2026.

Untuk mencapai pelaksanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang secara umum dan Kecamatan Padang Panjang Barat secara khusus yang berdaya guna dan berhasil guna untuk tahun 2024, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024 yang berisi Program, kegiatan dan subkegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi Kecamatan untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Padang Panjang Barat untuk periode 1 (satu) tahun. Agar adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan maka Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024 dibuat dengan berpedoman pada RPD 2024 – 2026 Kota Padang Panjang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang. Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat dilakukan melalui tahapan – tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat, Rancangan Rencana Kerja dan Rancangan Akhir Rencana Kerja, pelaksanaan forum Kecamatan Padang Panjang Barat dan penetapan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang



- Panjang Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Orghanisai, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 32)
 10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tanun 2023 Nomor 6)
 11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 TAhun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD Kota Padang Panjang dan sebagai bahan evaluasi atas program/kegiatan tahun lalu.

Adapun tujuan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan proses tahapan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan Kecamatan Padang Panjang Barat dan pengaplikasiannya kedalam rencana pembangunan untuk periode 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun lalu dan Capaian Renstra

Kecamatan Padang Panjang Barat, Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Padang Panjang Barat dan program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat.

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat tahun lalu pada umumnya telah dapat terlaksana dengan baik dengan capaian 100%.

Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.



TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kecamatan Padang Panjang Barat

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SOPD) 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023				
					Target Renja SOPD Tahun 2022	Realisasi Renja SOPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)				
7	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT												
7	Urusan Kewilayahan												
7	01	Kecamatan											
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Urusan Pemer	90 %		90 %	90 %	90 %	90 %			
7	01	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %			
7	01	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan 75 orang/bulan	14 bulan 75 orang/bulan	14 bulan 75 orang/bulan	14 bulan 75 orang/bulan			
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	0	0	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	0	0
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	0	0	14 Laporan	14 Laporan	100.00%	0	0
7	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	90 %	90 %	90 %	90 %	100.00%	90 %	90 %	
7	01	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah peralatan listrik yang diadakan - Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 jenis 1 Paket	100.00%	1 jenis 1 Paket	1 jenis 1 Paket	100.00%	1 jenis 1 Paket	1 jenis 1 Paket
7	01	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah alat tulis kantor yang disediakan - Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 jenis 1 jenis 1 Paket	1 jenis 1 jenis 1 Paket	1 jenis 1 jenis 1 Paket	1 jenis 1 jenis 1 Paket	100.00%	1 jenis 1 jenis 1 Paket	1 jenis 1 jenis 1 Paket
7	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan - jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Jenis 1 Paket	2 Jenis 1 Paket	2 Jenis 1 Paket	2 Jenis 1 Paket	100.00%	2 Jenis 1 Paket	2 Jenis 1 Paket



Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat 2024

7	01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 kali 108 Laporan	300 kali 108 Laporan	300 kali 108 Laporan	300 kali 108 Laporan	100.00%	300 kali 108 Laporan	300 kali 108 Laporan
7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	90 %	90 %	90 %	90 %	100.00%	90 %	90 %
7	01	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0.00%	0 unit	0 unit
7	01	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit 0 Unit	0 Unit 0 Unit	0 Unit 0 Unit	0 Unit 0 Unit	0.00%	0 Unit 0 Unit	0 Unit 0 Unit
7	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang dimanfaatkan	90 %	90 %	90 %	90 %	100.00%	90 %	90 %
7	01	01	2.08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Perangko dan Materi yang disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90 Lembar 90 Laporan	90 Lembar 90 Laporan	90 Lembar 90 Laporan	90 Lembar 90 Laporan	100.00%	90 Lembar 90 Laporan	90 Lembar 90 Laporan
7	01	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Tagihan 300 Laporan	36 Tagihan 300 Laporan	36 Tagihan 300 Laporan	36 Tagihan 300 Laporan	100.00%	36 Tagihan 300 Laporan	36 Tagihan 300 Laporan
7	01	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- jumlah tenaga harian lepas dan pegawai harian yang dibayarkan honornya - Jumlah Honor Jasa Pelayanan umum yang dibayarkan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 orang 80 Orang 90 Laporan	0 orang 80 Orang 90 Laporan	0 orang 80 Orang 90 Laporan	0 orang 80 Orang 90 Laporan	100.00%	0 orang 80 Orang 90 Laporan	0 orang 80 Orang 90 Laporan
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	90 %	90 %	90 %	90 %	100.00%	90 %	90 %
7	01	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 unit	47 unit	47 unit	47 unit	100.00%	47 unit	47 unit
7	01	01	2.09		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah gedung yang dipelihara - Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	198 unit	13 unit 198 unit	13 unit 198 unit	13 unit 198 unit	100.00%	198 unit	198 unit
7	01	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	198 unit	198 unit	198 unit	198 unit	100.00%	198 unit	198 unit

7	01	01	2 09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100 00%	13 unit	13 unit
7	01	01	2 09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	0 unit	13 unit	13 unit	13 unit	100 00%	0 unit	0 unit
7	01	02	2 01		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat layanan	93 00%	93 00%	93 00%	93 00%	93 00%	93 00%	93 00%
7	01	02	2 01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis koordinasi	93 Dokumen	93 Dokumen	93 Dokumen	93 Dokumen	100 00%	93 Dokumen	93 Dokumen
7	01	02	2 01	0002	Sub Kegiatan Operasional Informasi Pelayanan Publik	- Jumlah Aplikasi dan layanan yang dilaksanakan - Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Aplikasi 93 Dokumen	2 Aplikasi 93 Dokumen	2 Aplikasi 93 Dokumen	2 Aplikasi 93 Dokumen	100 00%	2 Aplikasi 93 Dokumen	2 Aplikasi 93 Dokumen
7	01	02	2 03		Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah rapat koordinasi layanan persampahan	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali		48 kali	48 kali
7	01	02	2 01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	- Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - Jumlah kelurahan pelayanan persampahan yang dilakukan - Jumlah honor petugas lapangan yang di bayarkan - jumlah sarana persampahan yang disediakan	93 Dokumen 8 Lokasi 54 petugas 8 Lokasi	93 Dokumen 8 Lokasi 54 petugas 8 Lokasi	93 Dokumen 8 Lokasi 54 petugas 8 Lokasi	93 Dokumen 8 Lokasi 54 petugas 8 Lokasi	100 00%	93 Dokumen 8 Lokasi 54 petugas 8 Lokasi	93 Dokumen 8 Lokasi 54 petugas 8 Lokasi
7	01	02	2 04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	14 Pelimpahan Urusan	14 Pelimpahan Urusan	14 Pelimpahan Urusan	14 Pelimpahan Urusan	100 00%	14 Pelimpahan Urusan	14 Pelimpahan Urusan
7	01	02	2 04	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah forum komunikasi kecamatan/kelurahan sehat yang dilaksanakan - Jumlah honor kader posyandu yang dibayarkan - Jumlah lembaga karang taruna yang difasilitasi - Jumlah lembaga pkk yang diberdayakan - Jumlah honor kader dasawisma yang dibayarkan - Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang diberdayakan - Jumlah Pemenang Lomba KUBE FM - Jumlah Pemenang Lomba HKG pkk KB Kes yang dilaksanakan - Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan - Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Forum 391 Orang 9 Lembaga 9 Lembaga 387 orang 9 Lembaga 3 Pemenang 3 Pemenang 1 Kegiatan 108 Laporan	9 Forum 391 Orang 9 Lembaga 9 Lembaga 387 orang 9 Lembaga 3 Pemenang 3 Pemenang 1 Kegiatan 108 Laporan	9 Forum 391 Orang 9 Lembaga 9 Lembaga 387 orang 9 Lembaga 3 Pemenang 3 Pemenang 1 Kegiatan 108 Laporan	9 Forum 391 Orang 9 Lembaga 9 Lembaga 387 orang 9 Lembaga 3 Pemenang 3 Pemenang 1 Kegiatan 108 Laporan	100 00%	9 Forum 391 Orang 9 Lembaga 9 Lembaga 387 orang 9 Lembaga 3 Pemenang 3 Pemenang 1 Kegiatan 108 Laporan	100 00%

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	24 %	24 %	24 %	24 %	100.00%	24 %	24 %
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	42 Jenis	42 Jenis	42 Jenis	42 Jenis	100.00%	42 Jenis	42 Jenis
7	01	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Kegiatan 42 Lembaga Kemasyarakatan	9 Kegiatan 42 Lembaga Kemasyarakatan	9 Kegiatan 42 Lembaga Kemasyarakatan	9 Kegiatan 42 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	9 Kegiatan 42 Lembaga Kemasyarakatan	9 Kegiatan 42 Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan - Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 kegiatan 1 Unit	1 kegiatan 1 Unit	1 kegiatan 1 Unit	1 kegiatan 1 Unit	100.00%	1 kegiatan 1 Unit	1 kegiatan 1 Unit
7	01	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan - jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi - Jumlah monitoring evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan - Jumlah lembaga posyantelek yang difasilitasi - Jumlah Lembaga Masyarakat yang difasilitasi - Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 lokasi 3 Pemenang 1 Kegiatan 8 TTG/12 Laporan 9 Lembaga 14 Pokmas / Ormas	8 lokasi 3 Pemenang 1 Kegiatan 8 TTG/12 Laporan 9 Lembaga 14 Pokmas / Ormas	8 lokasi 3 Pemenang 1 Kegiatan 8 TTG/12 Laporan 9 Lembaga 14 Pokmas / Ormas	8 lokasi 3 Pemenang 1 Kegiatan 8 TTG/12 Laporan 9 Lembaga 14 Pokmas / Ormas	100.00%	8 lokasi 3 Pemenang 1 Kegiatan 8 TTG/12 Laporan 9 Lembaga 14 Pokmas / Ormas	8 lokasi 3 Pemenang 1 Kegiatan 8 TTG/12 Laporan 9 Lembaga 14 Pokmas / Ormas
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT yang difasilitasi	133 RT	133 RT	133 RT	133 RT	100.00%	133 RT	133 RT
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan - jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1596 kegiatan 42 Lembaga Kemasyarakatan	1596 kegiatan 42 Lembaga Kemasyarakatan	1596 kegiatan 42 Lembaga Kemasyarakatan	1596 kegiatan 42 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	1596 kegiatan 42 Lembaga Kemasyarakatan	1596 kegiatan 42 Lembaga Kemasyarakatan
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	100 %
7	01	04	2.01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi Trantibum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	1 Kegiatan	1 Kegiatan
7	01	04	2.01	0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Jumlah rapat dan monev yang dilaksanakan - Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kali 93 Laporan	12 Kali 93 Laporan	12 Kali 93 Laporan	12 Kali 93 Laporan	100.00%	12 Kali 93 Laporan	12 Kali 93 Laporan

7	01	05	2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum	93 %	93 %	93 %	93 %	100.00%	93 %	93 %
7	01	05	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah jenis penugasan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100.00%	2 Jenis	2 Jenis
7	01	05	2.01	0004 Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	- Jumlah kegiatan MTQ yang difasilitasi - Jumlah kegiatan Ramadhan yang dilaksanakan - Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	0 Kegiatan 1 Kegiatan 93 Orang	0 Kegiatan 1 Kegiatan 93 Orang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 93 Orang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 93 Orang	100.00%	0 Kegiatan 1 Kegiatan 93 Orang	0 Kegiatan 1 Kegiatan 93 Orang
7	01	05	2.01	0008 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- Jumlah forum koordinasi dan diskusi pimpinan tentang masalah kedinasan kantubmas diKecamatan yang dijalankan - Jumlah kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan - Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 forum 2 kegiatan 4 Dokumen	1 forum 2 kegiatan 4 Dokumen	1 forum 1 kegiatan 4 Dokumen	1 forum 1 kegiatan 4 Dokumen	100.00%	1 forum 2 kegiatan 4 Dokumen	1 forum 2 kegiatan 4 Dokumen

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan kinerja pada Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 Kecamatan Padang Panjang Barat, realisasi kegiatan dan kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan dan telah mencapai 100 %. Sedangkan untuk realisasi kegiatan untuk Tahun 2023 diperkirakan akan mencapai 100 % dengan memperhatikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat

Permasalahan dan hambatan yang datang dari aparatur di Kecamatan Padang Panjang Barat sendiri adalah adanya pegawai yang memegang jabatan struktural dan belum mengikuti diklat jabatan, adanya pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Hal ini juga merupakan hambatan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Kecamatan Padang Panjang Barat.

Salah satu indikator kinerja aparatur pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan baik bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka kesejahteraan masyarakat adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dituntut dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kenyataannya pelayanan publik yang dijadikan sebagai indikator kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh masyarakat, meskipun dalam hal ini pemerintah dalam hal ini Kecamatan Padang Panjang Barat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayan yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk mengukur kinerja pelayanan suatu organisasi dapat dinilai dengan menggunakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atau pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparat penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhan.

Pencapaian kinerja Pelayanan di Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Proyeksi Realisasi untuk dua tahun kedepannya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang**

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Nilai penyelenggaraan Pelayanan Publik			93%	95%	90%	93%	86%	21.02%	90%	93%	Pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dapat terlaksana dengan baik, dengan SOP yang telah disusun oleh Tim Penyusun SOP Kecamatan Padang Panjang Barat
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan			39.00	42.00	39.20%	39.50%	95.00%	21.02%	39.20%	39.50%	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan melalui Gotong Royong, Siskamling yang telah meningkat dari tahun ke tahun
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			92.00	93.00	97.85%	97.90%	90.00%	40.00%	97.85%	97.90%	Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat telah meraih nilai Baik

Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Keps/25/M.Pan/2/2004 ada 14 unsur yang dapat diberlakukan untuk mengukur kinerja pelayanan yaitu :

1. Prosedur pelayanan
2. Persyaratan pelayanan
3. Kejelasan petugas pelayanan
4. Kedisiplinan petugas pelayanan
5. Tanggung jawab petugas pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan
7. Kecepatan pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas
10. Kewajaran biaya pelayanan
11. Kepastian biaya pelayanan
12. Kepastian jadwal pelayanan
13. Kenyamanan lingkungan
14. Keamanan pelayanan

Menghadapi lingkungan yang berubah dengan cepat, birokrasi pemerintah perlu terus berada pada posisi unggul, artinya mampu menjadikan perubahan berskala besar dengan bekerja secara inovatif dan proaktif.

Tujuh (7) faktor kriteria unggul sebuah organisasi :

1. Birokrasi yang menampilkan kinerja unggul dapat diuji dengan standar eksternal dan bukan hanya standar internal.
2. Kewajiban yang nyata ditampilkan sedekat mungkin dengan kinerja potensial
3. Harus diupayakan agar birokrat tidak cepat merasa puas
4. Dalam lingkungan birokrasi perlu ditumbuhkan dan dipelihara iklim persaingan positif
5. Peningkatan kinerja harus sesuai dengan penerapan prinsip efisiensi
6. Organisasi dengan kinerja tinggi menjadi contoh bagi organisasi lain dan sekaligus sebagai sumber ide bagi mereka
7. Organisasi dengan kinerja tinggi mampu memenuhi persyaratan ideal yang dituntut oleh kondisi budaya organisasi itu berada dan bergerak.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat

Tujuan nasional seperti yang dimaksud didalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seiuruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka usaha pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan yang adil dan merata.

Maka untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan kelurahan. Adapun kedudukan, tugas dan wewenang kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan di wilayah kerjanya.
2. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota, diupimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasaran dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Selain tugas sebagai mana dimaksud diatas camat juga melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi; perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kecamatan Padang Panjang Barat banyak dipengaruhi oleh permasalahan yang terjadi di masyarakat. Krisis globalisasi yang melanda Indonesia memberikan dampak perekonomian di daerah. Fluktuasi harga kebutuhan pokok yang terus bergerak naik memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat, sehingga sangat mempengaruhi angka kesejahteraan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori hampir miskin, mengusulkan untuk dimasukkan dalam kategori keluarga miskin dengan harapan mendapat bantuan tiap bulannya

Melihat hal ini tentu dapat dipastikan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang telah digulirkan beberapa tahun belakangan ini tidak akan dapat menekan angka kemiskinan dibawah 6 %.

Selain itu pengembangan dan penerapan nilai-nilai agama dan budaya yang islami di Kota Padang Panjang umumnya dan Kecamatan Padang Panjang Barat pada khususnya saat ini memang belum optimal. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi antara lain masih ditemukannya tindakan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2023 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada Tahun Anggaran 2023 review rancangan RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Tabel 2.4 berikut ini :

Kecamatan Padang Panjang Barat

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1					2	3	7	4	6	2	3	7	4	5	8
					KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT										
7					Urusan Kewilayahan									18.123.638.900	
7	01				Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		18.123.638.900	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		10.410.090.398	
7	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.075.883.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.075.883.000	
7	01	01	2.02		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Orang yang Menenma Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang/bulan	8.075.883.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Orang yang Menenma Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang/bulan	8.075.883.000	
					Kecamatan	Kecamatan			8.075.883.000	Kecamatan	Kecamatan			8.075.883.000	
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		32.600.000	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		32.600.000	
7	01	01	2.02	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	32.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	32.500.000	
					Kecamatan	Kecamatan			32.500.000	Kecamatan	Kecamatan			32.500.000	
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		463.601.883	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		463.601.883	
7	01	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.896.300	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.896.300	
					Kecamatan	Kecamatan			8.000.000	Kecamatan	Kecamatan			8.000.000	
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			2.380.000	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			2.380.000	
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			2.396.100	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			2.396.100	
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			2.399.700	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			2.399.700	
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			3.121.400	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			3.121.400	
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			4.000.000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			4.000.000	
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			2.440.700	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			2.440.700	
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			3.096.800	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			3.096.800	
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			1.061.600	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			1.061.600	

01	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	102,612,533	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	102,612,533
				Kecamatan	Kecamatan			37,608,833	Kecamatan	Kecamatan			37,608,833
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			5,400,000	Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			5,400,000
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			11,516,800	Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			11,516,800
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			5,973,600	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			5,973,600
				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			11,144,800	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			11,144,800
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			7,060,200	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			7,060,200
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			10,615,100	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			10,615,100
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			5,963,000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			5,963,000
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			7,330,200	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			7,330,200
01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	21,993,050	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	21,993,050
				Kecamatan	Kecamatan			13,958,500	Kecamatan	Kecamatan			13,958,500
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			1,000,000	Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			1,000,000
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			1,000,000	Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			1,000,000
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			1,034,650	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			1,034,650
				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			1,000,000	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			1,000,000
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			1,000,000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			1,000,000
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			999,900	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			999,900
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			1,000,000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			1,000,000
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			1,000,000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			1,000,000
01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300,000,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300,000,000
				Kecamatan	Kecamatan			216,349,000	Kecamatan	Kecamatan			216,349,000
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			10,500,000	Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			10,500,000
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			12,600,000	Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			12,600,000
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			11,280,000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			11,280,000
				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			11,421,000	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			11,421,000
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			6,300,000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			6,300,000
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			10,500,000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			10,500,000
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			10,550,000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			10,550,000
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			10,500,000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			10,500,000
01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		102,160,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		102,160,000
01	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit mobil, 10 unit motor		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit mobil, 10 unit motor	
				Kecamatan	Kecamatan				Kecamatan	Kecamatan			
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			

01	01	2 07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit Laptop/PC, 20 Unit Printer	102,180,000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit Laptop/PC, 20 Unit Printer	102,180,000	
				Kecamatan	Kecamatan			102,180,000	Kecamatan	Kecamatan			102,180,000	
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan				
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan				
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
01	01	2 08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,084,613,015	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,084,613,015	
01	01	2 08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	
				Kecamatan	Kecamatan			2,000,000	Kecamatan	Kecamatan			2,000,000	
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan				
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan				
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
01	01	2 08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	86,057,015	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	86,057,015	
				Kecamatan	Kecamatan			16,529,775	Kecamatan	Kecamatan			16,529,775	
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			8,055,104	Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			8,055,104	
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			8,393,360	Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			8,393,360	
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			12,521,276	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			12,521,276	
				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			9,506,132	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			9,506,132	
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			10,593,600	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			10,593,600	
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			10,532,640	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			10,532,640	
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			3,925,184	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			3,925,184	
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			5,999,944	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			5,999,944	
01	01	2 08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan (35 PH, THL)	996,456,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan (35 PH, THL)	996,456,000	
				Kecamatan	Kecamatan			329,121,600	Kecamatan	Kecamatan			329,121,600	Belanja sewa kendaraan roda 4, 2 unit
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			83,416,800	Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			83,416,800	
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			83,416,800	Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			83,416,800	
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			83,416,800	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			83,416,800	
				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			83,416,800	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			83,416,800	
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			83,416,800	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			83,416,800	
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			83,416,800	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			83,416,800	
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			83,416,800	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			83,416,800	
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			83,416,800	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			83,416,800	

01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		661,512,500	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		661,512,500	
01	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	165,512,500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	165,512,500	
				Kecamatan	Kecamatan			86,450,000	Kecamatan	Kecamatan			86,450,000	
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			10,860,000	Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			10,860,000	
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			10,860,000	Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			10,860,000	
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			10,860,000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			10,860,000	
				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			8,617,500	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			8,617,500	
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			8,000,000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			8,000,000	
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			10,860,000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			10,860,000	
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			8,145,000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			8,145,000	
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			10,860,000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			10,860,000	
01	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	80,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	80,000,000	
				Kecamatan	Kecamatan			20,000,000	Kecamatan	Kecamatan			20,000,000	
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			7,500,000	Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			7,500,000	
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			7,500,000	Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			7,500,000	
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			7,500,000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			7,500,000	
				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			9,000,000	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			9,000,000	
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			6,000,000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			6,000,000	
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			7,500,000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			7,500,000	
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			7,500,000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			7,500,000	
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			7,500,000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			7,500,000	
01	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	111,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	111,000,000	
				Kecamatan	Kecamatan			45,500,000	Kecamatan	Kecamatan			45,500,000	
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			8,000,000	Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			8,000,000	
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			8,000,000	Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			8,000,000	
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			8,000,000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			8,000,000	
				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			8,000,000	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			8,000,000	
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			8,000,000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			8,000,000	
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			8,500,000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			8,500,000	
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			8,500,000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			8,500,000	
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			8,500,000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			8,500,000	
01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	305,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	305,000,000	
				Kecamatan	Kecamatan			305,000,000	Kecamatan	Kecamatan			305,000,000	
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			-	Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			-	
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			-	Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			-	
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			-	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			-	
				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			-	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			-	
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			-	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			-	
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			-	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			-	
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			-	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			-	
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			-	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			-	

01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Presentase tingkat layanan		4,270,738,302	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Presentase tingkat layanan		4,270,738,302
01	02	2.03		Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Terlaksananya Koordinasi	9 Kelurahan, 50 oran, 8 sarana)	1,601,268,400	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Terlaksananya Koordinasi	9 Kelurahan, 50 oran, 8 sarana)	1,601,268,400
01	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	680 dokumen (56 Laporan Pelugas Kebersihan/bulan, 8 Becak motor)	1.601.268.400	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	680 dokumen (56 Laporan Pelugas Kebersihan/bulan, 8 Becak motor)	1.601.268.400
				Kecamatan	Kecamatan				Kecamatan	Kecamatan			
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			236.627.200	Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			236.627.200
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			175.347.000	Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			175.347.000
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			175.749.300	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			175.749.300
				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			175.755.700	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			175.755.700
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			117.114.900	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			117.114.900
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			239.084.200	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			239.084.200
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			208.279.200	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			208.279.200
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			273.310.900	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			273.310.900
01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	1 Koordinasi		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	1 Koordinasi	
01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen (kegiatan pelatihan)		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen (kegiatan pelatihan)	
				Kecamatan	Kecamatan				Kecamatan	Kecamatan			
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
01	02	2.04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	6 Urusan	2,669,469,902	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	6 Urusan	2,669,469,902
01	02	2.04	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan (1 Forum, 520 Kader, 18 Lembaga, 9 pemenang, 6 tingkatan pembinaan)	2,669,469,902	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan (1 Forum, 520 Kader, 18 Lembaga, 9 pemenang, 6 tingkatan pembinaan)	2,669,469,902
						Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Kegiatan				Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Kegiatan	
						Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan dan Honor Kader yang dibayarkan	1 Lomba, 270 Kader				Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan dan Honor Kader yang dibayarkan	1 Lomba, 270 Kader	
						Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	9 Lembaga				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	9 Lembaga	

Handwritten signature/initials

			Jumlah PKK yang diberdayakan	9 Lembaga				Jumlah PKK yang diberdayakan	9 Lembaga			
			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	12 Dasawisma				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	12 Dasawisma			
			Jumlah lembaga yang diberdayakan	9 Lembaga				Jumlah lembaga yang diberdayakan	9 Lembaga			
			Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan	6 Pemenang				Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan	6 Pemenang			
			Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes	3 Pemenang				Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes	3 Pemenang			
			Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan	1 Kali Pembinaan				Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan	1 Kali Pembinaan			
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Diimpahkan	8 Laporan	149.479.600	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Diimpahkan	8 Laporan	149.479.600		
			Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan			
			Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan dan Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan dan Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan			
			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan			
			Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan			
			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan			
			Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan			
			Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan	8 Laporan				Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan	8 Laporan			
			Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes	8 Laporan				Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes	8 Laporan			
			Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan	8 Laporan			
	Kelurahan Sileing Bawah	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Diimpahkan	8 Laporan	432.547.000	Kelurahan Sileing Bawah	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Diimpahkan	8 Laporan	432.547.000		
			Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan			
			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan			
			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan			
			Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan			
			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan			
			Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan			

				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	223.223.100	Kelurahan Silang Atas	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	223.223.100	
						Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan		
						Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan		
						Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan		
						Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan		
						Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan		
						Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan		
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	316.546.800	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	316.546.800	
						Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan		
						Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan		
						Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan		
						Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan		
						Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan		
						Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan		
				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	213.718.402	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	213.718.402	
						Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan		
						Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan		
						Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan		
						Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan		
						Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan		
						Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan		

				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	140.361.000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	140.361.000	
						Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan		
						Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan		
						Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan		
						Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan		
						Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan		
						Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan		
				Kelurahan Batai-Batai	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	425.076.900	Kelurahan Batai-Batai	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	425.076.900	
						Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan		
						Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan		
						Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan		
						Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan		
						Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan		
						Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan		
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	262.532.800	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	262.532.800	
						Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan		
						Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan		
						Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan		
						Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan		
						Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan		
						Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan		

				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	505.964.300	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	505.984.300	
						Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan		
						Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan		
						Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan		
						Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan		
						Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan		
						Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan				Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan		
01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan		3.411.610.200	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan		3.411.610.200	
01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Terlaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis	625.140.150	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Terlaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis	625.140.150	
01	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	199.999.800	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	199.999.800	
				Kecamatan	Kecamatan			75.000.000	Kecamatan	Kecamatan			75.000.000	
				Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			13.999.900	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			13.999.900	
				Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			13.999.900	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			13.999.900	
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			14.000.000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			14.000.000	
				Kelurahan Bukit Sunungan	Kelurahan			16.000.000	Kelurahan Bukit Sunungan	Kelurahan			16.000.000	
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			14.000.000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			14.000.000	
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			19.000.000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			19.000.000	
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			14.000.000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			14.000.000	
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			20.000.000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			20.000.000	
01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	8 unit		Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	8 unit	20.000.000	
				Kecamatan	Kecamatan			20.000.000	Kecamatan	Kecamatan			20.000.000	
				Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			-	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			-	
				Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			-	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			-	
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			-	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			-	
				Kelurahan Bukit Sunungan	Kelurahan			-	Kelurahan Bukit Sunungan	Kelurahan			-	
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			-	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			-	
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			-	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			-	
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			-	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			-	
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			-	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			-	

01	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/ ormas (9 lembaga, 8 lokasi, 3 pemenang, 1 kegiatan)	425.140.350	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/ ormas (9 lembaga, 8 lokasi, 3 pemenang, 1 kegiatan)	425.140.350	
				Kecamatan	Kecamatan			150.695.450	Kecamatan	Kecamatan			150.695.450	
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			50.960.000	Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			50.960.000	Pelatihan Public Speaking bagi Anggota TP PKK Kelurahan sebanyak 20 orang
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			13.960.000	Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			13.960.000	
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			64.010.000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			64.010.000	
				Kelurahan Bukit Sunungan	Kelurahan			52.464.900	Kelurahan Bukit Sunungan	Kelurahan			52.464.900	pelatihan tata nas sebanyak satu kelompok 20 Orang
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			14.000.000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			14.000.000	
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			51.040.000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			51.040.000	
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			14.000.000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			14.000.000	
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			14.010.000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			14.010.000	
01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan	133 RT	2.786.470.050	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan	133 RT	2.786.470.050	
01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan (133 rt)	2.786.470.050	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan (133 rt)	2.786.470.050	
				Kecamatan	Kecamatan			4.000.000	Kecamatan	Kecamatan			4.000.000	
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			477.480.000	Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			477.480.000	
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			228.360.000	Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			228.360.000	
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			373.680.000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			373.680.000	
				Kelurahan Bukit Sunungan	Kelurahan			186.840.000	Kelurahan Bukit Sunungan	Kelurahan			186.840.000	
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			124.765.500	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			124.765.500	
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			498.240.000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			498.240.000	
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			373.680.000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			373.680.000	
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			519.424.550	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			519.424.550	
01	04			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Persentase penurunan tingkat pelanggaran ketenteraman ketertiban umum		20.200.000	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Persentase penurunan tingkat pelanggaran ketenteraman ketertiban umum		20.200.000	
01	04	2.01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terselenggaranya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 jenis	20.200.000	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terselenggaranya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 jenis	20.200.000	
01	04	2.01	0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.200.000	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.200.000	
				Kecamatan	Kecamatan			4.200.000	Kecamatan	Kecamatan			4.200.000	
				Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			2.000.000	Kelurahan Silang Bawah	Kelurahan			2.000.000	
				Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			2.000.000	Kelurahan Silang Atas	Kelurahan			2.000.000	
				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			2.000.000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			2.000.000	
				Kelurahan Bukit Sunungan	Kelurahan			2.000.000	Kelurahan Bukit Sunungan	Kelurahan			2.000.000	
				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			2.000.000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			2.000.000	
				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			2.000.000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			2.000.000	
				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			2.000.000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			2.000.000	
				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			2.000.000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			2.000.000	

7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan		11,000,000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan		11,000,000	
7	01	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	2 jenis	11,000,000	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	2 jenis	11,000,000	
7	01	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Keurukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 orang	1,000,000	Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Keurukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 orang	1,000,000	
					Kecamatan	Kecamatan			1,000,000	Kecamatan	Kecamatan			1,000,000	Penganggaran kegiatan MTQ Kecamatan 290,970,000 dan Fasilitas MTQ Kelurahan Rp 50,000,000.- /kelurahan
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	01	05	2.01	0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	10,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	10,000,000	
					Kecamatan	Kecamatan			10,000,000	Kecamatan	Kecamatan			10,000,000	
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				

Salah satu indikator kinerja aparat pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan baik bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menjadikan kesejahteraan masyarakat adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaran pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dituntut dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kenyataannya pelayanan publik yang dijadikan sebagai indikator kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut belum memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, meskipun dalam hal ini pemerintah pusat selalu menerbitkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Hal itu dapat dilihat antara lain banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat seperti pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan dan tidak informatif. Terbatasnya fasilitas pelayanan tidak menjamin kapastian hukum, waktu dan biaya serta banyak dijumpai praktek pungutan liar. Pelayanan publik haruslah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap SOPD.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat untuk kegiatan pembangunan dibidang sarana dan prasarana, bidang usaha ekonomi produktif, bidang sosial budaya dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional terhadap proses penyelenggaraan perencanaan di daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah. Rencana pembangunan daerah merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023. Maka langkah awal dari penyusunan rencana kerja pembangunan daerah dilaksanakan musyawarah pembangunan (Musrenbang) Kelurahan dan Kecamatan.

Adapun maksud dan tujuan musrenbang adalah untuk menampung aspirasi masyarakat dibidang pembangunan, ekonomi dan sosial budaya untuk tahun berikutnya. Sedangkan tujuan musrenbang kecamatan adalah :

- 1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil musyawarah dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas pembangunan.
- 2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan.
- 3. Melakukan klarifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan kelompok bidang fisik, ekonomi produktif dan sosial budaya.

Adapun Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat dapat kita lihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Padang Panjang

Kecamatan Padang Panjang Barat						Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan Penting
KODE						2	3	4	5	6
1						KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT				
7						Urusan Kewilayahan				
7	01					Kecamatan	Kecamatan	Presentase pemenuhan		
7	01					Program Penunjang Urusan	dan	layanan administrasi		
						Pemerintahan Daerah	Kelurahan	perkantoran		
						Kabupaten/Kota				
7	01	01				Kegiatan Administrasi	Kecamatan	Terlaksananya Administrasi		
						Kuangan Perangkat Daerah	dan	Keuangan Perangkat Daerah		
							Kelurahan			
7	01	01	2.02	0001		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji	Kecamatan	Jumlah Orang yang	75	
						dan Tunjangan ASN	dan Kelurahan	Menerima Gaji dan	orang/bulan	
								Tunjangan ASN		
						Kecamatan	Kecamatan			
						Kelurahan	Kelurahan			
						Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
						Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
						Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
						Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
						Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
						Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
						Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
						Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			

7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawalan perangkat daerah	90 Persen	
7	01	01	2.02	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	
7	01	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			

7	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
7	01	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit mobil, 10 unit motor	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			

7	01	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit Laptop/PC, 20 Unit Printer	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
7	01	01	2.08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan (35 PH, THL)	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			

						Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
						Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
						Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
						Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
						Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	01	2.09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
7	01	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4		
						Kecamatan	Kecamatan			
						Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
						Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
						Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
						Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
						Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
						Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
						Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
						Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun		
						Kecamatan	Kecamatan			
						Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
						Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
						Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
						Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
						Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
						Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
						Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
						Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit		
						Kecamatan	Kecamatan			
						Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
						Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
						Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
						Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
						Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
						Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
						Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
						Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			

AK

7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase tingkat layanan		
7	01	02	2.03		Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Terlaksananya Koordinasi	9 Kelurahan, 50 orang, 6 sarana)	
7	01	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	680 dokumen (56 Laporan Pelugas Kebersihan/ bulan, 8 Becak motor)	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	1 Koordinasi	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen (kegiatan pelatihan)	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			

Handwritten signature/initials

7	01	02	2.04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Tertaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	6 Urusan	
7	01	02	2.04	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan (1 Forum, 520 Kader, 18 Lembaga, 9 pemenang, 6 tingkatan pembinaan)	
							Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan dan Honor Kader yang dibayarkan	1 Lomba, 270 Kader	
							Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	9 Lembaga	
							Jumlah PKK yang diberdayakan	9 Lembaga	
							Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	12 Dasawisma	
							Jumlah lembaga yang diberdayakan	9 Lembaga	
							Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan	6 Pemenang	
							Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes	3 Pemenang	
							Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan	1 Kali Pembinaan	
					Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Forum	
							Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan	1 Lomba	
							Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga	
							Jumlah PKK yang diberdayakan	1 Lembaga	
							Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	9 orang	
							Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga	
							Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan	6 Pemenang	
							Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes	3 Pemenang	
							Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan	1 Kali Pembinaan	

						Kelurahan Sitaing Bawah	Kelurahan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Forum	
								Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	480 orang/kali	
								Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga	
								Jumlah PKK yang diberdayakan	1 Lembaga	
								Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	960 orang / kali	
								Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga	
						Kelurahan Sitaing Atas	Kelurahan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Forum	
								Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	360 orang / kali	
								Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga	
								Jumlah PKK yang diberdayakan	1 Lembaga	
								Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	360 orang / kali	
								Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga	
						Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Forum	
								Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	480 orang/kali	
								Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga	
								Jumlah PKK yang diberdayakan	1 Lembaga	
								Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	516 orang/kali	
								Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga	
						Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Forum	
								Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	300 orang/kali	
								Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga	
								Jumlah PKK yang diberdayakan	1 Lembaga	
								Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	324 orang/kali	
								Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga	

7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Tertaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis	
7	01	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasya katan	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			Pembangunan Gedung/Kan'o r wilayah Kecamatan dan Kelurahan
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/ ormas (8 lembaga, 8 lokasi, 3 pemenang, 1 kegiatan)	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			Pelatihan Publik Speaking bagi Anggota TP.PKK Kelurahan sebanyak 20 orang
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			pelatihan membuat sebanyak 20 orang
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			Pelatihan Menyulam, sebanyak 15 orang
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			Pelatihan Memasak sebanyak 20 orang
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			Pelatihan Merajut untuk perwakilan RT
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			

Handwritten signature/initials

7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan	133 RT	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan (133 rt)	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	04			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Persentase penurunan tingkat pelanggaran ketenteraman ketertiban umum		
7	01	04	2.01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terselenggaranya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 jenis	
7	01	04	2.01	0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			

7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan		
7	01	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	2 jenis	
7	01	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 orang	
					Kecamatan	Kecamatan			Penganggaran kegiatan MTQ kecamatan 290,970,000
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			
7	01	05	2.01	0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	
					Kecamatan	Kecamatan			
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			

Dengan dilaksanakannya kegiatan musrenbang tahun 2023 yang kegiatannya masuk tahun 2024 telah dapat mengeluarkan :

1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Panjang Barat yang akan dibiayai melalui anggaran Kecamatan Padang Panjang Barat yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang Tahun 2023.



2. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui SOPD atau gabungan SOPD seperti tabel dibawah ini :

No.	Kelurahan	Bidang			Jumlah Usulan
		Fisik	Sosial Budaya	Ekonomi	
1.	Silaing Bawah	14 Usulan	1 Usulan	-	15 Usulan
2.	Silaing Atas	6 Usulan	-	4 Usulan	10 Usulan
3.	Pasar Usang	9 Usulan	1 Usulan	-	10 Usulan
4.	Bukit Surungan	3 Usulan	-	3 Usulan	6 Usulan
5.	Balai-Balai	10 Usulan	-	2 Usulan	12 Usulan
6.	Pasar Baru	3 Usulan	1 Usulan	2 Usulan	6 Usulan
7.	Tanah Hitam	6 Usulan	2 Usulan	3 Usulan	11 Usulan
8.	Kampung Manggis	11 Usulan	1 Usulan	2 Usulan	14 Usulan
	Jumlah	63 Usulan	6 Usulan	16 Usulan	85 Usulan

Dari usulan musrenbang kelurahan inilah yang akan dijadikan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SOPD Kecamatan Padang Panjang Barat seperti :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan
2. Belum optimalnya kualitas SDM aparatur
3. Belum optimalnya kegiatan kebangsaan, agama dan olah raga pada hari-hari nasional

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025.

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 di Kecamatan Padang Panjang Barat disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024 – 2026. Adapun tujuan dan sasaran kegiatan di Kecamatan Padang Panjang Barat lebih mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan partisipasi masyarakat dan keberdayaan lembaga masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan melihat perkembangan sebelumnya bahwa pelayanan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Padang Panjang Barat belum optimal, begitu juga dengan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Padang Panjang Barat belum representatif.

Program dan Kegiatan

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Padang Panjang Barat untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor



- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- 1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- 2. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
- 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Rencana program dan kegiatan tahun 2024 di Kecamatan Padang Panjang Barat berjumlah 5 program, 13 Kegiatan dan 26 sub kegiatan. Diharapkan semua usulan rencana kerja Kecamatan Padang Panjang Barat ini dapat masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang tahun 2024 sehingga kehadiran masyarakat dalam musrenbang semakin meningkat dan peran serta masyarakat dalam pembangunan secara swadaya dapat mencapai target.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Padang Panjang Barat terkait bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, Sesuai dengan Pemendagri Nomor 86 Tahun 2019 Program yang dilaksanakan di Kecamatan Padang Panjang Barat adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari 5 Program yang dilaksanakan di Kecamatan Padang Panjang Barat 4 Program diantaranya adalah Program yang menjadi Prioritas di Kecamatan Padang Panjang Barat yang mendukung tujuan Kecamatan Padang Panjang Barat yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam Rumusan Rencana Program, Kegiatan, subkegiatan serta pendanaan Kecamatan Padang Panjang Barat ada 2 (dua) kegiatan yang merupakan hasil investigasi Musrenbang yang dilaksanakan di 2 (dua) kelurahan untuk kegiatan Pelatihan Publik Speaking bagi anggota PKK di Kelurahan Silaing Bawah, pelatihan tata rias di Kelurahan Bukit Surungan pada subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan 1 (satu) kegiatan yaitu perbaikan gedung/kantor Kelurahan Pasar Baru pada subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana. Sub kegiatan ini merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kecamatan Padang Panjang Barat yang mendukung tujuan Rencana Strategis 2024 – 2026 Kecamatan Padang Panjang Barat.

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Padang Panjang

Kecamatan Padang Panjang Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT				18,143,838,900					18,563,334,081
7	Urusan Kewilayahan									
7 01	Kecamatan				18,143,838,900					18,563,334,081
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	Kecamatan dan Kelurahan	100 Persen	10,410,090,398			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 Persen	10,047,530,729
7 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan dan Kelurahan	90 Persen	8,075,883,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	90 Persen	8,014,504,662
7 01 01 2.02 000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan dan Kelurahan	1125 Orang/bulan	8,075,883,000			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1125 Orang/bulan	8,014,504,662
	Kecamatan		Kecamatan		8,075,883,000					8,014,504,662
	Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan							-
	Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan							-
	Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan							-
	Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan							-
	Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan							-
	Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan							-
	Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan							-
	Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan							-
7 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kecamatan dan Kelurahan	90 Persen	32,500,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90 Persen	
7 01 01 2.05 000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan dan Kelurahan	75 Paket	32,500,000			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	
	Kecamatan		Kecamatan		32,500,000					-
	Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan							-
	Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan							-
	Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan							-
	Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan							-
	Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan							-
	Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan							-
	Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan							-
	Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan							-

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat 2024

7	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan dan Kelurahan	90 Persen	453,501,883			Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	
7	01	01	2.06000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	36 Paket	28,896,300			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	31,785,930
				Kecamatan		Kecamatan		8,000,000					8,800,000
				Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan		2,380,000					2,618,000
				Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan		2,396,100					2,635,710
				Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan		2,399,700					2,639,670
				Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan		3,121,400					3,433,540
				Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan		4,000,000					4,400,000
				Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan		2,440,700					2,684,770
				Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan		3,096,800					3,406,480
				Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan		1,061,600					1,167,760
7	01	01	2.06004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	36 Paket	102,612,533			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	112,873,786
				Kecamatan		Kecamatan		37,608,833					41,369,716
				Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan		5,400,000					5,940,000
				Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan		11,516,800					12,668,480
				Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan		5,973,600					6,570,960
				Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan		11,144,800					12,259,280
				Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan		7,060,200					7,766,220
				Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan		10,615,100					11,676,610
				Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan		5,963,000					6,559,300
				Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan		7,330,200					8,063,220
7	01	01	2.06005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	36 Paket	21,993,050			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	24,192,355
				Kecamatan		Kecamatan		13,958,500					15,354,350
				Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan		1,000,000					1,100,000
				Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan		1,000,000					1,100,000
				Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan		1,034,650					1,138,115
				Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan		1,000,000					1,100,000
				Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan		1,000,000					1,100,000
				Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan		999,900					1,099,890
				Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan		1,000,000					1,100,000
				Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan		1,000,000					1,100,000

7	01	01	2.06	000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	120 Laporan	300,000,000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	330,000,000
					Kecamatan		Kecamatan		216349000				237,983,900
					Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan		10,500,000				11,550,000
					Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan		12,600,000				13,860,000
					Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan		11,280,000				12,408,000
					Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan		11,421,000				12,563,100
					Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan		6,300,000				6,930,000
					Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan		10,500,000				11,550,000
					Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan		10,550,000				11,605,000
					Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan		10,500,000				11,550,000
7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	102,180,000		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	112,398,000
7	01	01	2.07	000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	1 Unit			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
					Kecamatan		Kecamatan						-
					Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan						-
					Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan						-
					Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan						-
					Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan						-
					Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan						-
					Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan						-
					Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan						-
					Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan						-
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	28 Unit			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	28 Unit	
					Kecamatan		Kecamatan						-
					Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan						-
					Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan						-
					Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan						-
					Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan						-
					Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan						-
					Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan						-
					Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan						-
					Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan						-

7	01	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	28 Unit	102,180,000		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	112,398,000
						Kecamatan		Kecamatan		102,180,000		Pengadaan PC All in one/Laptop 5 unit dan Printer 15 unit untuk Kelurahan dan Kantor Camat P.P. Barat		112,398,000
						Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan						
						Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan						
						Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan						
						Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan						
						Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan						
						Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan						
						Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan						
						Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan						
7	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		90%	1,084,513,015		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90%	1,192,964,317
7	01	01	2	08	001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan dan Kelurahan	108 Laporan	2,000,000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108 Laporan	2,200,000
						Kecamatan		Kecamatan		2,000,000				2,200,000
						Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan						
						Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan						
						Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan						
						Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan						
						Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan						
						Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan						
						Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan						
						Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan						
7	01	01	2	08	002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	217 Laporan	86,057,015		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	217 Laporan	94,662,717
						Kecamatan		Kecamatan		16,529,775				18,182,753
						Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan		8,055,104				8,860,614
						Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan		8,393,360				9,232,696
						Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan		12,521,276				13,773,404
						Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan		9,506,132				10,456,745
						Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan		10,593,600				11,652,960
						Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan		10,532,640				11,585,904
						Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan		3,925,184				4,317,702
						Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan		5,999,944				6,599,938

7	01	01	2.08004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	996,456,000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	1,096,101,600
				Kecamatan		Kecamatan		329,121,600				362,033,760
				Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan		83,416,800				91,758,480
				Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan		83,416,800				91,758,480
				Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan		83,416,800				91,758,480
				Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan		83,416,800				91,758,480
				Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan		83,416,800				91,758,480
				Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan		83,416,800				91,758,480
				Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan		83,416,800				91,758,480
				Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan		83,416,800				91,758,480
7	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		90%	661,512,500		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90%	727,663,750
7	01	01	2.09000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan dan Kelurahan	47 Unit	165,512,500		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit	182,063,750
				Kecamatan		Kecamatan		86,450,000				95,095,000
				Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan		10,860,000				11,946,000
				Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan		10,860,000				11,946,000
				Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan		10,860,000				11,946,000
				Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan		8,617,500				9,479,250
				Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan		8,000,000				8,800,000
				Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan		10,860,000				11,946,000
				Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan		8,145,000				8,959,500
				Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan		10,860,000				11,946,000
7	01	01	2.09004	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan dan Kelurahan	21 jenis	80,000,000		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 jenis	88,000,000
				Kecamatan		Kecamatan		20,000,000				22,000,000
				Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan		7,500,000				8,250,000
				Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan		7,500,000				8,250,000
				Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan		7,500,000				8,250,000
				Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan		9,000,000				9,900,000
				Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan		6,000,000				6,600,000
				Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan		7,500,000				8,250,000
				Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan		7,500,000				8,250,000
				Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan		7,500,000				8,250,000

7	01	01	2	09	010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan dan Kelurahan	13 Unit	111.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	122.100.000
						Kecamatan		Kecamatan		45.500.000				50.050.000
						Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan		8.000.000				8.800.000
						Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan		8.000.000				8.800.000
						Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan		8.000.000				8.800.000
						Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan		8.000.000				8.800.000
						Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan		8.000.000				8.800.000
						Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan		8.500.000				9.350.000
						Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan		8.500.000				9.350.000
						Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan		8.500.000				9.350.000
7	01	01	2	09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan dan Kelurahan	1 Unit	305.000.000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	335.500.000
						Kecamatan		Kecamatan		305.000.000	Pembangunan Gedung/Kantor wilayah Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Pasar Baru)			335.500.000
						Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan						-
						Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan						-
						Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan						-
						Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan						-
						Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan						-
						Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan						-
						Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan						-
						Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan						-
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat		1	4,270,738,302		Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	1	4,697,812,132
7	01	02	2.03			Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan		12 kali	1,601,268,400		Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	12 kali	1,761,395,240
7	01	02	2.0	000		Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan dan Kelurahan	680 Dokumen	1.601.268.400		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	680 Dokumen	1.761.395.240
						Kecamatan		Kecamatan		-				-
						Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan		236,627,200				260,289,920
						Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan		175,347,000				192,881,700
						Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan		175,749,300				193,324,230
						Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan		175,755,700				193,331,270
						Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan		117,114,900				128,826,390
						Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan		239,084,200				262,992,620
						Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan		208,279,200				229,107,120
						Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan		273,310,900				300,641,990

7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan		1 Koordinasi			Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	1 Koordinasi	
7	01	02	2.01.0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	1 Dokumen (kegiatan pelatihan)			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen (kegiatan pelatihan)	
				Kecamatan		Kecamatan						
				Kelurahan Silang Bawah		Kelurahan						
				Kelurahan Silang Atas		Kelurahan						
				Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan						
				Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan						
				Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan						
				Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan						
				Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan						
				Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan						
7	01	02	2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan		8 Urusan	2,669,469,902		Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan	8 Urusan	2,936,416,892
7	01	02	2.04.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		8 Laporan (1 Forum, 520 Kader, 18 Lembaga, 9 pemenang .. 6 tingkatan pembinaan)	2,669,469,902	Belum ada anggaran untuk kegiatan jambore PKK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Lapc. an (1 Forum, 520 Kader, 18 Lembaga, 9 pemenang, 6 tingkatan pembinaan)	2,936,416,892
					Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan		1 Kegiatan			Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	1 Kegiatan	
					Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan dan Honor Kader yang dibayarkan		1 Lomba, 270 Kader			Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan dan Honor Kader yang dibayarkan	1 Lomba, 270 Kader	
					Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		9 Lembaga			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	9 Lembaga	
					Jumlah PKK yang diberdayakan		9 Lembaga			Jumlah PKK yang diberdayakan	9 Lembaga	
					Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		12 Dasawisma			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	12 Dasawisma	
					Jumlah lembaga yang diberdayakan		9 Lembaga			Jumlah lembaga yang diberdayakan	9 Lembaga	
					Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan		6 Pemenang			Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan	6 Pemenang	
					Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes		3 Pemenang			Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes	3 Pemenang	
					Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan		1 Kali Pembinaan			Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan	1 Kali Pembinaan	

				Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan	8 Laporan	149.479.600			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	164.427.560
					Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan		8 Laporan				Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan	
					Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan		8 Laporan				Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan	8 Laporan	
					Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		8 Laporan				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan	
					Jumlah PKK yang diberdayakan		8 Laporan				Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan	
					Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		8 Laporan				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan	
					Jumlah lembaga yang diberdayakan		8 Laporan				Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan	
					Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan		8 Laporan				Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan	8 Laporan	
					Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes		8 Laporan				Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes	8 Laporan	
					Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan		8 Laporan				Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan	8 Laporan	
				Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan	8 Laporan	432.547.000			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	475.801.700
					Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan		8 Laporan				Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan	
					Jumlah Honor Kader yang dibayarkan		8 Laporan				Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan	
					Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		8 Laporan				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan	
					Jumlah PKK yang diberdayakan		8 Laporan				Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan	
					Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		8 Laporan				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan	
					Jumlah lembaga yang diberdayakan		8 Laporan				Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan	
				Kelurahan Silaing Atas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan	8 Laporan	223.223.100			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	245.545.410
					Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan		8 Laporan				Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	8 Laporan	
					Jumlah Honor Kader yang dibayarkan		8 Laporan				Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan	
					Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		8 Laporan				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan	
					Jumlah PKK yang diberdayakan		8 Laporan				Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan	
					Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		8 Laporan				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan	
					Jumlah lembaga yang diberdayakan		8 Laporan				Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan	

	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan	8 Laporan	425,076,900		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	467.584,590
		Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,		8 Laporan			Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	8 Laporan	
		Jumlah Honor Kader yang dibayarkan		8 Laporan			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan	
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		8 Laporan			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan	
		Jumlah PKK yang diberdayakan		8 Laporan			Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan	
		Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		8 Laporan			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan	
		Jumlah lembaga yang diberdayakan		8 Laporan			Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan	
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan	8 Laporan	262,532,800		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	286.786,080
		Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,		8 Laporan			Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	8 Laporan	
		Jumlah Honor Kader yang dibayarkan		8 Laporan			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan	
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		8 Laporan			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan	
		Jumlah PKK yang diberdayakan		8 Laporan			Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan	
		Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		8 Laporan			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan	
		Jumlah lembaga yang diberdayakan		8 Laporan			Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan	
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan	8 Laporan	505,984,300		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	556,582,730
		Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,		8 Laporan			Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	8 Laporan	
		Jumlah Honor Kader yang dibayarkan		8 Laporan			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	8 Laporan	
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		8 Laporan			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	8 Laporan	
		Jumlah PKK yang diberdayakan		8 Laporan			Jumlah PKK yang diberdayakan	8 Laporan	
		Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		8 Laporan			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	8 Laporan	
		Jumlah lembaga yang diberdayakan		8 Laporan			Jumlah lembaga yang diberdayakan	8 Laporan	

7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat		26%	3,431,610,200		Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	26%	3,774,771,220
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		3 jenis	646,140,160		Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis	709,654,166
7	01	03	2.02.000	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	199.999,800		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	219.999,780
				Kecamatan		Kecamatan		75.000.000				82.500.000
				Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan		13.999.900				15.399.890
				Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan		13.999.900				15.399.890
				Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan		14.000.000				15.400.000
				Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan		16.000.000				17.600.000
				Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan		14.000.000				15.400.000
				Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan		19.000.000				20.900.000
				Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan		14.000.000				15.400.000
				Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan		20.000.000				22.000.000
7	01	03	2.02000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kecamatan dan Kelurahan	8 unit	20.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	22.000.000
				Kecamatan		Kecamatan		20.000.000				22.000.000
				Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan						.
				Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan						.
				Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan						.
				Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan						.
				Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan						.
				Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan						.
				Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan						.
				Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan						.
7	01	03	2.02000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	425,140,350		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	467,654,385
				Kecamatan		Kecamatan		150,695,450				165,764,995
				Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan		50,960,000	Pelatihan Public Speaking bagi Anggota TP.PKK Kelurahan sebanyak 20 orang			56,056,000
				Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan		13,960,000				15,356,000
				Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan		64,010,000				70,411,000
				Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan		52,464,900	Pelatihan tata rias sebanyak satu kelompok 20 Orang			57,711,390
				Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan		14,000,000				15,400,000
				Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan		51,040,000				56,144,000
				Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan		14,000,000				15,400,000
				Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan		14,010,000				15,411,000

7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)		133 RT	2,786,470,050		Jumlah Rukun Tetangga (RT)	133 RT	3,065,117,055
7	01	03	2.03.00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan dan Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2,786,470,050		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3,065,117,055
				Kecamatan		Kecamatan		4,000,000				4,400,000
				Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan		477,480,000				525,228,000
				Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan		228,360,000				251,196,000
				Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan		373,680,000				411,048,000
				Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan		186,840,000				205,524,000
				Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan		124,765,500				137,242,050
				Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan		498,240,000				548,064,000
				Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan		373,680,000				411,048,000
				Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan		519,424,550				571,367,005
7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Ketentraman Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat		10 laporan	20,200,000		Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Ketentraman Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat	10 laporan	22,220,000
7	01	04	2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib		2 jenis	20,200,000		Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib	2 jenis	22,220,000
7	01	04	2.01.00	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	108 Laporan	20,200,000		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	108 Laporan	22,220,000
				Kecamatan		Kecamatan		4,200,000				4,620,000
				Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan		2,000,000				2,200,000
				Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan		2,000,000				2,200,000
				Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan		2,000,000				2,200,000
				Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan		2,000,000				2,200,000
				Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan		2,000,000				2,200,000
				Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan		2,000,000				2,200,000
				Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan		2,000,000				2,200,000
				Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan		2,000,000				2,200,000
7	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat			11,000,000		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat		11,000,000

7	01	05	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah		2 jenis	11,000,000			Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	2 jenis	11,000,000
7	01	05	2.01.004	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan dan Kelurahan	170 Orang	1,000,000			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	170 Orang	0
				Kecamatan		Kecamatan		1,000,000		Penganggaran kegiatan kecamatan 290.970.000 dan Fasilitas MTQ Rp. 50.000.000,- kelurahan			
				Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan		-					-
				Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan		-					-
				Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan		-					-
				Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan		-					-
				Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan		-					-
				Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan		-					-
				Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan		-					-
				Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan		-					-
7	01	05	2.01.004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	6 Dokumen	10,000,000			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	11,000,000
				Kecamatan		Kecamatan		10,000,000					11,000,000
				Kelurahan Silaing Bawah		Kelurahan							-
				Kelurahan Silaing Atas		Kelurahan							-
				Kelurahan Pasar Usang		Kelurahan							-
				Kelurahan Bukit Surungan		Kelurahan							-
				Kelurahan Pasar Baru		Kelurahan							-
				Kelurahan Balai-Balai		Kelurahan							-
				Kelurahan Tanah Hitam		Kelurahan							-
				Kelurahan Kampung Manggis		Kelurahan							-

Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa dari rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Padang Panjang Barat yang ditetapkan melalui pembahasan awal RKPD bersama TAPD terjadi perubahan dan peningkatan anggaran untuk masing-masing subkegiatan. Hal ini disebabkan karena pada rancangan awal RKPD, untuk belanja BBM masih dengan harga sebelum kenaikan harga BBM, dan juga untuk anggaran Gaji Tenaga Harian Lepas masih belum memenuhi untuk 12 bulan.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Padang Panjang Barat untuk periode 1 (satu) tahun sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Padang Panjang. Untuk itu Kecamatan Padang Panjang Barat menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang menjelaskan tentang :

1. Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu
2. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat
3. Tujuan, sasaran, program dan Kegiatan Kecamatan Padang Panjang Barat.

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat ini diharapkan dapat dilaksanakan mulai Tahun 2024 dimana dalam rencana kerja ini juga merupakan usulan dari musrenbang Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2023.

Padang Panjang, Agustus 2023
CAMAT PADANG PANJANG BARAT

FIORI AGUSTIAN, S.IP
NIP. 19880515 201101 1 005